INDO-PACIFIC DEFENSE

VOLUME 43, TERBITAN KE-3, 2018

FORUM

Mendeteksi Mata Rantai Teror

Satuan Tugas Membasmi Teroris di Sumbernya

16

tajuk utama

10 Berjuang demi Tanah Air
Melawan terorisme memberikan pelajaran bagi Angkatan Bersenjata Filipina.

16 Upaya Adaptif
India memperbarui undang-undang, pelatihan militer, dan strategi pemerintahnya untuk melawan ancaman teror yang terus berkembang.

20 Dari Layar Komputer menuju Medan Pertempuran
Memahami penggunaan ruang digital oleh teroris untuk memikat kaum muda.

26 Kembalinya Pejuang Asing
Malaysia menggunakan strategi kontraterorisme multifaset untuk meredam ancaman.

30 Imperialisme Kreditur Tiongkok
Pinjaman dari Beijing mengancam sumber daya alam dan kedaulatan bagi negara penerima.

34 Kembalinya Rohingya
Pegiat hak mengatakan transparansi, dan keselamatan merupakan kunci kesuksesan pemulangan.

40 Meningkatnya Ketidaksetaraan
Kesenjangan ekonomi semakin berkontribusi pada risiko keamanan.

46 Pemosisian Strategis
India di perlintasan arus Indo-Pasifik.

50 Berbagi Informasi
Kerja sama yang lebih baik di antara organisasi militer, sipil, dan kemanusiaan dapat meningkatkan manajemen data untuk upaya bantuan kemanusiaan.

bagian-bagian

4 Indo-Pasifik Selayang Pandang

5 Kontributor

6 Seluruh Kawasan
Berita dari Indo-Pasifik.

8 Perkembangan Teroris
Indonesia tambah 600 petugas kontraterorisme.

54 Suara
Masa depan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

60 Budaya & Adat Istiadat
Festival perjodohan suku di Taiwan.

62 Media & Teknologi
Penjualan mobil ramah lingkungan di Norwegia dan kehebohan kuis online Tiongkok.

64 Cakrawala Dunia
Drone penyelaman dalam di Antartika dan pendidikan universitas gratis di Afrika Selatan.

65 Renungan
Fosil dinosaurus seukuran kalkun ditemukan di Australia.

66 Serba-Serbi
Berita-berita yang menarik, tak lazim, dan menghibur.

67 Kata Terakhir
Band militer Vietnam tampil di hadapan Presiden A.S. Donald Trump di Hanoi.

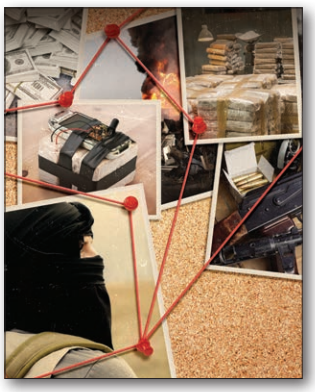

DI SAMPUL MAJALAH:
Ilustrasi foto ini menyampaikan kompleksitas dalam melawan ancaman teroris yang terus berubah di Indo-Pasifik.

ILUSTRASI *FORUM*

Pembaca yang Terhormat,

Selamat datang di edisi kuartal ketiga *Indo-Pacific Defense FORUM* pada tahun 2018 tentang melawan ancaman teror.

Mengingat jumlah dan letalitas tindakan terorisme di seluruh dunia, organisasi keamanan dan militer Indo-Pasifik harus terus meningkatkan kapabilitas kontraterorisme mereka. Pendekatan kolaboratif multilateral masih sangat penting untuk mengenali, bersiap, meredam dan menanggapi ancaman yang terus berkembang ini.

Dalam terbitan ini, kami berbagi wawasan tentang keberhasilan terbaru dalam melawan ekstremis kekerasan, dari gagalnya upaya mendirikan negara Islam di Filipina, hingga dianutnya unsur model kontraterorisme unggulan Singapura oleh India, sampai pada peredaman kembalinya pejuang asing di Malaysia. Kajian *FORUM* tidak hanya menyoroti beberapa taktik dan strategi terkemuka yang digunakan di kawasan ini namun juga menggali sebagian kondisi dasar kompleks yang berkontribusi pada penyebaran keyakinan ekstremis dan serangan terkait.

Letkol. Dr. Zulkarnain Haron dari Angkatan Bersenjata Malaysia berbagi pelajaran signifikan yang diperoleh selama pengepungan dan pengambilalihan kembali Marawi. Ia menganalisis bagaimana kelompok militan yang terkait dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) mengakar di beberapa bagian Filipina dan bagaimana Angkatan Bersenjata Filipina meredam penyebaran terorisme di Indo-Pasifik.

Dr. Miemie Winn Byrd, seorang profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, mengulas karya terbaru oleh para cendekiawan seperti ekonom Prancis Thomas Piketty mengenai bagaimana meningkatnya ketidaksetaraan sosial ekonomi memainkan peranan dalam radikalisasi. Tajuk lain mengkaji kondisi pengungsi Rohingya dari Myanmar yang memprihatinkan. Beberapa pemimpin politik baru-baru ini menyuarakan keprihatinan bahwa kelompok ekstremis, seperti ISIS, dapat mengincar sejumlah besar orang yang tertekan dan terlantar di Asia Tenggara.

Juga dalam terbitan ini, Thomas Koruth Samuel dari Pusat Kontraterorisme Regional Asia Tenggara di Malaysia menilai bagaimana kemajuan teknologi, seperti media sosial dan internet, telah memungkinkan kelompok teroris untuk merekrut anak-anak muda yang telah menjadi bagian utama dari permainan ekstremis.

Negara-negara Indo-Pasifik dapat memperoleh pelajaran dari Marawi dan keberhasilan masing-masing pihak untuk memastikan sejarah tidak terulang, dan terorisme, dalam segala bentuknya, tidak mengakar di bagian lainnya dari kawasan ini. Kerja sama multilateral antara sekutu dan negara mitra tetap penting untuk melindungi warga dari ancaman yang terus berubah ini.

Semoga edisi ini mampu menambah wawasan dan menggugah pemikiran, dan saya menyambut baik komentar Anda. Silakan hubungi staf *FORUM* di **ipdf@ipdefenseforum.com** untuk menyampaikan perspektif Anda.

Salam,

P. S. DAVIDSON
Laksamana Angkatan Laut A.S.
Komandan, Komando Indo-Pasifik A.S.

IPD FORUM

Melawan Ancaman Teror
Volume 43, Terbitan ke-3, 2018

KEPEMIMPINAN USINDOPACOM

PHILIP S. DAVIDSON
Laksamana AL A.S.
Komandan

BRYAN P. FENTON
Letnan Jenderal, A.S.
Wakil Komandan

KEVIN B. SCHNEIDER
Marsekal Muda AU A.S.
Kepala Staf

STEPHEN T. KOEHLER
Laksamana Muda AL A.S.
Direktur Operasi

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

NATHAN T. DIVELBESS
Letnan Kolonel, A.S.
Manajer IPD FORUM

HUBUNGI KAMI

IPD FORUM

Indo-Pacific Defense FORUM
Program Manager,
HQ USINDOPACOM Box 64013
Camp H.M. Smith, HI 96861 USA

ipdefenseforum.com
email:
ipdf@ipdefenseforum.com

Indo-Pacific Defense FORUM adalah sebuah majalah militer profesional yang diterbitkan triwulanan oleh komandan Komando Indo-Pasifik A.S. untuk menyediakan forum internasional bagi personel militer di kawasan Indo-Pasifik. Pendapat yang dituangkan dalam majalah ini tidak mewakili kebijakan atau sudut pandang komando ini atau lembaga pemerintah A.S. lainnya. Semua artikel ditulis oleh staf *FORUM* kecuali jika disebutkan lain. Menteri pertahanan A.S. yakin bahwa penerbitan majalah ini perlu adanya bagi upaya pendekatan pada masyarakat sebagaimanayang dikehendaki oleh Departemen Pertahanan A.S.

ISSN 2333-1593 (cetak)
ISSN 2333-1607 (online)

LETNAN KOLONEL DR. ZULKARNAIN HARON, analis senior di Sel Kontrateroris, Divisi Staf Intelijen Pertahanan, Angkatan Bersenjata Malaysia (MAF), juga bekerja dalam program rehabilitasi untuk personel MAF yang terlibat dalam Negara Islam Irak dan Suriah. Ia bergabung dengan MAF sebagai taruna pada Agustus 1988, pernah bekerja di berbagai unit artileri dan merupakan instruktur meriam berkualifikasi. Ia anggota Against Violent Extremism, sebuah LSM yang berbasis di Inggris yang bekerja melawan ekstremis dan merehabilitasi mantan teroris. Ditampilkan pada Halaman 10

THOMAS KORUTH SAMUEL dari Pusat Regional Asia Tenggara untuk Kontraterorisme (Southeast Asia Regional Centre for Counter-Terrorism) di Malaysia menjabat sebagai direktur Divisi Komunikasi Strategis Digital, di bawah naungan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Bidang utama risetnya mencakup narasi teroris dan kontranarasi selanjutnya, komunikasi strategis, dan keterlibatan kaum muda dalam terorisme. Ia memperoleh gelar kehormatan dalam teknologi biomedis dan gelar magister dalam studi pertahanan strategis dari University of Malaysia. Ia sedang melanjutkan studi doktor di bidang radikalisasi kaum muda. Ditampilkan pada Halaman 20

BRAHMA CHELLANEY adalah seorang profesor kajian strategis di Center for Policy Research yang berbasis di New Delhi dan fellow di Robert Bosch Academy di Berlin. Ia penulis sembilan buku, termasuk *Asian Juggernaut and Water: Asia's New Battleground*. Ditampilkan pada Halaman 30

DR. MIEMIE WINN BYRD, seorang profesor di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, dengan spesialisasi di bidang hubungan A.S.-Myanmar, perekonomian Indo-Pasifik, pengembangan organisasi, dan pembelajaran orang dewasa. Karyanya berfokus pada operasi sipil-militer, kolaborasi antarlembaga, dan standar akuntansi keuangan korporat. Ia memperoleh gelar sarjana ekonomi dan akuntansi dari Claremont McKenna College dan memiliki gelar magister administrasi bisnis dari University of Hawaii. Ia memperoleh gelar doktor di bidang kepemimpinan pendidikan dari University of Southern California. Ditampilkan pada Halaman 40

SAROSH BANA merupakan editor eksekutif *Business India* di Mumbai, India. Ia banyak menulis tentang pertahanan dan keamanan, keamanan siber, ruang angkasa, energi, lingkungan, urusan luar negeri, pangan dan pertanian, perkapalan dan pelabuhan, serta pembangunan perkotaan dan pedesaan. Dia merupakan Jefferson fellow di East-West Center (EWC), Hawaii dan menjabat sebagai bendahara/sekretaris dalam dewan Asosiasi EWC. Ditampilkan pada Halaman 46

JOSEPH D. MARTIN menjabat sebagai direktur Pusat Keunggulan Manajemen Bencana dan Bantuan Kemanusiaan (Center for Excellence in Disaster Management and Humanitarian Assistance) Departemen Pertahanan A.S. di Ford Island, Pearl Harbor, Hawaii. Ia mengarahkan pelatihan, pendidikan, riset terapan, koordinasi sipil-militer regional dan dukungan krisis selama bencana untuk mendukung Komando Indo-Pasifik A.S., dengan tanggung jawab di seluruh dunia dan penyelarasan fungsional di bawah asisten deputi menteri pertahanan bidang stabilitas dan urusan kemanusiaan. Ia ditunjuk sebagai Senior Executive Service pada Oktober 2016 saat kembali mengemban tugas sebagai direktur pusat itu; ia sebelumnya menjabat sebagai direktur pusat itu dari Mei 2014 hingga Juni 2016 sewaktu aktif bertugas sebagai kolonel Angkatan Udara A.S. Ditampilkan pada Halaman 50

Gabung dengan Bahasan Ini

Kami ingin mendengar dari ANDA!

Indo-Pacific Defense FORUM melayani personel militer dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Majalah triwulanan produk Komando Indo-Pasifik A.S. ini menyediakan konten berkualitas tinggi dan mendalam mengenai topik-topik yang memengaruhi upaya keamanan di seluruh kawasan — mulai dari kontraterorisme hingga kerja sama internasional dan bencana alam.

FORUM membangkitkan bahasan-bahasan yang mendalam dan mendorong pertukaran gagasan yang sehat. Ajukan tulisan, foto-foto, pokok-pokok bahasan atau tanggapan-tanggapan lainnya kepada kami lewat DUNIA MAYA atau ke:

Program Manager
Indo-Pacific Defense FORUM
HQ USINDOPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

Indo-Pacific Defense FORUM menawarkan konten online ekstensif, dengan artikel baru yang dipasang setiap hari, di **www.ipdefenseforum.com**

Para pengunjung dapat:

- Membaca tulisan khusus di dunia maya
- Menengok kembali terbitan sebelumnya
- Mengirim umpan balik kepada kami
- Minta berlangganan
- Mempelajari cara untuk mengajukan tulisan

FORUM

Menjelajahi hal-hal yang memengaruhi sekian banyak jiwa

INDONESIA

REKOR PENGGEREBEKAN
SABU-SABU

Indonesia menyita 1,6 ton kristal metamfetamin (sabu-sabu) dari sebuah kapal di lepas pantai pulau utara Batam pada Februari 2018, kata seorang pejabat narkotika. Itu merupakan penggerebekan besar kedua dalam bulan tersebut.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menindak tegas perdagangan narkoba untuk membendung melambungnya konsumsi sabu-sabu dan narkotika lainnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki undang-undang antinarkotika paling tegas di dunia, dan perdagangan narkoba dipidana dengan hukuman mati.

"Diperkirakan 1,6 ton, dan ya, ini rekor penyitaan bagi kami," kata juru bicara badan narkotika nasional, Sulistiandriatmoko, yang menambahkan bahwa perincian asal dan tujuannya masih diselidiki.

Kantor PBB Urusan Narkoba dan Kejahatan memperkirakan bahwa perdagangan metamfetamin dan heroin di Asia Tenggara bernilai 450 triliun rupiah (31 miliar dolar A.S.) pada 2013.

Sebelumnya pada Februari 2018, pihak berwenang Indonesia menyita 1 ton lebih kristal meth, yang biasa disebut sabu-sabu, juga di Batam, yang merupakan pusat industri kecil yang dapat dijangkau dengan kapal feri singkat dari Singapura.

Budi Waseso, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional, mengatakan bahwa pihak berwenang telah menindaklanjuti informasi dari pihak berwenang Tiongkok dan Thailand, dan bahwa pengiriman datang dari Myanmar dalam kapal yang disamarkan sebagai kapal nelayan.

"Kapal ini pernah pergi ke Australia ... dan beberapa kali keluar masuk perairan Indonesia. Ini artinya kapal ini telah berulang kali memasuki Indonesia dengan membawa sejumlah besar narkotika," kata Budi Waseso. Reuters

JEPANG

STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR HIDROGEN

NAIK HAMPIR DUA KALI LIPAT PER 2022

Aliansi 11 perusahaan Jepang, termasuk pabrik mobil dan perusahaan energi, telah berikrar untuk membangun 80 stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan sel bahan bakar hidrogen per tahun 2022 untuk membantu mempercepat penerimaan teknologi bahan bakar generasi berikutnya.

Japan H2 Mobility LLC, yang didukung antara lain oleh Toyota Motor Corp. dan JXTG Nippon Oil & Energy, mengatakan pada awal Maret 2018 bahwa mereka akan mengawasi pembangunan dan pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar baru, hampir dua kali lipat dari jumlah saat ini sebanyak 90 stasiun.

Seiring berbagai negara mencari sumber energi rendah emisi untuk menenagai kendaraan, rumah dan industri, Jepang bertaruh besar-besaran untuk menjadi "masyarakat hidrogen" kendati biayanya tinggi dan ada kesulitan teknis dari proses yang menciptakan listrik dari reaksi kimia bahan bakar dan oksigen.

Wakil Presiden Direktur Senior JXTG Nippon Oil, Yutaka Kuwahara, mengatakan pada Februari 2018 bahwa kurangnya pengguna dan tingginya biaya untuk membangun dan mengoperasikan stasiun pengisian bahan bakar telah memperlambat pembangunan di Jepang, menangguhkan target pemerintah sebelumnya untuk membangun 100 stasiun per Maret 2016.

Jepang saat ini memiliki sekitar 90 stasiun, dengan setidaknya 40 stasiun dioperasikan oleh JXTG Nippon Oil, dan 10 stasiun lagi berada dalam tahap perencanaan atau pembangunan.

"Kita harus menurunkan biaya, yang akan menghapus banyak kemandekan untuk mengembangkan lebih banyak stasiun," ujarnya kepada jurnalis dalam sebuah pengarahan. Reuters

BERBAGI SEPEDA melambung tinggi

Jutaan konsumen di Beijing, Taipei, Singapura dan kota-kota di seluruh Asia menyewa sepeda dan meninggalkan mobil mereka di rumah. Mereka menyewa sepeda melalui aplikasi ponsel untuk merampungkan beberapa kilometer terakhir dari perjalanan, meninggalkan mobil dan sepeda motor di rumah dan melupakan taksi.

Peningkatan drastis jumlah pesepeda telah mengurangi permintaan bensin di Tiongkok, dan negara-negara lainnya di kawasan ini mengharapkan perubahan yang lebih besar dalam konsumsi energi seiring perkembangan program tersebut.

Booming berbagi sepeda selama dua tahun telah menghadirkan lebih dari 16 juta sepeda hanya di Tiongkok saja, demikian menurut Kementerian Transportasi Tiongkok. Lebih dari 100 juta pesepeda telah terdaftar, yang diharapkan akan menyebabkan penggunaan mobil dan pertumbuhan permintaan bensin mandek per tahun 2025.

Analis tidak dapat mengikuti perkembangan jumlah sepeda, apalagi memperkirakan berapa banyak penurunan pertumbuhan konsumsi bensin akibat pesatnya peningkatan berbagi sepeda. Jelas terlihat dari estimasi industri, laporan pemerintah dan survei Reuters bahwa layanan sepeda mengakibatkan lebih sedikit perjalanan menggunakan kendaraan bermotor.

"Berbagi sepeda telah menggila ... Keyakinan umum yang ada adalah bahwa [ini] mendongkrak pemanfaatan angkutan umum sebab berbagi sepeda membantu merampungkan perjalanan," ujar Harry Liu, konsultan IHS Markit.

Bahkan sebelum jumlah unit berbagi sepeda mulai tumbuh, analis telah mengatakan bahwa efisiensi bahan bakar yang lebih baik pada mobil dan meningkatnya penggunaan mobil listrik berarti kisah pertumbuhan besar bensin telah berakhir.

Pada Januari 2018, perusahaan start-up berbagi sepeda Tiongkok, Mobike, memperkenalkan layanannya di Kuala Lumpur, Malaysia, dan Bangkok, Thailand, serta di Washington, D.C.

Mobike, yang diluncurkan pada April 2016, dan pesaingnya Ofo milik Tiongkok telah menarik pendanaan gabungan sebesar lebih dari 29 triliun rupiah (2 miliar dolar A.S.) dari perusahaan ekuitas privat dan modal ventura antara lain Temasek Holdings, Tencent Holdings, DST Global, dan Ant Financial.

Taiwan, yang pemerintahnya mendukung program berbagi sepeda, bermaksud menjadikan sepeda memiliki 12 persen pangsa dalam perjalanan ke tempat kerja per tahun 2020, naik dari sekitar 5 persen pada saat ini.

Pemerintah kota Taipei memperluas program berbagi sepeda Youbike — yang menggunakan stasiun docking — agar memiliki stasiun sepeda dalam 10 menit berjalan kaki dari setiap warga.

Obike milik Singapura dan VBikes yang berbasis di A.S. — keduanya sistem bebas docking — juga beroperasi di Taiwan.

"Begitu berbagi sepeda benar-benar mendobrak hingga batasnya, sampai memengaruhi cara orang berpikir tentang mobilitas, maka itu bisa menjadi disruptif," ujar Liu.

Namun, kesalahan pengelolaan jumlah sepeda dan penyalahgunaan sebagian sepeda dapat menarik legislasi yang dapat membatasi penggunaannya. Baru-baru ini, sepeda berbagi baru dilarang di beberapa wilayah di kota Wuhan, Shanghai, dan Guangzhou di Tiongkok, karena sepeda-sepeda ditinggalkan begitu saja di tempat umum. Reuters

Indonesia tambah 600 petugas pada PASUKAN KONTRATEROR

ISMIRA LUTFIA TISNADIBRATA/BENARNEWS

Indonesia akan menggandakan ukuran pasukan kontraterorisme menjelang acara internasional besar yang akan berlangsung di negara ini pada tahun 2018, kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada akhir Desember 2017. Jenderal polisi bintang dua akan memimpin pasukan ini alih-alih jenderal bintang satu, ujar Tito.

"Saya juga sudah meminta jumlah pasukan digandakan. Kami menambah sekitar 600 personel, jadi jumlah totalnya menjadi 1.300 orang," ujarnya.

Mantan kepala unit polisi elit itu mengatakan perubahan tersebut adalah akibat penilaian tingkat ancaman 2018 saat Indonesia menyelenggarakan dua acara internasional besar.

Polisi kontraterorisme Indonesia menutup jalan untuk menggeledah sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur pada 19 Juni 2017, setelah penangkapan seorang pria yang diduga terkait dengan Negara Islam Irak dan Suriah. GETTY IMAGES

KIRI: Jenderal Gatot Nurmantyo, yang saat itu menjabat sebagai Panglima TNI, kiri, berbicara dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta, Indonesia, pada November 2017. REUTERS

Acara itu adalah Asian Games, yang akan berlangsung di Jakarta, Palembang di Sumatra dan berbagai daerah di Jawa Barat, dengan 1.500 orang dari 45 negara yang ikut ambil bagian; dan pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (WB) di Bali, yang diikuti oleh 189 negara.

Ikut sertanya Korea Utara dan Myanmar dalam Asian Games pada Agustus dan September 2018 serta Israel dan Amerika Serikat dalam pertemuan IMF dan WB pada bulan Oktober menjadikan kedua acara tersebut berpotensi menjadi target bagi kelompok radikal dan teroris, kata Tito.

Densus 88, bagian dari pasukan kepolisian Indonesia, pada tahun 2017 menangkap 172 terduga teroris, dan 16 di antaranya ditembak mati dalam upaya penangkapan, kata beberapa pejabat.

Jumlah terduga yang ditangkap meningkat menjadi 163 orang pada 2016 dari 73 orang pada 2015. Dari terduga yang ditangkap pada 2017, 76 orang disidang pada awal 2018, dan 10 orang telah dijatuhi hukuman.

"Jumlah penangkapan lebih banyak berkat langkah proaktif yang diambil oleh kepolisian, khususnya Densus 88, yang bekerja lebih keras untuk mendeteksi, memantau dan mengambil tindakan terhadap jaringan teror," kata Tito.

Ia mengatakan bahwa jumlah polisi yang tewas dalam tindakan teror telah meningkat selama tiga tahun terakhir. Empat polisi tewas dan 14 terluka saat sedang bekerja pada tahun 2017, kata Tito. Pada 2016, pasukan elit tersebut mengalami satu korban jiwa, dan 11 yang terluka. Satu petugas tewas dan dua terluka pada 2015.

"Saya telah menginstruksikan agar dilakukan lebih banyak tugas penyamaran, pencegahan dini, dan tindakan sebelum terjadi insiden. Untuk itu, kami membutuhkan kapasitas deteksi yang lebih kuat," ujarnya.

Pangkat komandan Densus 88 yang lebih tinggi menunjukkan perluasan tugas dan anggaran yang lebih besar untuk pasukan ini, demikian menurut pakar kontraterorisme Rakyan Adibrata.

"Tetapi ingat, melatih petugas kontraterorisme yang 100 persen profesional dan siap sangat memakan waktu, sementara melatih teroris jauh lebih cepat," katanya. "Densus akan berpacu melawan waktu."

"Dari segi sumber daya, ISIS [Negara Islam Irak dan Suriah] tidak seperti Jemaah Islamiyah, yang bertujuan menimbulkan banyak korban jiwa," kata Rakyan, yang membandingkan ISIS dengan afiliasi Al-Qaeda yang menewaskan 202 orang dalam pengeboman kelab malam di Bali pada tahun 2002.

"Bagi mereka, melakukan serangan dengan hanya menggunakan pisau dapur saja sudah cukup," demikian pendapatnya tentang ISIS.

Rakyan setuju dengan analisis kapolri bahwa acara internasional di Indonesia pada 2018 dapat dijadikan target oleh teroris.

"Ada ekspektasi yang tinggi dari pelaku yang ingin menggunakan terorisme sebagai alat untuk menyampaikan pesan politik," ujarnya.

Menurut statistik dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, 227 orang Indonesia ditangkap di luar negeri pada 2017, termasuk di Turki, Malaysia, Suriah, dan Korea Selatan. Jumlah tertinggi orang yang ditangkap ada di Turki dengan jumlah 195 orang, disusul oleh Suriah dengan jumlah 28 orang.

Kementerian luar negeri menambahkan bahwa 213 orang Indonesia, termasuk 79 wanita dan 78 anak-anak, dideportasi dari Turki antara 1 Januari 2017 hingga 20 Oktober 2017. Jumlah itu tiga kali lipat lebih besar dibandingkan 60 orang yang dideportasi dari Turki pada 2016.

Pejabat Kementerian Luar Negeri, Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa sebagian besar orang Indonesia dideportasi akibat pelanggaran imigrasi, seperti penggunaan visa yang tidak benar, melampaui masa visa atau tidak dapat menunjukkan paspor.

"Kendati demikian, pihak berwenang Turki menunjukkan kecurigaan mereka bahwa orang-orang tersebut berada di Turki untuk menyeberang masuk ke Suriah dan bergabung dengan ISIS atau kelompok lain sejenis, seperti Jabhat al-Nusrah, di Suriah," katanya.

Seorang Marinir Filipina mengambil posisi dalam serangan pura-pura sebagai bagian dari pelatihan dengan Pasukan Pertahanan Australia di Pangkalan Marinir Gregorio Lim, barat daya Manila, Filipina. THE ASSOCIATED PRESS

Berjuang demi TANAH AIR

MELAWAN TERORISME MEMBERIKAN PELAJARAN BAGI ANGKATAN BERSENJATA FILIPINA

LETNAN KOLONEL DR. ZULKARNAIN HARON

Lingkungan keamanan kini semakin menantang sebab dunia yang terglobalisasi menghadapi sejumlah besar ancaman, terutama terorisme — ancaman yang senantiasa berkembang. Teroris belajar beradaptasi dengan langkah tandingan, yang diterapkan untuk mencegah serangan teror dan mengeksploitasi kemajuan teknologi. Teroris kini semakin mematikan seraya mereka berupaya mendiversifikasi taktik dan target, mempertunjukkan fleksibilitas dan keahlian teknis yang lebih tinggi. Mereka tetap termotivasi terutama oleh persoalan lokal, namun perkembangan dan kekuatan global memperkuat kebencian dan jangkauan operasional mereka.

Mengingat tren ini, kerja sama dalam melawan terorisme kini semakin mendesak. Tidak ada negara yang dapat melawan ancaman teroris sendiri-sendiri, jadi diperlukan kerja sama multilateral. Perhimpunan Bangsa-Bangsa dan badan regional lainnya, serta masing-masing negara, telah memulai upaya untuk mencapai hal ini. Ada banyak gagasan, namun usaha multilateral praktis untuk melawan terorisme masih tetap belum memadai. Ini adalah kenyataan yang harus diatasi agar dapat secara efektif menangani dan pada akhirnya membinasakan ancaman terorisme.

Terorisme dan permasalahan transnasional lainnya tidak mengenal batas, sehingga negara-negara harus memperkuat kerja sama intelijen melalui pengalaman bersama demi kedamaian dan stabilitas Indo-Pasifik dalam jangka panjang.

Dengan latar belakang ini, Filipina telah memperoleh pelajaran mengenai terorisme dan upaya kontraterorisme yang layak untuk dibagikan.

ANCAMAN TERORIS DI FILIPINA

Terorisme di Filipina lahir dari gagasan yang terbentuk oleh bauran faktor politik, ekonomi dan sosial budaya yang melahirkan keluhan dan pengaruh ideologi politik, khususnya yang disokong oleh Al-Qaeda dan Jemaah Islamiyah (JI) serta, akhir-akhir ini, Negara Islam Irak dan Suriah, yang juga dikenal sebagai Daesh. Kelompok teroris merupakan cabang dari gerakan separatis yang membuahkan organisasi pecahan yang mengelak dari perjanjian damai dengan pemerintah dan menganut paham garis keras dalam upaya mencapai aspirasi mereka untuk menggunakan kekerasan menggulingkan pemerintah sekuler dan mendirikan negara Islam yang terpisah dari Republik Filipina dan diatur oleh hukum Islam atau Syariat.

Seorang tentara memandang keluar melalui kaca depan kendaraan militer yang pecah dengan lubang peluru saat unitnya bersiap meninggalkan pertempuran melawan militan yang diilhami oleh Negara Islam di Filipina selatan. GETTY IMAGES

Pengalaman dalam Perang Afganistan pada tahun 1980-an, yang menarik pejuang Islam dari berbagai negara, serta peluang kerja dan pendidikan di luar negeri di bawah perusahaan, donatur dan pengkhotbah radikal memfasilitasi interaksi antara tokoh dan kelompok teroris dan radikal. Ini menanamkan rasa persaudaraan yang memungkinkan mereka untuk saling memberikan dukungan.

Akhir-akhir ini, pengaruh formatif dan tradisional dari Al-Qaeda dan JI terhadap kelompok teror lokal telah dilampaui oleh Daesh. Didukung oleh keberhasilan awal di medan pertempuran, mesin propaganda yang mantap, perekrutan online melalui media sosial dan, yang terpenting, daya tarik narasi Daesh tentang pendirian komunitas Islam dan pesan kiamat yakni menghabisi semua musuh Islam, ribuan pejuang teroris asing pergi ke Suriah dan Irak untuk bergabung dengan Daesh — termasuk sekitar 700 hingga 1.000 orang dari Asia Tenggara.

Sejak proklamasi kekhalifahan rekaan sendiri di Timur Tengah pada Juni 2014, jaringan Daesh tumbuh, dengan berbagai kelompok radikal di seluruh dunia berjanji setia padanya. Daesh mengakui dan secara resmi terkait dengan beberapa kelompok ini dengan pembentukan wilayat, atau provinsi.

Di Filipina, subpemimpin Kelompok Abu Sayyaf (ASG) yang berbasis di Basilan, Isnilon Hapilon dan pengikutnya berjanji setia pada Khalifah Daesh Abu Bakr al-Baghdadi pada Juli 2014. Selain dari kelompok Hapilon, tokoh dan organisasi radikal lain di Filipina juga menyatakan dukungan pada Daesh.

TERORIS ASING

Kehadiran teroris asing di Filipina bukan fenomena baru. Akan tetapi, pada pertengahan tahun 2000-an, menyusul penumpasan regional atas JI, upaya kontraterorisme oleh pemerintah dan kembali dimulainya negosiasi damai dengan Front Pembebasan Islam Moro (MILF), kehadiran pejuang teroris asing di negara ini mulai menyusut. Sebagai besar kamp pelatihan teroris di Mindanao telah ditutup, dan beberapa tokoh teroris asing utama tewas di sana atau di negara asal mereka.

Namun, perkembangan menyusul munculnya Daesh pada 2014 mendorong generasi baru teroris asing untuk pergi ke Mindanao dan menjalin hubungan dengan kelompok teror lokal sebagai solidaritas dengan Daesh. Saat ini terdapat tujuh kelompok teroris asing yang telah teridentifikasi di Filipina, dan ada beberapa kelompok lainnya yang sedang dipantau.

Teroris asing memengaruhi arah kelompok teror lokal menuju tercapainya visi Daesh atas wilayah Asia Tenggara dan memberi mereka kesempatan untuk memperoleh pendanaan dari organisasi teroris asing. Mereka membiayai pembangunan masjid dan sekolah (madrasah) di komunitas Muslim sebagai kedok untuk memperpanjang masa tinggal mereka di negara itu, yang akhirnya sebagai tempat untuk upaya radikalisasi dan indoktrinasi serta sebagai kedok bagi upaya terkait teror.

Teroris asing mempropagandakan ajaran ekstremis kekerasan dan memfasilitasi transfer pengetahuan, seperti membuat alat ledak dan pelatihan keahlian menembak. Yang lebih penting lagi, teroris asing

Marinir Filipina menembakkan mortir ke posisi musuh di Marawi, Filipina selatan. GETTY IMAGES

membantu menyatukan kelompok teroris lokal dan keterkaitannya dengan Daesh di Timur Tengah melalui Katibah Nusantara, yang merupakan pengelompokan orang Asia Tenggara yang berbasis di Suriah.

Katibah Nusantara adalah unit militer Asia Tenggara di dalam Daesh, yang terdiri dari orang-orang berbahasa Melayu, sebagian besar dari Indonesia dan Malaysia, namun juga dari Filipina dan Singapura. Mereka terkenal sebagai pelaku serangan Jakarta 2016. Katibah Nusantara terdiri dari sekitar 30 kelompok kecil.

Seorang teroris asing terkenal di Filipina adalah Dr. Mahmud bin Ahmad, orang Malaysia dan kepala perekrut Daesh. Ia bertanggung jawab atas pelatihan dan pengiriman militan dari Asia Tenggara untuk bergabung dengan Daesh di Suriah dan Irak. Mahmud berencana mendirikan faksi Daesh resmi di Asia Tenggara dengan menyatukan sel-sel teror dari Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Alhasil, Mahmud mendirikan Katibah al-Muhajir (Batalion Migran) di Filipina, yang sebagian besar terdiri dari orang-orang Indonesia dan Malaysia yang tidak dapat bergabung dengan Daesh di Timur Tengah.

Umumnya, pejuang teroris asing ini menggunakan rute masuk dan keluar di pintu belakang selatan negara ini, melalui kerja sama rahasia dengan kontak lokal dan asing yang sudah mapan. Cara lainnya adalah titik masuk konvensional, seperti bandara dan pelabuhan laut.

PENGEPUNGAN MARAWI

Pengepungan Marawi rencananya dimulai pada hari pertama Ramadan, yakni 26 Mei 2017. Rencananya, yang dimodel dari pendudukan Mosul di Irak oleh Daesh, terdiri dari pelaksanaan tindakan keji secara bersamaan di berbagai lokasi di Marawi, satu-satunya kota Islam di negara ini, dan melakukan serangan di komunitas Kristen di kota-kota lainnya. Pelaku berharap sekutu politik mereka dan orang-orang Marawi akan mendukung pengambilalihan kota. Namun, hal ini dapat dicegah saat operasi pemerintah yang dipimpin intelijen menyerang tempat persembunyian pemimpin Dawlah Islamiyah, Isnilon Hapilon dan adik-beradik Maute, Abdullah dan Omarkhayam, di Kota Marawi pada 23 Mei 2017.

Serangan itu memicu kontak dini antara pasukan pemerintah dengan unsur teroris, yang sebagian besar telah secara diam-diam menyusup ke dalam kota. Patut dicatat bahwa hampir 700 unsur bersenjata, yang terdiri dari anggota Dawlah Islamiyah, kerabat mereka, unsur pelanggar hukum lainnya serta pendukung mereka, menyerang beberapa tempat, menyandera warga sipil dan menduduki bangunan dan area utama di sebagian kota.

Dalam beberapa minggu selanjutnya, operasi Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) menetralisir beberapa markas musuh, termasuk penembak jitu, sehingga memungkinkan pemerintah memperoleh kembali kendali atas tempat yang sebelumnya diduduki oleh teroris, yang diakhiri dengan penyataan kemenangan Presiden Rodrigo Duterte pada Oktober 2017.

PENGALAMAN BELAJAR YANG SIGNIFIKAN

Pengepungan Marawi telah menjadi pengalaman belajar yang signifikan, bukan hanya bagi pasukan keamanan namun juga bagi pemerintah. Dalam kampanye lima bulan untuk membekuk teroris, pasukan keamanan menghadapi generasi baru pejuang teroris dengan taktik yang berbeda. Teroris ini memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan pertempuran untuk memulai pertempuran berkepanjangan terhadap tentara pemerintah, khususnya mengeksploitasi unsur yang ada di lapangan, seperti tempat yang menguntungkan, rute, rumah yang dibentengi, jaringan individu dan kelompok bersenjata, sumber daya kota, serta simpati dan dukungan dari beberapa penduduk, untuk perang gerilya berkepanjangan di medan perkotaan. Konflik tersebut, yang menelan jiwa ratusan tentara dan polisi, menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan kapabilitas pasukan keamanan Filipina, khususnya dalam perang perkotaan, intelijen, pengawasan dan pengintaian, serta intelijen sinyal.

Pemerintah Filipina juga menyadari semangat keagamaan mendalam yang dimiliki teroris tersebut, yang kemungkinan berasal dari indoktrinasi radikal. Kefanatikan agama mereka melampaui perbedaan etnik dan mempersatukan kelompok yang berlainan ini, yang terlihat mulai dari 2016 dan berujung dalam pengepungan Marawi. Persepsi awal bahwa teroris tersebut hanya berusaha menebar ketakutan dan ketidakstabilan serta dimotivasi oleh prospek memperoleh keuntungan finansial tetapi tidak dapat melancarkan serangan berskala besar telah berubah, dengan kehadiran pejuang yang sangat termotivasi yang mampu merebut wilayah kekuasaan, menimbulkan keprihatinan yang mendalam dari komunitas lokal dan internasional. Dari tak dikenal, mereka mengusung diri menjadi kebejatan global.

Meski operasi militer telah memberikan hasil yang substansial, terorisme tidak dapat ditaklukkan oleh pasukan militer saja. Tindakan militer dan serangan udara dieksploitasi oleh teroris, mengubah pembantaian dan korban jiwa dari konflik menjadi narasi menarik yang berupaya menggerus keabsahan operasi pemerintah, memengaruhi penduduk yang kehilangan haknya dan terdampak untuk mendukung teroris dan membenarkan usaha kekerasan mereka.

Undang-undang yang tidak efektif atau kurang memadai memungkinkan perkembangan organisasi teroris dan penyebaran ideologi kekerasan mereka. Dari legislasi antiteror hingga undang-undang pengendalian perbatasan, imigrasi dan keamanan yang timpang, pemerintah menyaksikan pembentukan lingkungan fisik dan psikologis melalui institusi Islam radikal. Pihak berwenang memberikan perhatian khusus pada entitas

Pejuang Front Pembebasan Islam Moro dan polisi lokal berjalan melewati rawa dalam perjalanan menuju garis depan pertempuran melawan ekstremis di provinsi Maguindanao, Filipina. GETTY IMAGES

dan sistem pendidikan dan keagamaan (pendidikan dan beasiswa Islam di luar negeri); sistem buruh luar negeri; infrastruktur teknologi; sistem politik dan elektoral; serta, pada akhirnya, tata kelola lokal. Upaya untuk mengambil alih Kota Marawi untuk mengklaim wilayah, berdasarkan strategi Daesh, merupakan bukti ketidakmampuan ini.

Peningkatan pesat dukungan dan tenaga kerja kelompok teroris berbanding relatif dengan konteks sosial, politik dan ekonomi di area tempat mereka dominan. Jumlah Muslim Filipina yang signifikan senantiasa terpapar kekerasan dan konflik. Hal ini, dibarengi dengan sejarah penindasan dan kurangnya kesempatan untuk memperbaiki kondisi mereka, membuat orang rentan bergabung dengan kelompok teroris untuk lari dari kemiskinan dan perampasan, terutama karena kelompok teroris sering menjanjikan keuntungan ekonomi sebagai imbalan atas afiliasi dan dukungan.

Tata kelola yang buruk semakin berkontribusi pada perkembangan organisasi cikal bakal dan calon teroris. Begitulah kasus di beberapa daerah di Filipina selatan ketika proliferasi tindakan kejahatan dan kekerasan, yang dibenarkan oleh "budaya senjata api", "rido" dan "pintakasi", telah menjadi bagian dari jalan hidup mereka. Sering kali, pejabat lokal tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk memerintah secara efektif, sehingga memfasilitasi mutasi kelompok bersenjata menjadi organisasi teror.

Tren lain yang memprihatinkan mungkin berupa kemungkinan terjadinya bentrokan sektarian karena permusuhan antara Kristiani dan Muslim dapat kembali dipicu oleh konflik Marawi. Oleh karena itu, penting halnya bahwa pendekatan seluruh masyarakat digunakan untuk mengurangi dan bahkan meniadakan dampak dari konflik ini, terutama pada korban, pengungsi internal dan kerabat serta komunitas teroris yang tewas. Ini hendaknya berfungsi sebagai pelajaran penting dari sejarah panjang negara ini dalam perang separatis Muslim.

Situasi keamanan di Filipina, terutama di Mindanao, umumnya tetap terkendali. Ancaman teror tetap terkungkung pada beberapa area tertentu berkat penyelesaian tegas oleh pemerintah Filipina untuk membasmi kapabilitas teroris dan secara efektif mengatasi tantangan ini dengan mengupayakan perdamaian yang dapat diterapkan dengan MILF, yang tetap merupakan hambatan penting terhadap penyebaran ekstremisme kekerasan, kewaspadaan yang lebih tinggi, meningkatnya kapabilitas dan logistik terhadap aktivitas teroris dan kriminal, serta kerja sama dan kolaborasi aktif dengan sekutu regional dan internasional.

Akan tetapi, mengingat bahwa tidak ada negara yang aman dari ancaman terorisme dan ekstremisme kekerasan, dan mengingat tantangan terhadap upaya kontraterorisme Filipina, negara-negara harus membawa kerja sama multilateral lebih jauh dengan membangun kapasitas kontraterorisme pemerintah. Ini terutama penting dalam melawan pembiayaan terorisme, imigrasi dan kontrol perbatasan, merancang undang-undang yang lebih efektif untuk melawan terorisme, ekstradisi dan bantuan hukum bersama. Kerja sama semacam ini juga mendorong pemantauan yang lebih waspada terhadap perekrutan pejuang Daesh melalui internet dan platform media sosial, serta, kontraradikalisasi dan deradikalisasi.

UPAYA FILIPINA DALAM MELAWAN TERORISME

Pemerintah Filipina menerapkan tanggapan keamanan komprehensif untuk mengatasi ancaman kembalinya pejuang asing dan terorisme. Kampanye kontraterorismenya berlandaskan kebijakan negara dan undang-undang antiteror negara ini, Republic Act 9372 atau Human Security Act (HSA) tahun 2007, yang mana ketetapan utamanya sedang diubah untuk menambahkan kekuatan agar dapat secara efektif mengatasi ancaman teror di negara ini. Melalui HSA, badan multilembaga yang dikenal sebagai Anti-Terrorism Council (ATC) dibentuk untuk menerapkan kebijakan antiterorisme negara ini. Yang bertindak sebagai koordinator dalam pelaksanaan yang tepat atas semua arahan dewan adalah ATC-Program Management Center (PMC), yang berupaya meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam melawan terorisme.

ATC-PMC baru-baru ini meluncurkan Rencana Tindakan Nasional untuk Mencegah dan Melawan Ekstremisme Kekerasan, yang akan mengatasi berbagai pendorong ekstremisme kekerasan. Patut dicatat bahwa upaya dalam hal ini sedang dilakukan pada tingkat lokal, khususnya di Mindanao, dengan memajukan budaya damai dan bebas kekerasan.

Pemerintah juga menganut langkah hukum dan legislatif untuk mengatasi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh kelompok teroris. Ini meliputi Republic Act (RA) No. 10167, Undang-Undang untuk Lebih Memperkuat Hukum Anti-Pencucian Uang, dan RA No. 10168, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan

Pembiayaan Teroris, yang mewajibkan bank dan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang melibatkan dana yang mungkin terkait dengan teroris dan membekukan tanpa penundaan properti atau dana milik entitas dan individu yang dicap teroris.

Pemerintah dan juga AFP tetap tegas dalam kebijakan menolak bernegosiasi dengan teroris atau membayar tebusan. Akan tetapi, bisnis penculikan demi tebusan (kidnap for ransom-KFR) sangat tertanam dalam perekonomian wilayah perbatasan tiga negara dengan unsur militer, penegak hukum, pemerintah lokal dan Front Pembebasan Nasional Moro yang diam-diam bekerja sama dengan kelompok KFR agar dana terus mengalir masuk.

khusus dimulai di daerah-daerah miskin untuk mengatasi kerentanan masyarakat terhadap perekrutan teroris. AFT mendukung inisiatif untuk membangun perdamaian, dialog antaragama, inisiatif kontraradikalisasi dan deradikalisasi serta membantu mempercepat pemberian layanan dasar untuk memperoleh kepercayaan dan penerimaan rakyat dan memberantas jaringan dukungan teroris, yang dianggap sangat penting untuk semakin membasmi kekuatan dan kapabilitas teroris.

Selain itu, AFP memajukan kerja sama bilateral, regional dan internasional yang lebih kuat untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam mencegah, meredam dan pada akhirnya memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya. Ini dilakukan

Angkatan Bersenjata Filipina memajukan kerja sama bilateral, regional dan internasional yang lebih kuat untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam mencegah, meredam dan pada akhirnya memberantas terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Peran AFP yang sangat penting dalam kontraterorisme berpusat pada operasi militer jitu dan tepat waktu yang didorong oleh intelijen. Dengan berkoordinasi dengan rekan kepolisian dan lembaga terkait lainnya, AFP telah memanfaatkan intelijen semua sumber untuk mengidentifikasi, memantau dan menemukan lokasi target musuh dan mengeksploitasi kerentanan kritis musuh. Guna menambah pengumpulan intelijen mengenai tokoh teroris utama, diterapkan sistem imbalan yang tujukan untuk memberi informan insentif untuk melaporkan keberadaan tokoh tersebut di daerah mereka.

Peleburan intelijen yang lebih besar di bawah naungan AFP telah berkontribusi pada operasi keamanan yang lebih baik yang terus memberikan hasil positif, dengan netralisasi pemimpin teroris utama, perencana penculikan demi tebusan dan pengebom. Kami telah menyergap beberapa perkemahan musuh, memutus akses teroris ke tempat perlindungan aman, serta menyita senjata dan perlengkapan, sehingga mengurangi kapabilitas bersenjata dan dukungan logistik mereka.

Untuk meningkatkan upaya melawan pembiayaan teroris, intelijen AFP juga menjadi anggota Kelompok Investigasi Keuangan Terorisme Bersama antarlembaga.

Untuk mendukung pendekatan seluruh masyarakat dari pemerintah, AFP bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam memperkuat proses perdamaian Mindanao untuk mengamankan komunitas Muslim dari kelompok teror. Proyek pengembangan komunitas melalui kerja sama dalam berbagi informasi dan intelijen, serta meningkatkan keyakinan dan mekanisme pembangunan kapasitas.

Intelijen AFP memperkuat kerja sama dalam berbagi informasi mengenai kekhawatiran keamanan bersama melalui konferensi pertukaran intelijen bilateral dan multilateral serta pertukaran analis-ke-analis dengan beberapa rekan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan juga negara non-ASEAN. Terobosan yang signifikan adalah peluncuran Pertukaran Intelijen Analis-ke-Analis Militer ASEAN yang diprakarsai oleh Filipina pada 2011.

Untuk meningkatkan kapabilitasnya, AFP mengadakan latihan bersama dengan rekan militer asingnya. AFP juga menerima pelatihan dan dukungan teknis, terutama dalam perang perkotaan, dari rekan militer asing kami.

Secara keseluruhan, upaya kontraterorisme negara ini mengikuti kerangka kerja pendekatan seluruh masyarakat, yang sasaran utamanya adalah memberantas penyebab ketidakpuasan dan kekecewaan yang dapat dieksploitasi oleh unsur radikal, memperbaiki kondisi sosial ekonomi dari sektor masyarakat yang paling rentan serta memajukan budaya pengertian dan perdamaian. □

Artikel ini diadaptasi dari presentasi yang disampaikan oleh Letnan Kolonel Dr. Zurkarnain Haron dari Angkatan Bersenjata Malaysia dalam Konferensi Kepala Intelijen Asia-Pasifik di Wellington, Selandia Baru pada September 2017. Cerita ini telah dipersingkat dan disunting agar sesuai dengan format *FORUM*.

UPAYA ADAPTIF

INDIA MEMPERBARUI UNDANG-UNDANG, PELATIHAN MILITER DAN STRATEGI PEMERINTAHNYA UNTUK MELAWAN ANCAMAN TEROR YANG TERUS BERKEMBANG

STAF *FORUM*

Dalam hal peringkat, mengalami kenaikan dalam daftar tempat yang paling ditargetkan oleh teroris merupakan penghargaan yang tidak ingin dienyam oleh negara mana pun.

Namun, India mendapati diri berada dalam posisi sulit tersebut saat Departemen Luar Negeri A.S. merilis laporan pada Juli 2017 yang menunjukkan bahwa India telah naik ke peringkat No. 3 — menggantikan Pakistan dan berada di bawah Irak dan Afganistan. Dari 11.072 serangan teror yang dihitung di seluruh dunia pada tahun 2016, 927 serangan terjadi di India, demikian menurut laporan tersebut. Itu merupakan peningkatan 16 persen dari jumlah serangan pada tahun 2015.

Kendati demikian, pemerintah India tidak puas dengan tren ini.

"India berkomitmen tegas terhadap upaya melawan terorisme global dan secara konsisten menyokong kebijakan toleransi nol terhadap terorisme dalam berbagai [forum] internasional," kata Menteri Negara Urusan Luar Negeri Dr. V.K. Singh, pensiunan jenderal bintang empat yang menjabat sebagai kepala staf angkatan darat ke-26, pada Juli 2017.

Meski korban jiwa semakin banyak akibat meningkatnya aktivitas teroris, India bekerja tanpa lelah untuk lebih membekali pemerintah, militer dan pihak berwenangnya dengan undang-undang, peralatan dan pelatihan untuk membalikkan tren ini.

Departemen Luar Negeri A.S. mencatat bahwa pada 2016, India berupaya meningkatkan pertukaran informasi penyaringan terorisme dan kerja sama penegakan hukum dalam kasus individual; bekerja sama dengan Bangladesh dalam prosedur untuk meningkatkan ekstradisi terduga yang terlibat dalam terorisme dan kejahatan terorganisir; dan melarang Yayasan Riset Islam milik ulama radikal Zakir Naik sebagai "organisasi yang melanggar hukum".

Juga pada 2016, Perdana Menteri Narendra Modi melakukan demonetisasi uang kertas 500 dan 1.000 rupee, menepati janji prapemilunya untuk menangani korupsi dan penghindaran pajak. Tindakan ini memiliki dampak tambahan yakni mendorong uang hitam keluar dari bayang-bayang dan memengaruhi aktivitas dan pendanaan teroris.

"Pemerintah India menggalakkan beberapa upaya melawan ekstremisme kekerasan, memberikan dukungan tak langsung pada upaya masyarakat sipil untuk melawan ekstremisme kekerasan, melanjutkan inisiatif untuk menyediakan 'pendidikan modern yang bermutu' di madrasah, serta mempertahankan program untuk melakukan rehabilitasi dan reintegrasi mantan teroris dan pemberontak ke dalam masyarakat utama" ungkap laporan Departemen Luar Negeri A.S. "Program tersebut menargetkan sektor masyarakat India yang tak puas yang telah menjadi sumber pemberontakan kekerasan."

Pejabat pemerintah India terus menyuarakan keprihatinan atas penggunaan media sosial dan internet untuk merekrut, meradikalisasi dan memprovokasi ketegangan antaragama, lansir laporan itu. Khususnya, para pejabat telah menyatakan keprihatinan tentang kemampuan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) untuk merekrut secara online, menyusul insiden ketika orang India diajak untuk bergabung atau mendukung kelompok itu. Pada Januari 2018, seorang pejabat militer India menyerukan pembatasan internet yang lebih ketat untuk melawan ISIS dan kelompok teroris lainnya di ranah digital.

"Memberlakukan beberapa pemeriksaan dan pembatasan di internet dan media sosial yang selalu dimanfaatkan organisasi teroris" perlu demi keselamatan dan keamanan, kata Kepala Angkatan Darat India Jenderal Bipin Rawat, demikian menurut laporan India.com. "Di negara demokratis, masyarakat tidak suka dengan hal ini, tetapi kita harus memutuskan apakah kita ingin lingkungan yang aman dan tenteram atau bersedia menerima pembatasan sementara, agar terorisme dapat ditangani."

Kelompok teror memiliki front politik dan militan, kata Rawat. Taktik kekuatan lembut mereka harus dilawan dengan kontrapesan dalam setiap langkah dan penyebaran pesan mereka dilarang dan ditarik bilamana memungkinkan.

Demi tujuan itu, raksasa media sosial seperti Facebook, YouTube, Twitter dan Microsoft mengumumkan pada Juni 2017 tentang pembentukan kelompok kerja global untuk memadukan upaya mereka guna menyingkirkan konten teroris dari platform mereka. Dengan demikian, terbentuklah Forum Internet Global untuk Melawan Terorisme (Global Internet Forum to Counter Terrorism - GIFCT). Perusahaan lainnya, seperti Instagram, LinkedIn dan Snapchat kini ikut berpartisipasi.

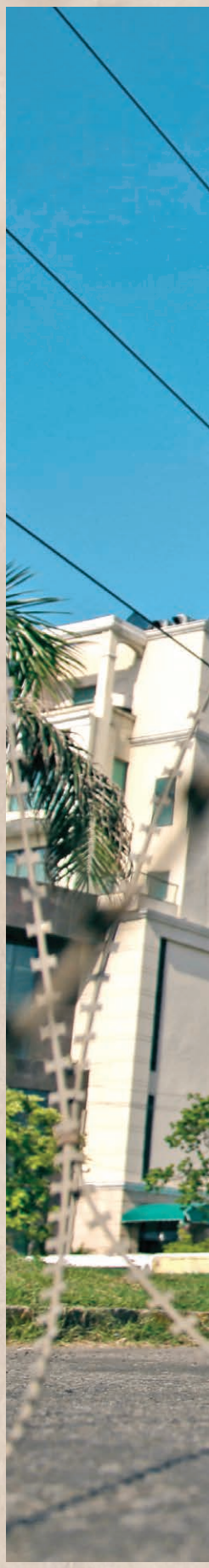

Tentara Angkatan Darat India berjaga di Panchkula, India.
THE ASSOCIATED PRESS

"Karya berbagi pengetahuan GIFCT telah tumbuh dengan pesat terutama karena perusahaan mengakui bahwa dalam melawan terorisme online, kita menghadapi banyak tantangan yang sama," kata konsorsium itu dalam pembaruan Desember 2017. "Meski perusahaan kami telah berbagi praktik terbaik seputar kontraterorisme selama beberapa tahun, dalam beberapa bulan terakhir GIFCT telah menyediakan struktur yang lebih resmi untuk mempercepat dan memperkuat karya ini."

Konsorsium itu melanjutkan, "Kami mengakui bahwa pekerjaan masih jauh dari selesai, namun kami yakin bahwa kami menuju arah yang benar. Kami akan terus memberikan pembaruan seiring kami menjalin kemitraan baru dan mengembangkan teknologi baru untuk menjawab tantangan global ini."

Rawat menekankan pentingnya kolaborasi semacam ini sebab medan pertempuran saat ini membentang di luar delineasi fisik.

"Kita harus mulai bersiap menghadapi jenis perang baru, yakni perang informasi dan siber," kata Rawat pada Januari 2018, demikian menurut surat kabar Pakistan *The News International*.

Menteri Dalam Negeri Rajnath Singh membenarkan perlunya menyesuaikan taktik baru untuk melawan ancaman teror yang terus berkembang. Pada Januari 2018, ia menyerukan dibentuknya sel antiteror khusus untuk difokuskan pada pelaku yang beraksi sendiri dan teroris "swakriya".

Peneliti Kementerian Dalam Negeri juga telah memulai proyek untuk mendokumentasi alasan di balik radikalisasi kaum muda dan cara melawan ekstremisme agama di India, demikian menurut laporan situs berita India Firstpost pada Januari 2018. Pihak berwenang menggambarkan program tersebut — yang diberi nama "Rad dan Derad" — sebagai "upaya langka" untuk memperoleh wawasan mengenai radikalisasi dan ekstremisme.

MENYESUAIKAN PRAKTIK TERBAIK

Pejabat India ingin meniru mekanisme multilapis terstruktur Singapura untuk melawan ancaman radikalisasi kaum muda dan ISIS.

"Untuk kondisi India, di antara berbagai program kontraradikalisasi yang dilakukan oleh berbagai negara, model Singapura, yang merupakan perpaduan antara langkah keamanan keras dan undang-undang yang tegas bersama dengan keterlibatan komunitas, adalah yang paling cocok, dan oleh karena itu kami mengembangkan sistem yang sesuai dengan situasi India," ujar seorang pejabat senior Kementerian Dalam Negeri yang tak disebut namanya pada Januari 2018, demikian menurut beberapa laporan berita.

Pejabat kementerian ingin memberlakukan prosedur operasi standar untuk menangani artikel radikal yang dipasang secara online. Atas permintaan kementerian, Biro Intelijen mempersiapkan sistem konseling tiga tingkat yang melibatkan keluarga, pemuka agama dan pakar untuk deradikalisasi kaum muda yang terdampak serta pihak lainnya, demikian laporan United News of India (UNI) pada Januari 2018.

"Semua unit aparat pemerintah dan seluruh spektrum komunitas Muslim akan diasosiasikan secara aktif dengan komunitas untuk konseling kaum muda yang terdampak," ungkap seorang sumber intelijen di kementerian yang tidak disebut namanya, demikian menurut UNI. "Dengan mekanisme pemantauan terkini untuk mengawasi pengguna internet yang aktif di berbagai situs web jihad, saat ini sedang dibentuk sebuah platform multibahasa berbasis komunitas yang terkoordinasi dengan baik yang tersedia sepanjang waktu di seluruh penjuru negeri untuk menyebarkan kontranarasi yang dirancang dengan sesuai."

Model Singapura juga mendefinisikan peran keluarga, guru dan tetangga dalam komunitas orang yang menjalani deradikalisasi.

Pemuka agama akan memainkan peran kunci dalam

KIRI: Tentara Angkatan Darat A.S. dan India mengikuti latihan pertempuran bersama.

Tentara Angkatan Darat India tiba di lokasi pertempuran senjata dengan terduga militan di Chadoora, di pinggiran Srinagar, India.

REUTERS

model India. Pemerintah berupaya merekrut pemimpin agama untuk menawarkan kontranarasi yang kredibel dan alternatif dari bergabung dengan organisasi teroris.

LEBIH DARI SEKADAR PELATIHAN DASAR

Cara tradisional memerangi musuh tetap penting. Namun, ancaman teroris yang terus berkembang berarti pelatihan militer juga harus berkembang.

Angkatan Darat India telah menggunakan kursus baru untuk rekrutan baru, untuk memberikan pelatihan kontraterorisme tambahan dan pelajaran tentang cara mengidentifikasi ancaman kejahatan siber.

"Modul pelatihan untuk rekrutan tersebut telah dikembangkan secara saksama untuk menjawab tantangan perang subkonvensional, yang pada dasarnya merupakan operasi konflik intensitas rendah, yang terdiri dari operasi antiteroris, antipemberontakan dan bila perlu operasi antinaxalite," kata Brigadir Govind Kalvad pada Desember 2017, demikian menurut surat kabar *The Indian Express*. (Naxalite adalah anggota Partai Komunis India, atau Maois.) Ia mengatakan Angkatan Darat tidak berpaling dari prinsip dasar pelatihan militer, namun hanya melakukan modernisasi seiring waktu.

"Setelah dasar-dasarnya dikuasai, tentara yang terlatih akan menjalani pelatihan ekstensif dalam menghadapi situasi subkonvensional," ujar Kalvad, demikian menurut *The Indian Express*. "Jadi, setelah pelatihan konvensional usai, tentara mengambil cuti, dan setelah masuk kembali, ia langsung ditugaskan pada suatu kamp untuk pelatihan tentang situasi perang subkonvensional. Jadi, saat meninggalkan kamp, ia benar-benar siap menghadapi segala situasi di Jammu dan Kashmir, Timur Laut atau dalam melawan Naxalite jika diperintah."

Lebih dari 70 tentara India tewas tiap tahun dalam operasi kontrapemberontakan dan kontrateroris, demikian laporan surat kabar *The Times of India* pada Desember 2017. Kalvad mengatakan rekrutan baru melakukan simulasi situasi yang lebih waktu-nyata selama pelatihan lanjutan untuk mengurangi kemungkinan korban jiwa.

Bagian dari pelatihan Angkatan Darat India kini termasuk 22 halangan di berbagai medan, termasuk hutan, demikian menurut *The Times of India*. Tentara beroperasi dalam kelompok yang terdiri dari 30 hingga 50 orang sementara ditempatkan dalam "situasi yang sangat tegang", ujar Kalvad.

Angkatan Darat juga telah menambah lebih banyak teknologi pada pelatihannya, dengan menggunakan perangkat elektronik untuk memeriksa keakuratan tembakan tentara alih-alih memeriksa secara fisik.

"Tantangan mendatang terus menuntut komitmen yang lebih besar dari Angkatan Darat India," kata Rawat pada Januari 2018, demikian menurut Indo-Asian News Service.

PEMIMPIN YANG TANGGUH

Amerika Serikat menganggap India sebagai "kekuatan terdepan" di Indo-Pasifik, sebab Strategi Keamanan Nasional A.S. terkini menempatkan India dalam peran yang lebih menonjol sebagai "mitra pertahanan utama".

"Persaingan geopolitik antara visi tatanan dunia yang bebas dan represif sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini, yang terbentang dari pesisir barat India hingga pantai barat Amerika Serikat, mewakili bagian dunia yang berpenduduk paling padat dengan perekonomian yang dinamis," lansir Strategi Keamanan Nasional A.S.

Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) juga menantikan India untuk meningkatkan perannya sebagai mitra penstabil keamanan di Indo-Pasifik. India telah memperlihatkan keinginannya untuk mengemban peran tersebut.

Dalam pengepungan Marawi 2017 di Filipina, India menyumbang 7,25 miliar rupiah (setengah juta dolar A.S.) bagi kampanye kontraterorisme Filipina, demikian menurut surat kabar *The Manila Times*. Itu membuat bantuan dari negara Asia lainnya, termasuk Tiongkok, yang menyumbang 4,35 miliar rupiah (300 ribu dolar A.S.) tampak kecil, demikian lapor *The Manila Times*.

Memperkuat hubungan keamanan dan kontraterorisme terbukti merupakan topik penting dalam Konferensi Tingkat Tinggi India-ASEAN pada Januari 2018.

"Dalam semua interaksi kami … topik berulang yang kami tangkap adalah keinginan dari semua negara ASEAN akan keberadaan India yang lebih besar, kerja sama yang lebih erat [dengan] India, dan integrasi yang lebih mantap dari segi ekonomi, politik dan dalam hal kontak orang-ke-orang," ungkap Sekretaris (Timur) Preeti Saran dari Kementerian Luar Negeri pada Januari 2018, demikian menurut Firstpost.

Pemimpin di berbagai industri telah memperhatikan status India yang semakin bertumbuh.

"India berada di tengah-tengah panggung global," ujar Chandrajit Banerjee, direktur jenderal, Konfederasi Industri India, sebuah asosiasi bisnis nirlaba. "Ekspektasinya sangat besar. Dunia menghargai upayanya dan ingin ikut terlibat." □

ILUSTRASI *FORUM*

Dari LAYAR KOMPUTER *menuju* MEDAN PERTEMPURAN

Memahami penggunaan ruang digital oleh teroris untuk memikat kaum muda

THOMAS KORUTH SAMUEL | FOTO DARI REUTERS

Ada banyak perdebatan tentang apa yang termasuk sebagai terorisme dan siapa itu teroris. Akan tetapi, hampir tak diragukan lagi bahwa kaum muda memainkan peran yang signifikan dalam arena ini, dan strategi terstruktur yang disengaja telah dirancang oleh teroris untuk meradikalisasi dan merekrut kaum muda untuk melakukan tindakan kekerasan. Ada banyak keuntungan menjadikan kaum muda sebagai target untuk bergabung dengan kelompok teroris. Kelompok teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah telah menunjukkan kapabilitas dan kapasitas yang semakin tinggi dalam merekrut mereka. Hal ini, dibarengi dengan eksploitasi teknologi yang semakin meningkat seperti internet, telah memberi teroris jangkauan yang jauh dan luas.

Pada tahun 1951, Eric Hoffer, seorang dosen dan penulis ternama yang sepenuhnya autodidak, menerbitkan *The True Believer*, berlandaskan pengamatannya tentang maraknya fasisme, Nazisme dan komunisme sebagai reaksi atas Depresi Besar. Ia berdalil bahwa bagi "true believer" (pemercaya sejati) — seseorang yang begitu berkomitmen terhadap suatu tujuan hingga ia bersedia mati deminya tanpa berpikir — frustrasi atas kehidupanlah yang membuat bergabung dengan tujuan tersebut memberikan makna bagi keberadaan pemercaya itu sendiri. Wajar saja, semakin besar frustrasi yang dirasakan orang-orang tersebut, semakin tertarik dan rentan mereka terhadap solusi revolusioner ekstrem bagi masalah mereka. Pengamatan ini, yang dibuat lebih dari setengah abad lalu, menggambarkan dinamika dan hubungan antara kaum muda dan terorisme secara menyedihkan namun akurat.

Definisi "kaum muda" berbeda-beda di antara negara. PBB, untuk tujuan statistik, mendefinisikan "kaum muda" sebagai orang yang berusia antara 15 hingga 24 tahun. Bagaimanapun juga, yang jelas adalah bahwa organisasi teroris merekrut dan memengaruhi kaum muda untuk melaksanakan tindakan keji mereka atas nama Tuhan dan ideologi sesat. Sayangnya, banyak kaum muda, terlepas dari suku, agama, latar belakang pendidikan atau status ekonomi, telah menjadi mangsa

Anak-anak berkumpul di pusat permainan internet di ibu kota Thimphu, Bhutan, pada Desember 2017.

retorika yang dipropagandakan oleh kelompok tersebut.

Statistik yang ada suram. Dalam buku Peter Singer, *Children at War*, 300.000 anak, baik laki-laki maupun perempuan, di bawah usia 18 tahun merupakan pejuang yang bertempur dalam nyaris 75 persen dari konflik dunia. Sungguh menakutkan bahwa 80 persen dari konflik yang di dalamnya terdapat anak-anak, mengikutsertakan pejuang berusia di bawah 15 tahun, dan sekitar 42 persen dari organisasi bersenjata di dunia (157 dari 366) menggunakan tentara anak-anak.

Tanpa keahlian di luar pejuang, integrasi yang minim dengan masyarakat dan masa lalu yang bergolak dengan berbagai macam permasalahan emosional dan psikologis, seandainya anak-anak ini hidup hingga mencapai masa muda, seperti apa masa depan mereka nantinya?

Serangan Mumbai, India pada tahun 2008 yang menewaskan 165 warga sipil dan personel keamanan merupakan rangkaian 10 serangan terkoordinasi yang dilakukan oleh 10 orang. Benang merah yang mempersatukan mereka? Mereka semua masih muda. Selain teroris tertua, Nazir/Abu Umer, yang berusia 28 tahun, usia rata-rata kesembilan teroris lainnya hanya 23 tahun saja. Pemimpinnya, Ismail Khan, berusia 25 tahun.

Di Filipina, keterlibatan kaum muda dalam terorisme jelas terlihat dalam kasus Kelompok Abu Sayyaf (ASG). ASG, dicantumkan oleh Amerika Serikat sebagai organisasi teroris asing, mengupayakan negara Islam terpisah bagi minoritas Muslim negara itu. Abdurajak Janjalani, pendiri ASG, baru berusia 20-an tahun saat dipengaruhi untuk bergabung dengan aktivitas ekstremis dan 26 tahun saat membentuk ASG. Saat ia tewas dalam pertempuran dengan polisi pada 1998, adik laki-lakinya, Khadaffy Janjalani, berusia 22 tahun saat mengambil alih sebagai pemimpin atau emir baru ASG. Pada tahun 2009, ASG dipimpin oleh Yasser Igasan, yang berusia 21 tahun saat bergabung dengan gerakan tersebut. Kelompok lain di Filipna, Gerakan Rajah Solaiman (RSM), berasal dari sebuah sel guru dan pelajar militan di sebuah sekolah agama di Luzon. Kelompok itu didirikan oleh Ahmad Santos, yang teradikalisasi saat berusia 21 tahun. RSM diduga telah melakukan pengeboman Superferry 14, sebuah serangan teroris maritim pada Februari 2004. Hal signifikan untuk dicatat adalah bahwa terduga pelaku, Redento Cain Dellosa, berusia pertengahan 20-an.

Di Irak, kelompok pemberontak telah dituduh membayar remaja antara 725 ribu rupiah (50 dolar A.S.) hingga 1,45 juta rupiah (100 dolar A.S.) untuk memasang bom rakitan, menembakkan mortir atau senapan mesin ke arah tentara koalisi. Meski muda, remaja-remaja tersebut terbukti tidak hanya merupakan ancaman yang berbahaya namun juga dilema keamanan bagi pasukan koalisi.

Kenyataannya adalah selain memiliki kekuatan keras yang kuat, kelompok teroris juga memiliki kekuatan lembut yang besar, dan mereka telah terbukti lihai dalam menggunakannya. Dalam masa penuh gejolak, kelompok-kelompok tersebut menarik kaum muda dengan mengeksploitasi kerentanan mereka dan memberikan rasa identitas, rasa memiliki dan rasa kekompakan. Seiring waktu, di lingkungan yang bermasalah, kaum muda ini mulai mendefinisikan identitas mereka dengan identitas kelompok tersebut dan perjuangannya.

Mengapa terorisme?

Ketika peluangnya kecil untuk keluar dari siklus kemiskinan, ketidakadilan, nyata ataupun yang dirasakan, serta keputusasaan, timbul toleransi yang lebih besar terhadap kekerasan. Kelompok teroris telah memanfaatkan keadaan ini demi keuntungan mereka dengan mengidentifikasi dan menawari kaum muda apa yang tidak mereka miliki atau bahkan menawari mereka jalan keluar dari situasi mereka dengan menjadi martir. Dalam studi terhadap sekitar 600 tahanan Teluk Guantanamo yang berusia antara 18 hingga 25 tahun, banyak dari mereka yang termotivasi oleh pengangguran, terutama buruh terampil dan semiterampil, dan terorisme dipandang sebagai "pekerjaan alternatif" yang layak.

Hal ini, dibarengi dengan strategi teroris untuk memangsa kaum muda rentan, telah membuahkan hasil luar biasa di komunitas yang di dalamnya terdapat ketidakadilan yang nyata ataupun yang dirasakan. Oleh karena itu, kelompok tersebut tidak dianggap sebagai pelaku kekerasan melainkan sebagai pejuang yang bertarung melawan musuh tirani. Dengan latar belakang ini, mungkin dapat agak dimengerti mengapa kaum muda yang bergabung dengan kelompok semacam ini dianggap sebagai pahlawan dan pemberani — sebuah narasi yang secara aktif dibangun, dipropagandakan dan disebarkan oleh kelompok teroris. Yang juga signifikan untuk dicatat adalah bahwa kemiskinan dan keputusasaan bukan satu-satunya faktor yang menarik kaum muda ke dalam kelompok ekstremis. Keanggotaan memberikan rasa identitas, gengsi atau kebanggaan, penerimaan, tanggung jawab, penyaluran frustrasi dan kegembiraan,

yang menjadi daya tarik bagi semua kaum muda, terlepas dari status ekonomi atau sosial.

Mengapa kaum muda?

Kaum muda umumnya tidak memiliki catatan polisi sebelumnya sehingga memberi kelompok teroris kebebasan operasional yang lebih besar karena keterlibatan kaum muda mengurangi kemungkinan ditahannya pemimpin teroris yang lebih senior. Kaum muda tersebut juga memiliki keuntungan tambahan yakni meredam kecurigaan dari pihak penegak hukum dan keamanan. Mantan Direktur Central Intelligence Agency (CIA) Michael Hayden mengamati bahwa Al-Qaeda secara aktif merekrut kaum muda Barat untuk potensi operasi terhadap target Barat karena mereka akrab dengan bahasa, budaya dan penampilan, serta karena mereka "tidak akan menarik perhatian apa pun dari Anda jika berdiri di sebelah Anda dalam antrean di bandara". Al-Qaeda, yang di masa lalu menyebut anak-anak sebagai "generasi Mujahidin baru" (pejuang gerilya), secara agresif memanfaatkan taktik ini saat melakukan serangan bunuh diri di Irak, Afganistan, dan Pakistan sebab kaum muda tidak langsung dicurigai sebagai pelaku bom bunuh diri.

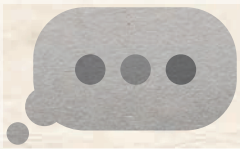

Kaum muda juga, kadang-kadang, diberikan tugas yang lebih berbahaya dengan asumsi bahwa jika tertangkap, mereka akan menerima hukuman yang lebih ringan dikarenakan usia mereka yang lebih muda. Dewasa muda juga dapat dijadikan target karena keahlian mereka, seperti dalam kasus Jemaah Islamiyah yang merekrut mahasiswa untuk memastikan kader pemimpin yang berpendidikan dan cakap secara teknis untuk serangan teroris.

Kaum muda juga penting dalam memastikan keberlanjutan. Euskadi Ta Askatasuna, gerakan separatis Basque, telah mencari anggota baru dari demografik yang lebih muda. Kemampuannya untuk meremajakan diri seiring waktu terutama berkat organisasi kaum mudanya, Jarrai-Haika-Segi.

Di mana mereka menemukan rekrutan?

Penjara, ironisnya, memberikan lingkungan kontribusi bagi perekrutan teroris. Penjara konon merupakan tempat berkembang biaknya radikalisasi. Penjara merupakan tempat yang rentan, yang, akibat lingkungannya, menghasilkan pencari identitas, pencari perlindungan dan pemberontak dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan segala lingkungan lainnya. Kriminolog Amerika, Harvey Kushner, berargumentasi bahwa penjara di Barat merupakan salah satu sarang perekrutan utama bagi Al-Qaeda, sementara beberapa pihak menyatakan bahwa praktik yang relatif longgar di penjara Barat telah dieksploitasi dengan baik oleh Al-Qaeda. Persoalan menjadi semakin buruk di penjara ketika teroris tidak dipisahkan dari populasi remaja.

Oleh karena itu, tahanan teror yang tidak dipisahkan secara fisik dari kriminal lain dan pelaku pelanggaran kaum muda telah menggunakan waktu serta ruang fisik dan ideologi yang diberikan untuk merekrut dan mengindoktrinasi kaum muda ke dalam kelompok mereka. Kaum muda ini rentan, dan struktur dukungan keluarga dan teman sering digantikan oleh kelompok tersebut.

Institusi keagamaan, yang mengajarkan penafsiran agama yang sesat dan salah tafsir, memiliki potensi untuk merangkul hati, pikiran dan imajinasi kaum muda. Dalam kebanyakan kasus, perekrut menargetkan kaum muda yang lebih menjanjikan dan menarik mereka ke dalam tatanan yang lebih kecil untuk mengindoktrinasi mereka tanpa membangkitkan kecurigaan dari anggota moderat dalam kelompok tersebut. Disertai dengan ketidakadilan aktual yang terjadi di seluruh dunia, para "pelayan Tuhan" ini tanpa perasaan mengeksplotasi pikiran dan hati kaum muda agar berpikir bahwa satu-satunya alternatif yang tersisa adalah kekerasan. Memiliki keuntungan "Tuhan" di sisi mereka, kaum muda ini dimanipulasi agar percaya bahwa mereka berjuang demi tujuan mulia dan berharga, dengan jaminan kemenangan.

Universitas dan lembaga pendidikan tinggi juga telah diubah menjadi tempat perekrutan bagi teroris. Dosen dan mahasiswa asing dari negara-negara di zona konflik menggunakan sesi kuliah untuk secara gamblang menggambarkan kekejian dan ketidakadilan yang terjadi di negara mereka masing-masing dan seiring waktu menempa mahasiswa agar berpikir bahwa "propaganda dengan perbuatan" merupakan satu-satunya jalan yang tersisa. Masalah ini diperparah oleh mahasiswa lokal yang kuliah di luar negeri namun malah terindoktrinasi dan teradikalisasi. Mereka bukan hanya terinfeksi oleh ide tersebut namun juga mengimpor ide ini ke dalam lingkungan lokal saat mereka pulang.

Mengapa menggunakan internet untuk menjangkau prospek?

Internet telah menjadi alat yang berguna dalam menjangkau kaum muda dan membantu teroris mengatasi kekurangan mereka untuk mendapatkan dan menarik rekrutan muda baru. Pakar terorisme Bruce Hoffman berkata, "Nyaris setiap kelompok teroris di dunia saat ini memiliki situs web internet sendiri dan, dalam banyak hal, beberapa situs dalam berbagai bahasa dengan pesan yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan audiens tertentu". Sementara di masa lalu, indoktrinasi, perekrutan dan pelatihan teroris sangat mengandalkan pertemuan fisik antara rekrutan dan perekrut yang membutuhkan waktu, koordinasi dan perjalanan, internet telah memintas hal ini dengan menyediakan koneksi yang cepat, mudah, jarak jauh, dan anonim. Peran internet sebagai pemercepat radikalisasi telah secara signifikan mengubah cara teroris beroperasi,

Peran internet sebagai pemercepat radikalisasi telah secara signifikan mengubah cara teroris beroperasi, sebab memberi mereka peluang dan cakupan tiada tara untuk mengembangkan dan memperkuat modus operandi mereka.

sebab internet memberi mereka peluang dan cakupan tiada tara untuk mengembangkan dan memperkuat modus operandi mereka.

Ini dapat terjadi karena kaum muda dan internet terjalin begitu erat. Menurut statistik, penggunaan internet di kalangan kaum muda telah meningkat drastis dan penggunaannya telah berkembang dari proses pasif mencari informasi yang ditujukan pada individu (dengan istilah Web 1.0) menjadi lingkungan aktif yang terhubung secara sosial dengan keterlibatan pengguna tempat kaum muda berinteraksi, berdiskusi, berkreasi dan menyampaikan konten (disebut sebagai Web 2.0). Selain situs web, fasilitas lain di internet, mulai dari email, ruang chatting, e-group, forum, buletin pesan virtual, semua fasilitas yang sering dikunjungi dan digunakan oleh kaum muda, juga semakin banyak dimanfaatkan oleh teroris sebagai kamp pelatihan virtual, menyediakan forum online bagi indoktrinasi dan distribusi panduan, instruksi dan data teroris.

Hal yang juga menggelisahkan adalah bahwa kecenderungan alami generasi muda saat ini yang lebih menggandrungi internet telah secara akurat diantisipasi dan dieksploitasi oleh kelompok teroris. Bagaimana lagi kita menjelaskan Taliban, yang dahulu menghukum orang yang memiliki televisi namun kemudian mulai memperbarui situs webnya beberapa kali sehari? Perubahan drastis ini terjadi karena teroris memahami kekuatan dan potensi internet.

Kemampuan teroris untuk memanfaatkan internet secara kreatif telah memungkinkan mereka untuk meningkatkan jangkauan secara berlipat ganda, beralih dari ruang fisik ke ruang siber. Internet juga telah menunjukkan potensi yang sangat besar untuk menjadi titik pertemuan utama bagi teroris di seluruh dunia. Situs jejaring sosial telah menggantikan medan pertempuran sebagai tempat untuk terhubung dan berjuang demi tujuan bersama.

Remaja yang berjuang bersama militan yang terkait dengan Negara Islam di Kota Marawi berbicara kepada Reuters dalam wawancara di Filipina selatan pada Juli 2017 setelah melarikan diri dari pertempuran.

Mengingat perkembangan ini, analis mungkin dapat memahami bagaimana kaum muda diradikalisasi melalui internet tanpa harus bertemu secara fisik dengan rekan teroris lainnya.

Sementara di masa lalu, teroris menggunakan internet sebagai alat untuk menyebarkan retorika kebencian mereka, kini internet telah memperluas potensinya antara lain untuk mengidentifikasi, membina dan mengembangkan rekrutan mentah menjadi teroris sepenuhnya. Oleh karena itu, radikalisasi internet adalah sarana radikalisasi diri. "Proses layar komputer menuju medan pertempuran" ini menghadirkan ancaman berat dan membutuhkan peralihan paradigma dalam upaya kita untuk melawan terorisme.

Medan Pertempuran Berikutnya

Kemampuan teroris untuk mengidentifikasi, mengindoktrinasi, merekrut dan menggunakan kaum muda untuk kekerasan politik telah berkembang dengan pesat. Teroris juga telah menunjukkan sensitivitas yang sangat besar dalam merancang pesan bagi kaum muda dan kreativitas dalam mengeksploitasi media teknologi dalam menjangkau mereka.

Di arena ini, pihak berwenang berjuang melawan dan meredam momentum yang telah diperoleh teroris dalam memenangkan kaum muda. Sementara teroris mengembangkan strategi untuk menargetkan dan menarik kaum muda, upaya kontraterorisme sering terus berfokus pada kekuatan keras sebagai pendekatan utama dalam menangani permasalahan ini. Mengingat skenario ini, wajib bagi pihak berwenang untuk memahami dinamika antara kaum muda dan terorisme. Bidang yang memerlukan penelitian dan perhatian di antaranya adalah profil kaum muda yang telah bergabung dengan kelompok teroris dan alasan mereka melakukannya, proses radikalisasi dan indoktrinasi yang digunakan oleh teroris dalam merekrut kaum muda, dan tinjauan atas program yang ada dalam melawan kerentanan kaum muda terhadap ekstremisme dan terorisme. Hanya dengan memahami kenyataan di lapangan dan mengambil langkah yang cerdik, preventif dan proaktif, barulah negara dan pemerintah dapat mengatasi tantangan ini.

Medan pertempuran berikutnya dalam perjuangan melawan terorisme mungkin tidak berlangsung di atas pesawat fisik namun di ranah mental dan emosional kaum muda. Kecuali pemerintah memenangkan hati dan pikiran kaum muda ini, pejabat tidak akan mendapatkan dukungan kaum muda, dan mereka mungkin mendapati diri menghadapi kaum muda sebagai lawan di masa mendatang. □

KEMBALINYA PEJUANG ASING

MALAYSIA MENGGUNAKAN STRATEGI KONTRATERORISME MULTIFASET UNTUK MEREDAM ANCAMAN

STAF *FORUM*

Pada Januari 2016, militan yang terkait dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membunuh empat warga sipil dalam serangan senjata api dan bom di dekat sebuah terminal bus di Jakarta, Indonesia. Tak lama berselang, ISIS menyatakan bertanggung jawab atas serangan granat di kelab malam dekat Kuala Lumpur, mencederai delapan orang dan menandai serangan terkait ISIS pertama yang menghantam Malaysia. Lalu pada tahun 2017, militan yang terinspirasi oleh ISIS menguasai kota Marawi di Filipina selatan selama lebih dari lima bulan. Ratusan orang tewas, dan ketakutan menjadi kenyataan yakni ISIS mencoba menyebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara saat kelompok tersebut didesak keluar dari Suriah dan Irak.

Dalam beberapa tahun terakhir, ancaman serangan di kawasan Indo-Pasifik oleh ISIS dan pejuang asing terkait yang kembali dari Suriah dan Irak telah menjadi kenyataan. Namun, sejak kemunculan ISIS, Malaysia telah menerapkan langkah kontraterorisme yang telah terbukti sangat sukses menahan ancaman tersebut di sana. Hingga Desember 2017, pihak berwenang Malaysia telah menggagalkan 19 rencana besar, termasuk serangan tempat hiburan malam yang gagal di Kuala Lumpur, dan menahan lebih dari 340 terduga teror sejak 2013. Dari melakukan empat penahanan pada 2013, pihak berwenang menahan lebih dari 100 terduga teror pada 2016 dan 2017. Selain itu, pengadilan Malaysia telah mencapai tingkat hukuman tertinggi di antara negara-negara untuk pidana terkait teror, menghukum dan memidana lebih dari 100 orang dalam empat tahun terakhir.

Bagaimanapun juga, tenaga profesional polisi dan militer yang terlibat dalam melawan penyebaran terorisme harus tetap waspada, kata para pakar. Kekalahan ISIS dalam skala besar di Marawi, misalnya, dapat menyebabkan gelombang lain pejuang asing bermigrasi ke negara-negara lain di Indo-Pasifik dari Filipina, sebagian analis memperingatkan. Ancaman terhadap Malaysia tetap tinggi, kata mereka.

Untuk Malaysia, "Saya menempatkan Negara Islam sebagai ancaman No. 1 [untuk tahun 2018] sebab ideologinya telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Meski tidak lagi memiliki wilayah apa pun, mereka masih menerima dukungan yang kuat dan memiliki banyak simpatisan," kata Ayob Khan Mydin Pitchay, kepala divisi kontraterorisme kepolisian Malaysia, kepada Channel NewsAsia pada akhir Desember 2017. "Marawi di Filipina adalah ancaman terbesar kedua karena IS sedang memperluas kekuatannya ke kawasan Asia Tenggara. Orang-orang bergabung dengan mereka (kelompok pro-ISIS) di Filipina karena lokasinya lebih dekat dan lebih mudah diakses dibandingkan Suriah," ujarnya.

Pihak berwenang telah mengonfirmasi bahwa lebih dari 50 orang Malaysia bergabung dengan ISIS di Suriah, demikian menurut Ayob Khan, dan jumlah

Anggota pasukan operasi khusus Malaysia dan unit taktis kontraterorisme elit, yang dikenal sebagai VAT 69, ikut ambil bagian dalam perayaan Hari Kemerdekaan Malaysia ke-60 di Kuala Lumpur. AFP/GETTY IMAGES

sesungguhnya bisa jauh lebih tinggi. Di Suriah, ISIS membentuk unit khusus yang disebut Katibah Nusantara yang terdiri dari orang-orang Indonesia dan Malaysia yang pindah ke kawasan tersebut. Pihak berwenang memperkirakan bahwa setidaknya 20 orang Malaysia tewas bertempur di Suriah, termasuk sembilan pelaku bom bunuh diri.

Sementara itu, setidaknya lima orang Malaysia pergi ke Mindanao untuk bergabung dengan kelompok teror hingga akhir 2017, ujar Ayob Khan kepada Channel NewsAsia. Sebelum tewas dalam pertempuran senjata dengan Angkatan Bersenjata Tentara Filipina, mantan dosen universitas Malaysia yang bernama Mahmud Ahmad membantu merencanakan dan mendanai pengepungan Marawi, menghimpun lebih dari 7,25 miliar rupiah (500 ribu dolar A.S.).

ISIS "mungkin telah kehilangan penyalur yang sangat berharga di Mindanao dengan laporan kematian Mahmud," kata Rommel Banlaoi, pakar terorisme yang mengepalai Institut Filipina untuk Riset Perdamaian, Kekerasan dan Terorisme, kepada surat kabar *The New York Times* pada Oktober 2017. "Kematiannya bisa sangat memengaruhi pembiayaan terorisme di kawasan itu. Namun, ancaman serangan dari kelompok teror lain tetap mengintai. Ini belum berakhir."

Orang-orang Malaysia terus pergi ke Mindanao. Selama paruh pertama Desember 2017, polisi Malaysia menahan 16 pria yang ingin bergabung dengan faksi pro-ISIS dari Kelompok Abu Sayyaf, ujar Ayob Khan.

Tentara menjaga kawasan belanja utama di Kuala Lumpur setelah Australia memperingatkan bahwa teroris mungkin sedang merencanakan serangan.
THE ASSOCIATED PRESS

ANCAMAN ONLINE YANG TERUS BERLANJUT

Selain itu, upaya perekrutan online ISIS terus berlangsung, sebagian di antaranya telah bekerja di Malaysia. Misalnya, ISIS telah mendistribusikan berbagai video dalam bahasa Melayu melalui pusat media Al-Hayat miliknya dengan harapan merekrut orang Malaysia untuk melakukan serangan di Malaysia. ISIS telah menggunakan rute media sosial lainnya, termasuk aplikasi olah pesan terenkripsi untuk meradikalisasi orang Malaysia.

"Meski konsep kekhalifahan telah lama sirna, IS saat ini sedang mengeksploitasi media sosial untuk merekrut, menyebarkan ideologi dan menghasut anggota baru untuk melancarkan serangan di negara mereka masing-masing," kata Ayob Khan kepada Bernama, agensi berita pemerintah Malaysia, sebagaimana terbukti dengan penahanan pada Oktober 2017 atas tiga anggota ISIS di Kelantan yang diduga merencanakan serangan di Better Beer Festival 2017 dan target lainnya di Klang Valley dengan bom rakitan. "Mereka dipengaruhi oleh ideologi tersebut kemudian belajar membuat bom melalui situs web IS," ujarnya.

"Ideologi IS kini semakin aktif tanpa perlu pergi ke Suriah dan tanpa harus merekrut orang secara fisik lagi," katanya kepada Bernama.

Untuk melawan ISIS secara online, Malaysia membantu meluncurkan inisiatif regional pada 2016 yang bernama Pusat Kontrapesan Digital. Ini akan membantu menghentikan upaya penjangkauan dan perekrutan oleh ISIS serta kelompok militan lainnya di kawasan ini, kata Perdana Menteri Malaysia saat itu Najib Razak dalam pidato di konferensi Asosiasi Polisi Negara-Negara Asia Tenggara pada Juli 2016 di Kuala Lumpur, demikian menurut themalaymailonline.

"Sangat penting bagi pusat ini untuk memanfaatkan studi yang mengilustrasikan mengapa sama sekali tidak ada yang 'Islam' dengan IS yang secara memalukan menyatakan [diri] demikian," ujarnya. "Juga sangat penting bagi semua pihak berwenang — mufti, komisi media, kaum muda kita yang mahir teknologi yang mana media sosial merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka — memastikan bahwa pesan yang disampaikan pusat tersebut solid, persuasif, dan nyata."

Para pakar menyepakati bahwa karena ancaman online melampaui batas geografis, berbagi informasi kini semakin penting. Ayob Khan mengatakan pemerintah Malaysia dan Kepolisian Kerajaan Malaysia bekerja untuk meningkatkan berbagi informasi dengan banyak negara lainnya agar pihak berwenang dapat memantau, menahan dan mengembalikan pejuang asing ke negara asal mereka, demikian menurut laporan Januari 2018 oleh

themalaymailonline.com. "Kita perlu berbagi intelijen. Jika tidak, bagaimana kita bisa mendeteksi segala terduga teroris?" ia bertanya.

"Kami khawatir karena jika gagal memperoleh intelijen, kami pasti tidak bisa mendeteksi dan mengalahkan serangan IS," ungkap Ayob Khan kepada Bernama.

PENDEKATAN INOVATIF

Malaysia telah terbukti sebagai perintis dalam menerapkan langkah kontraterorisme. Negara ini, lama berada di garis depan kontraterorisme, telah menganut pendekatan multifaset yang memanfaatkan beragam taktik.

Malaysia sudah lama menyatakan dukungan bahwa menangani terorisme membutuhkan pendekatan seluruh masyarakat yang mengupayakan lebih dari sekadar solusi militer dan polisi untuk menuntaskan ancaman. Sebelum munculnya ISIS, misalnya, Malaysia telah menerapkan pendekatan inovatif untuk melakukan deradikalisasi individu agar dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Programnya, yang dijalankan oleh kementerian dalam negeri dan pendidikan bersama dengan otoritas penjara dan lembaga keagamaan, termasuk salah satu yang paling sukses, demikian menurut statistik yang ada. Antara tahun 2001 dan 2012, Malaysia menangani 229 terduga teroris dalam programnya, dan semenjak itu tujuh di antaranya diketahui telah terlibat dalam aktivitas teroris. Pejabat Malaysia berencana mengikutsertakan orang Malaysia yang diradikalisasi oleh ISIS dalam program serupa dengan program yang membantu warga yang diradikalisasi oleh Jemaah Islamiyah.

Program pendidikan dan kampanye informasi publik mungkin juga membantu menghentikan agar masyarakat tidak teradikalisasi, demikian saran beberapa pakar. "Kita perlu upaya oleh otoritas keagamaan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesalahan penafsiran, kesalahan pengutipan ayat-ayat Al-Quran tertentu," ujar Ayob Khan kepada situs web FreeMalaysiaToday. Ia mengatakan sekolah mungkin perlu menyertakan modul dalam kurikulum mereka untuk mengatasi bahaya ekstremisme.

Demikian pula, bahkan sebelum ISIS muncul pada 2014, para pembuat undang-undang Malaysia telah mengesahkan peraturan antiteror yang diperbarui di bawah Undang-Undang Pelanggaran Keamanan dan Langkah Khusus (SOSMA). Undang-undang tersebut menambahkan ketentuan untuk pelanggaran dan pidana terkait terorisme pada hukum pidana negara ini. Misalnya, SOSMA memidana tindakan yang mempromosikan teroris, membantu teroris dan membiayai terorisme serta menerapkan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati dalam beberapa kasus, bagi mereka yang dihukum atas pelanggaran tersebut.

Lalu pada tahun 2015, Malaysia memberlakukan peraturan tambahan untuk memberi polisi wewenang yang lebih besar untuk menangkap dan menahan terduga teroris. Undang-undang tersebut mencakup Undang-Undang Pencegahan Terorisme dan Undang-Undang Langkah Khusus Melawan Terorisme di Negara Asing. Selain itu, Malaysia bergabung dengan Satuan Tugas Aksi Keuangan internasional pada tahun 2016 untuk membantu memberantas pembiayaan global kelompok teroris.

Malaysia juga bekerja sama dengan Australia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk melumpuhkan pembiayaan ISIS dan kelompok teror lainnya. Disebut sebagai Kelompok Kerja Kontra Pembiayaan Terorisme Asia Tenggara, aliansi ini akan "secara langsung menargetkan dan memutus tumpuan pendanaan kelompok teroris" dengan memblokir mereka dari sistem keuangan internasional dan sumber pendanaan lainnya, kata Menteri Kehakiman Australia Michael Keenan di Kuala Lumpur pada November 2017 dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kontra Pembiayaan Terorisme ketiga, lansir surat kabar *The Straits Times*. Menteri Dalam Negeri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi mengatakan bahwa "untuk menghentikan jaringan teror secara efektif, semua bentuk pembiayaannya harus diputus," *The Straits Times* melaporkan.

Malaysia juga telah meningkatkan kapasitas penegakan hukum terhadap teror dalam beberapa tahun terakhir. Pada Oktober 2016 Perdana Menteri Malaysia saat itu Najib Razak membentuk Pasukan Operasi Khusus Nasional. Unit ini mengintegrasikan personel dari Angkatan Bersenjata, kepolisian dan lembaga penegakan hukum maritim Malaysia untuk memberikan tanggapan yang terkoordinasi atas segala serangan teror. Lalu pada Juli 2017, Kepolisian Kerajaan Malaysia mengumumkan rencana untuk meluncurkan departemen kontraterorisme federal baru, demikian menurut *The Straits Times*. Departemen ini akan diisi dengan 500 petugas atau lebih dari dua kali lipat dari 200 petugas yang ditarik dari berbagai pasukan negara untuk mengisi divisi kontraterorisme yang ada saat ini.

"Pembentukan departemen baru ini tepat waktu, terutama saat ancaman teror semakin meningkat di kawasan ini. Negara membutuhkan lebih banyak personel terlatih untuk mengamankan Malaysia dari radikalisme dan ekstremisme, termasuk perang terhadap kelompok Negara Islam," kata seorang sumber kepada *The Straits Times*.

Malaysia juga mendukung berbagai institusi di dalam batasnya untuk meredam ancaman tersebut, termasuk Pusat Perdamaian Internasional Raja Salman dan Pusat Kontraterorisme Regional Asia Tenggara.

Pendekatan Malaysia yang menyeluruh dalam melawan terorisme menjadi model bagi kawasan ini untuk membantu mengendalikan ISIS. Undang-undang Malaysia yang tegas, upaya berbagi intelijen dan penegakan hukum yang ketat dipadukan dengan kontrapesan online, program pendidikan dan deradikalisasi yang lebih baik telah ditujukan untuk mengatasi terorisme dari segala sisi dan memungkinkan pihak berwenang untuk sukses memberantas aktivitas tersebut. □

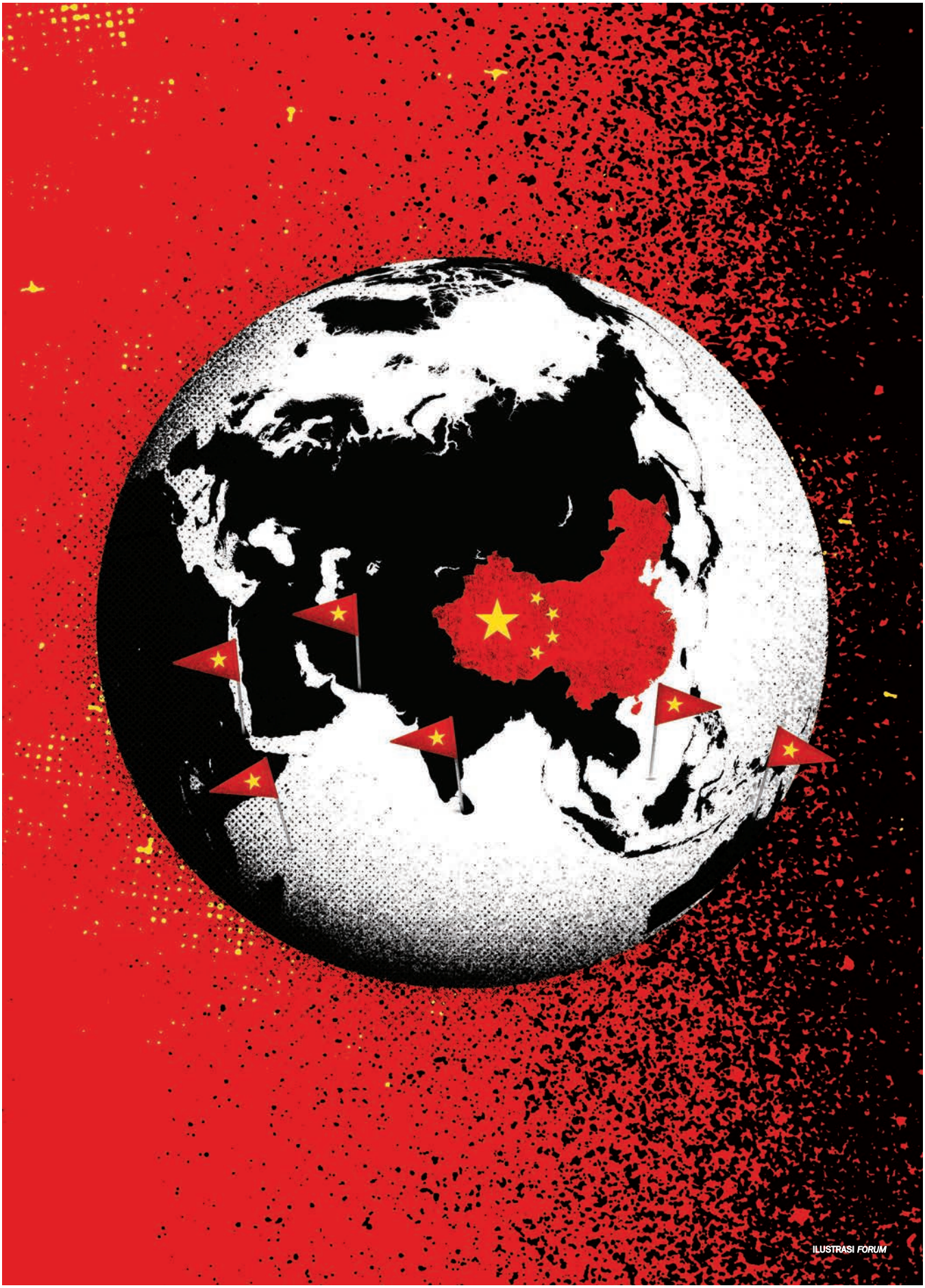

ILUSTRASI *FORUM*

IMPERIALISME KREDITUR TIONGKOK

BRAHMA CHELLANEY

Pinjaman dari Beijing mengancam sumber daya alam dan kedaulatan bagi negara penerima

Sama seperti kekuatan imperial Eropa yang memanfaatkan diplomasi kapal perang, Tiongkok menggunakan utang negara untuk membuat negara lain bertekuk lutut. Seperti yang ditunjukkan oleh penyerahan Pelabuhan Hambantota yang strategis oleh Sri Lanka, negara-negara yang terperangkap dalam jeratan utang pada raksasa imperial baru ini berisiko kehilangan aset alam dan bahkan kedaulatan mereka.

Pada Desember 2017, Sri Lanka, yang tidak mampu membayar utang berat kepada Tiongkok, secara resmi menyerahkan Pelabuhan Hambantota yang berlokasi strategis kepada raksasa Asia tersebut. Itu merupakan akuisisi besar bagi Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) Tiongkok — yang Presiden Tiongkok Xi Jinping sebut sebagai "proyek abad ini" — dan bukti betapa efektif diplomasi jebakan utang Tiongkok.

Ratusan warga Sri Lanka memprotes rencana pemerintah untuk menyewakan Pelabuhan Hambantota kepada usaha patungan yang dikendalikan oleh Tiongkok sebagai imbalan atas pinjaman besar untuk membangun pelabuhan. THE ASSOCIATED PRESS

Selain itu, seperti yang secara kelam diilustrasikan oleh pengalaman Sri Lanka, pembiayaan Tiongkok dapat membelenggu negara "mitranya". Alih-alih menawarkan hibah atau pinjaman konsesi, Tiongkok memberikan pinjaman terkait proyek super besar dengan bunga berbasis pasar, tanpa transparansi, apalagi penilaian dampak lingkungan atau sosial. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri A.S. pada saat itu, Rex Tillerson, pada Desember 2017, dengan BRI, Tiongkok bertujuan mendefinisikan "aturan dan normanya sendiri".

Untuk lebih memperkuat posisinya, Tiongkok telah mendorong perusahaan-perusahaannya untuk menawar pembelian putus atas pelabuhan strategis, bilamana memungkinkan. Pelabuhan Piraeus di Mediterania, yang diakuisisi oleh sebuah perusahaan Tiongkok senilai 6,322 triliun rupiah (436 juta dolar A.S.) dari Yunani yang kesulitan kas pada tahun 2016, akan berfungsi sebagai "kepala naga" BRI di Eropa.

Dengan mengerahkan kekuatan keuangannya dengan cara ini, Tiongkok berupaya mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, Tiongkok ingin menangani kapasitas berlebih di negeri sendiri dengan mendorong ekspor. Kedua, Tiongkok berharap memajukan kepentingan strategisnya, termasuk memperluas pengaruh diplomasinya, mengamankan sumber daya alam, menggalakkan penggunaan mata uangnya secara internasional, dan memperoleh keunggulan relatif atas kekuatan lainnya.

Pendekatan predatori Tiongkok untuk mendapatkan Hambantota sangat ironis. Dalam hubungannya dengan negara-negara yang lebih kecil seperti Sri Lanka, Tiongkok meniru praktik yang digunakan terhadapnya selama masa kolonial Eropa, yang dimulai dengan Perang Candu 1839-1860 dan berakhir dengan pengambilalihan komunis pada 1949 — sebuah masa yang Tiongkok rujuk dengan getirnya sebagai "abad penghinaan".

Tiongkok menggambarkan pengembalian kedaulatannya atas Hong Kong pada tahun 1997, sesudah berada di bawah kekuasaan Inggris selama lebih dari satu abad, sebagai meluruskan ketidakadilan sejarah. Namun, seperti ditunjukkan Hambantota, Tiongkok sendiri kini membentuk pengaturan neokolonial bergaya Hong Kong. Ternyata, janji Xi akan "peremajaan raya atas negeri Tiongkok" tak terpisahkan dari pengikisan kedaulatan negara-negara yang lebih kecil.

Sama seperti kekuatan imperial Eropa yang memanfaatkan diplomasi kapal perang untuk membuka markas kolonial dan pasar baru, Tiongkok menggunakan utang negara untuk membuat negara lain bertekuk lutut, tanpa harus menembakkan meriam sekali pun. Seperti candu yang diekspor Inggris ke Tiongkok, pinjaman yang ditawarkan Tiongkok bersifat candu. Karena Tiongkok memilih proyeknya berdasarkan nilai strategis jangka panjang, proyek-proyek tersebut mungkin menghasilkan imbal hasil jangka pendek yang tidak memadai bagi negara untuk melunasi utang mereka. Ini memberi Tiongkok keuntungan tambahan, yang dapat digunakannya, misalnya, untuk memaksa peminjam menukar utang dengan ekuitas, sehingga memperluas keberadaan global Tiongkok dengan menjebak semakin banyak negara dalam perbudakan utang.

Bahkan jangka waktu sewa Pelabuhan Hambantota selama 99 tahun mirip dengan yang digunakan untuk memaksa Tiongkok menyewakan pelabuhannya sendiri kepada kekuatan kolonial Barat. Inggris menyewa New Territories dari Tiongkok selama 99 tahun pada tahun 1898, yang menyebabkan massa tanah Hong Kong meluas sebesar 90 persen. Namun, jangka waktu 99 tahun ditetapkan hanya untuk membantu Dinasti Qing etnik Manchu Tiongkok agar tidak kehilangan muka; kenyataannya adalah semua akuisisi diyakini bersifat permanen.

Sekarang, Tiongkok menerapkan konsep sewa 99 tahun imperial di negeri jauh. Kesepakatan sewa Tiongkok atas Hambantota, rampung pada musim panas

Personel Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok menghadiri upacara pembukaan pangkalan militer baru Tiongkok di Jibuti, tempat Tiongkok telah mengerahkan tentara, pada Agustus 2017. AFP/GETTY IMAGES

PELABUHAN KOMERSIAL DAN ANGKATAN LAUT TIONGKOK YANG MEMILIKI FUNGSI GANDA

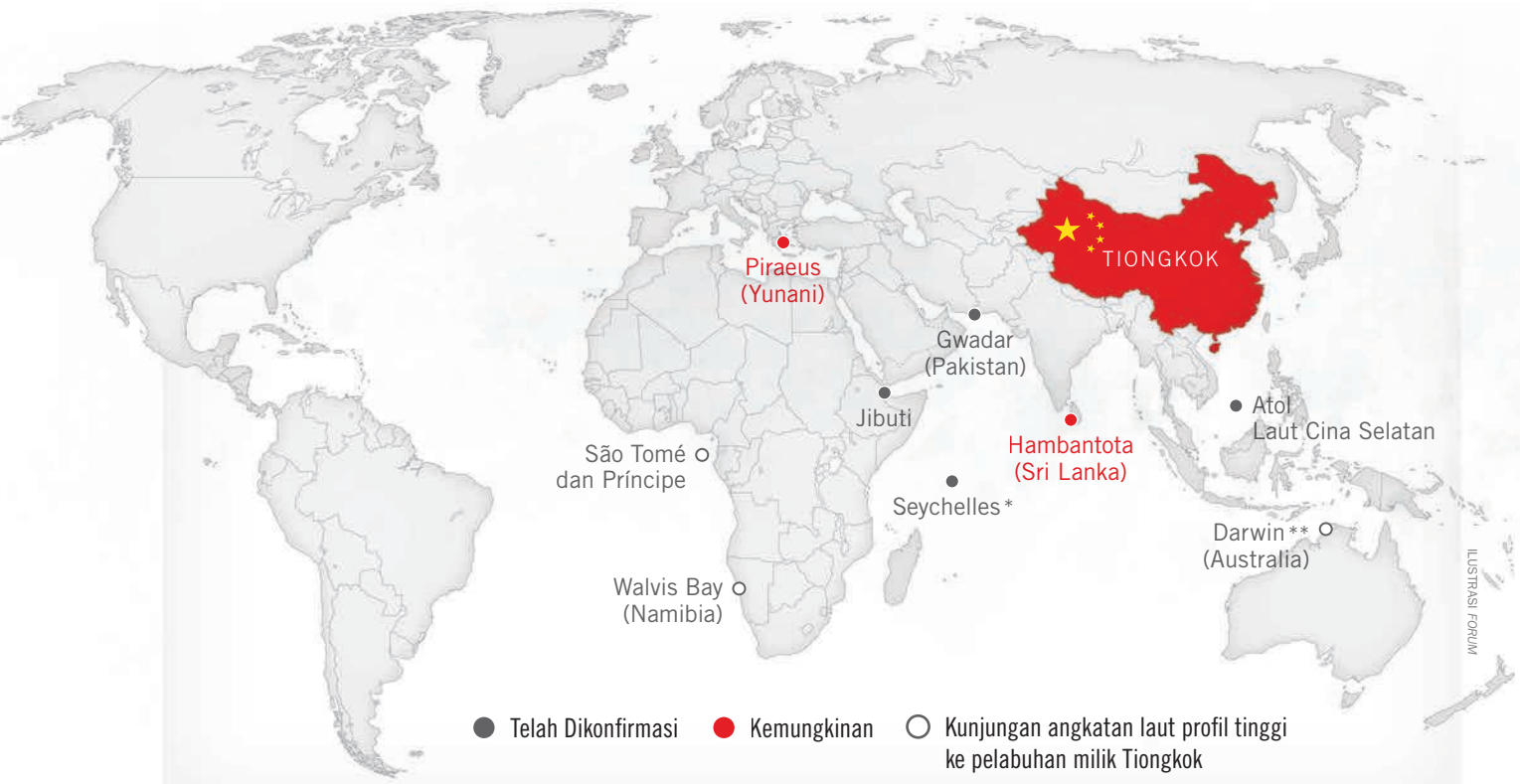

Penggunaan ganda didefinisikan sebagai pelabuhan yang dimiliki atau diinvestasikan oleh Tiongkok yang telah dikonfirmasi, atau diusulkan, terlibat dalam penggunaan komersial dan militer.

Sumber: *Financial Times*

* Tiongkok belum berinvestasi pada pelabuhan, namun angkatan lautnya menggunakan fasilitas Seychelles dalam operasi antipembajakan di Samudra Hindia.

** A.S. telah menyatakan keprihatinan atas kemungkinan penggunaan pelabuhan Darwin milik Tiongkok untuk tujuan militer.

2017, menyertakan janji bahwa Tiongkok akan memangkas utang Sri Lanka sebesar 15,95 triliun rupiah (1,1 miliar dolar A.S.). Pada tahun 2015, sebuah perusahaan Tiongkok mengambil sewa 99 tahun atas pelabuhan laut dalam Darwin di Australia — rumah bagi lebih dari 1.000 Marinir A.S. — senilai 5,626 miliar rupiah (388 juta dolar A.S.).

Demikian pula, setelah meminjamkan miliaran dolar ke Jibuti yang terlilit utang, Tiongkok pada tahun 2017 mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di negara kecil namun strategis itu, hanya beberapa mil dari pangkalan angkatan laut A.S. — satu-satunya fasilitas militer Amerika yang permanen di Afrika. Terjerat dalam krisis utang, Jibuti tidak memiliki pilihan selain menyewakan tanah ke Tiongkok senilai 290 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) per tahun. Tiongkok juga telah menggunakan pengaruhnya atas Turkmenistan untuk memperoleh saluran pipa gas alam sebagian besarnya dengan persyaratan Tiongkok.

Beberapa negara lain, dari Argentina sampai Namibia hingga Laos, telah terjebak dalam jeratan utang Tiongkok, yang memaksa mereka dihadapkan dengan pilihan mengenaskan guna menghindari gagal bayar. Kenya, yang berutang berat ke Tiongkok, kini terancam untuk mengubah pelabuhan Mombasa yang sibuk — gerbang menuju Afrika Timur — menjadi Hambantota lain.

Pengalaman ini hendaknya menjadi peringatan bahwa BRI pada dasarnya merupakan proyek imperial yang bertujuan mewujudkan Kerajaan Tengah seperti dalam mitos. Negara-negara yang terjebak dalam jeratan utang Tiongkok berisiko kehilangan aset alam yang paling berharga dan bahkan kedaulatan mereka. Dalam sarung tangan beludru raksasa imperial baru ini terselubung tangan besi — dengan kekuatan untuk memeras vitalitas dari negara-negara yang lebih kecil. □

Artikel ini dicetak ulang dengan izin dari Project Syndicate, sebuah organisasi media internasional yang menerbitkan dan menyindikasikan ulasan dan analisis tentang berbagai topik global penting. Artikel ini pertama kali diterbitkan di situs web Project Syndicate pada tanggal 20 Desember 2017.

Kembalinya ROHINGYA

Pegiat Hak Mengatakan Transparansi dan Keselamatan merupakan Kunci Kesuksesan Pemulangan

STAF *FORUM*

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut mereka "orang-orang yang paling teraniaya di dunia." Ratusan ribu warga Muslim Rohingya dari Myanmar melarikan diri — termasuk perempuan, anak-anak, bayi yang baru lahir, dan kaum lanjut usia — untuk tinggal di kota-kota tenda di Bangladesh daripada menghadapi konflik dengan militer dan kepolisian di negara asal mereka. Jumlah mereka di Bangladesh mencapai angka mengejutkan 1 juta orang pada akhir tahun 2017, demikian menurut pemerintah Bangladesh, mendorong kamp-kamp itu ke batas maksimumnya ketika para pengungsi mulai tinggal di luar kamp di tempat penampungan sementara, kadang-kadang hanya dengan terpal yang ditopang oleh tiang bambu.

Akan tetapi, resolusi damai terhadap salah satu krisis paling penting di Indo-Pasifik bisa jadi ada di depan mata. Sebagai bagian dari negosiasi bilateral yang sedang berlangsung, Bangladesh dan Myanmar mencapai kesepakatan pada Januari 2018 untuk memulangkan warga Rohingya ke Myanmar selama periode dua tahun. Pernyataan dari kedua pemerintah mengatakan bahwa Bangladesh akan mendirikan lima kamp transit di sisi perbatasannya, dan Myanmar akan mendirikan dua pusat penerimaan di negaranya. Myanmar "telah menegaskan kembali komitmennya untuk menghentikan aliran keluar penduduk [Myanmar] ke Bangladesh," ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri Bangladesh.

Pengungsi Muslim Rohingya menyeberangi perbatasan ke Bangladesh di dekat Sungai Naf dalam perjalanan ke kamp-kamp yang penuh sesak. GETTY IMAGES

Menemukan Tempat Perlindungan di Bangladesh

Ratusan ribu warga Rohingya telah meninggalkan kampung halaman etnis mereka di negara bagian Rakhine ke distrik Cox's Bazar di Chittagong, Bangladesh.

Sumber: Al-Jazeera

Desa-Desa yang Hancur di Negara Bagian Rakhine

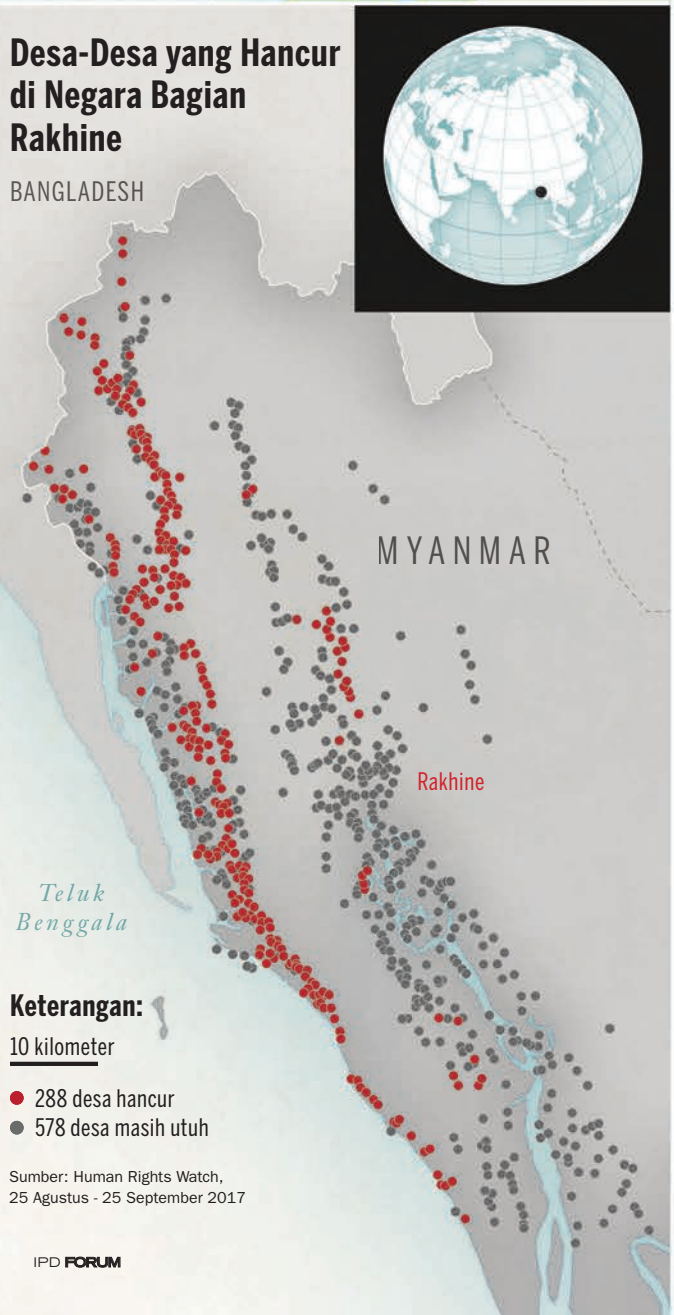

Sumber: Human Rights Watch, 25 Agustus - 25 September 2017

ILUSTRASI *FORUM*

Seorang anak Rohingya melihat kamp pengungsi dari bukit di dekat Cox's Bazar, Bangladesh.

REUTERS

KESELAMATAN MENGALAHKAN KECEPATAN

Krisis itu diduga meletus setelah para pemberontak Rohingya menyerang pos keamanan polisi pada 25 Agustus 2017, sehingga memicu respons militer yang ganas. Doctors Without Borders mengatakan sedikitnya 6.700 warga Muslim Rohingya tewas dalam bulan pertama penumpasan yang dicela P.B.B. sebagai pembersihan etnis itu. Lebih dari 650.000 orang telah melarikan diri dari kekerasan sejak pecahnya kekerasan terbaru itu. Pada Januari 2018, Bangladesh telah mencatat lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya yang tinggal di kamp di dekat perbatasannya dengan Myanmar, demikian menurut laporan di surat kabar *The Times of India*.

"Sejauh ini, kami telah mendaftar 1.004.742 warga Rohingya. Mereka diberi kartu pendaftaran biometrik," ungkap Saidur Rahman, brigadir jenderal Angkatan Darat Bangladesh yang mengepalai proyek pendaftaran itu. Beberapa ribu lagi belum terdaftar.

Meskipun tekanan yang ditimbulkan oleh masuknya 1 juta orang itu menciptakan rasa urgensi di seputar proyek repatriasi, pengamat hak asasi manusia internasional mengatakan bahwa keselamatan para pengungsi harus menjadi prioritas utama. Juru bicara Komisioner Tinggi Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR) mengatakan bahwa warga Rohingya harus kembali secara sukarela dan hanya ketika mereka percaya bahwa kondisi mereka aman. "Tantangan utama harus diatasi," ungkap juru bicara UNHCR Andrej Mahecic, demikian menurut Reuters. "Ini termasuk memastikan bahwa mereka diberi tahu tentang situasi di daerah asal mereka ... dan ditanya tentang keinginan mereka, bahwa keselamatan mereka terjamin."

Amerika Serikat menyatakan keprihatinan serupa. "Kerangka waktu kurang penting bagi kami dibandingkan dengan kemampuan orang-orang itu untuk pulang dengan aman dan sukarela," ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri A.S. Heather Nauert. Nauert, yang mengunjungi kawasan itu pada tahun 2017,

mencatat bahwa hanya beberapa bulan telah berlalu sejak banyak warga Rohingya meninggalkan kampung halaman mereka. “Saya tidak dapat membayangkan ada orang yang merasa aman pada saat ini untuk kembali ke sana,” ungkapnya pada Januari 2018.

Meskipun para pengungsi mengungkapkan ketakutan untuk kembali ke kampung halamannya, mereka juga menghadapi ancaman jika mereka tinggal di tempat penampungan sementara mereka saat ini. Salah satu bahaya yang paling krusial adalah penyakit. UNICEF melaporkan pada Januari 2018 bahwa mereka telah mendeteksi 4.011 dugaan kasus difteri di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh dan bahwa 21 orang telah meninggal akibat penyakit itu. Wabah itu mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNICEF, dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga Bangladesh untuk memulai program vaksinasi besar-besaran. Pada akhir Desember 2017, 150.000 anak-anak yang berusia 6 minggu hingga 7 tahun telah menerima vaksin kombinasi, sementara itu 166.000 lainnya dalam kelompok usia 7 hingga 17 tahun diberi vaksin tetanus dan difteri selama kampanye tiga minggu.

Difteri disebabkan oleh bakteri yang terutama menginfeksi tenggorokan dan saluran pernapasan atas. Penyakit itu menyebar melalui kontak fisik langsung dan ketika orang yang terinfeksi bersin atau batuk di sekitar orang lain. Penyakit itu hampir diberantas di Bangladesh, sehingga wabah yang terjadi di kamp-kamp itu tidak diperkirakan sebelumnya oleh komunitas medis. Pemerintah Bangladesh mempersiapkan diri untuk mengatasi penyakit lain dan melakukan tindakan

Seorang pengungsi muda yang melarikan diri dari Myanmar dengan perahu menuju kamp pengungsi di Bangladesh, tempat ratusan ribu Muslim Rohingya ditampung.

AFP/GETTY IMAGES

48.000 bayi akan lahir di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2018.

Pengungsi yang baru tiba di kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh, beristirahat setelah menempuh perjalanan untuk melarikan diri dari kekerasan di negara tetangga Myanmar.

GETTY IMAGES

cepat untuk memberikan vaksinasi kolera dan campak kepada pendatang baru, demikian menurut laporan Agence France-Presse. Akan tetapi, munculnya difteri, yang dapat menyebabkan gagal jantung, kelumpuhan, dan kematian jika tidak ditangani, merupakan sebuah kejutan. "Kami tercengang ketika tes mengonfirmasi berjangkitnya difteri di kamp-kamp itu. Difteri merupakan penyakit yang sudah lama hilang di negara kami," ungkap Abdus Salam, kepala petugas medis untuk distrik Cox's Bazar, tempat kamp-kamp itu berada. "Dengan segera kami mendatangkan vaksin dari luar negeri untuk melakukan tanggap darurat."

Agence France-Presse melaporkan bahwa tingkat vaksinasi yang tinggi membuat difteri sekarang ini jarang ditemui di sebagian besar negara-negara di dunia, meskipun Yaman saat ini sedang mengalami wabah itu. Akan tetapi warga Rohingya berasal dari negara bagian Rakhine yang miskin, tempat banyak anak-anak tidak divaksinasi.

Kondisi yang lebih rumit lagi adalah jumlah warga Rohingya di kamp pengungsian meledak meskipun tidak ada pengungsi yang melintasi perbatasan. The Associated Press (AP) melaporkan bahwa lembaga bantuan Save the Children menerbitkan laporan yang mengatakan bahwa 48.000 bayi akan lahir di kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh pada tahun 2018. Bayi-bayi itu kemungkinan besar menghadapi kondisi tidak sehat dan risiko penyakit dan kekurangan gizi. "Kamp-kamp itu memiliki sanitasi yang buruk dan merupakan tempat berkembang biak penyakit seperti difteri, campak, dan kolera, sehingga bayi-bayi yang baru lahir itu sangat rentan," ungkap Rachael Cummings, penasihat kesehatan lembaga itu di Cox's Bazar. "Ini bukan tempat bagi seorang anak untuk dilahirkan."

Seorang pejabat Bangladesh menyebut proyeksi 48.000 bayi melebihi apa yang dapat dibayangkan. "Sederhananya, ini akan menjadi bencana dan mengerikan bagi kami," ungkap Priton Kumar Chowdhury, wakil direktur departemen layanan sosial pemerintah di Cox's Bazar, demikian menurut AP. "Saya tidak dapat membayangkannya, dan otak saya sebenarnya tidak tahu bagaimana menghadapi hal ini."

KESEMPATAN MENDAPATKAN KEWARGANEGARAAN

P.B.B. telah menyatakan ketiadaan kewarganegaraan Myanmar bagi warga Rohingya menjadi batu sandungan besar dalam membujuk mereka untuk kembali. Banyak warga Rohingya ditolak kewarganegaraannya dan diklasifikasikan oleh pemerintah Myanmar sebagai migran ilegal dari Bangladesh — bukan etnis minoritas. Banyak warga Rohingya tidak memiliki identifikasi yang diterbitkan oleh negara.

Pemerintah Myanmar saat ini mengatakan bahwa warga Muslim Rohingya memenuhi syarat untuk mengajukan kewarganegaraan jika setidaknya dua generasi keluarga mereka telah tinggal di Myanmar, demikian yang dikatakan Menteri Imigrasi Khin Ye kepada Radio Free Asia. "Persyaratannya salah satunya adalah bahwa kakek-nenek dan orang tua mereka harus tinggal di sini dan meninggal di sini, bahwa pemohon lahir di sini dan dapat berbicara bahasa Myanmar, dan bahwa dia ingin tinggal di sini," ungkapnya.

Warga Rohingya disebut sebagai "Bengali" di Myanmar meskipun mereka sudah lama tinggal di negara itu. "Orang asing, seperti Bengali, memiliki hak untuk mengajukan kewarganegaraan jika mereka mau," ungkap Khin Ye. Dia menegaskan bahwa banyak warga Rohingya dibawa ke Myanmar sebagai buruh selama pendudukan Inggris dari tahun 1824 hingga negara itu memperoleh kemerdekaan pada tahun 1948. Orang-orang Rohingya secara fisik dan budaya lebih mirip dengan rakyat Bangladesh dan India daripada mayoritas etnis Bamar di Myanmar.

Terlepas pernyataan Khin Ye tentang kerangka waktu datangnya warga Rohingya ke Myanmar, banyak cendekiawan mengatakan bahwa mereka merupakan keturunan dari pedagang Arab dan Persia yang tiba di tempat yang sekarang menjadi Myanmar barat lebih dari 1.000 tahun yang lalu. Orang-orang Rohingya pada abad kedelapan hidup di kerajaan independen di Arakan, yang sekarang dikenal sebagai negara bagian Rakhine di Myanmar, demikian menurut surat kabar *The Wall Street Journal*. Dari abad kesembilan hingga abad ke-14, warga Rohingya memeluk agama Islam melalui pedagang Arab. Pada tahun 1784, raja Myanmar menaklukkan Arakan, memaksa ribuan warga Rohingya melarikan diri ke Bengal. Dari tahun 1824 hingga 1942, Inggris menjadikan Myanmar sebagai salah satu provinsi India Britania dan memigrasikan banyak pekerja Rohingya kembali ke Myanmar untuk membangun proyek-proyek infrastruktur. Ketika Jepang menginvasi pada tahun 1942, Jepang mengusir Inggris dan mendorong kelompok nasionalis Myanmar untuk menyerang komunitas Muslim yang menurut mereka telah mendapat keuntungan dari pemerintahan kolonial.

Khin Ye menjelaskan mengapa pemerintahannya tidak memperlakukan warga Rohingya sebagai kelompok etnis di Myanmar, yang 90 persen beragama Buddha. Dia mengatakan bahwa selama era kolonial, warga Myanmar "tidak memiliki hak untuk melindungi dan mengelola negara kami," yang berarti bahwa orang Rohingya tidak pernah diundang untuk tinggal oleh warga negara Myanmar. "Jadi, kecuali jika mereka berhubungan darah dengan rakyat kami, tidak mungkin mereka [dapat secara otomatis dianggap] menjadi warga negara kami," ungkapnya.

Perspektif itu membuat para pengungsi berhati-hati untuk kembali. Karena repatriasi harus dilakukan secara sukarela berdasarkan hukum internasional, membuat para pengungsi kembali tanpa kewarganegaraan bisa menjadi hal yang sulit dilakukan. "Saya akan kembali lagi hanya jika hak dan keselamatan kami dijamin — selamanya," ungkap Hamid Hussain, 71 tahun, pengungsi dan petani Muslim Rohingya, demikian menurut Reuters. Hussain pertama kalinya melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh pada tahun 1992 dan pulang ke kampung halamannya setahun setelahnya berdasarkan kesepakatan repatriasi. Dia melarikan diri lagi pada tahun 2017 ketika kekerasan kembali pecah di sana.

> **"Saya akan kembali lagi hanya jika hak dan keselamatan kami dijamin — selamanya."**
>
> Hamid Hussain, petani Muslim Rohingya

Hamid Hussain, seorang pengungsi Rohingya yang berusia 71 tahun, memotong kayu bakar di kamp Kutupalong di Bangladesh. REUTERS

Pihak berwenang di Myanmar mengatakan kali ini akan berbeda, meskipun para penggiat hak asasi manusia bersikeras bahwa keterbukaan dalam proses pemulangan adalah cara terbaik untuk melindungi semua orang yang terlibat. Meskipun UNHCR tidak terlibat langsung dalam negosiasi perjanjian repatriasi, Sekretaris Jenderal P.B.B. Antonio Guterres mengatakan kepada jurnalis bahwa "akan sangat penting untuk membuat UNHCR terlibat dengan sepenuhnya dalam operasi itu untuk menjamin bahwa operasi itu mematuhi standar internasional."

Dia mengatakan bahwa para pengungsi membutuhkan struktur kehidupan permanen untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. "Diperlukan upaya rekonsiliasi yang sangat besar untuk memungkinkannya berlangsung dengan tepat," ungkapnya. "Hal terburuk adalah memindahkan orang-orang ini dari kamp-kamp di Bangladesh ke kamp-kamp di [Myanmar], membiarkan situasi buatan untuk waktu yang lama dan tidak mengizinkan mereka untuk mendapatkan kembali kehidupan normal mereka." □

MENINGKATNYA KETIDAKSETARAAN

ILUSTRASI *FORUM*

Kesenjangan Ekonomi Semakin Berkontribusi pada Risiko Keamanan

KISAH DARI **DR. MIEMIE WINN BYRD** | FOTO DARI REUTERS

Ekonom Prancis Thomas Piketty menyatakan setelah terjadinya serangan teroris pada November 2015 di Paris bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang persisten telah berkontribusi pada kebangkitan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pernyataannya menciptakan badai kontroversi, menambah perdebatan tentang prospek ketidaksetaraan global. Pada tahun 2014, dia mengungkapkan subjek ketidaksetaraan ke dalam kesadaran populer dengan buku terlarisnya, *Capital in the Twenty-First Century*. Buku itu memiliki pengkritik dan juga penggemar, dan banyak dari kedua belah pihak sepakat bahwa karyanya menciptakan tingkat ketertarikan dalam topik ini yang belum pernah dilihat sejak ekonom Inggris John Maynard Keynes menerbitkan *The General Theory of Employment, Interest and Money* pada tahun 1936.

Tokoh ekonomi modern lainnya seperti Robert Shiller, Paul Krugman, Joseph Stiglitz, dan Robert Reich telah memunculkan wacana mengenai meningkatnya ketidaksetaraan sejak krisis keuangan global tahun 2007-08, tetapi mereka belum mampu mendapatkan perhatian publik seperti Piketty. Temuannya mengubah perdebatan tentang kekayaan dan ketidaksetaraan, memberikan data objektif untuk melawan sisi dominan perdebatan ketidaksetaraan yang sudah lama dianut, yang mengatakan bahwa ketidaksetaraan tidak layak untuk mendapatkan perhatian kebijakan publik, demikian menurut Robert Wade, profesor di London School of Economics and Political Science. Lebih lanjut, buku Piketty mempersiapkan agenda untuk generasi pemikiran berikutnya mengenai kapitalisme.

Mengapa Peduli Dengan Meningkatnya Kesenjangan?

Diskusi tentang ketidaksetaraan telah meluas dan semakin intensif sejak bukunya menjadi buku terlaris di seluruh dunia. Bahkan Paus Fransiskus turut menyampaikan pendapatnya tentang masalah ini dalam pidato kepada korps diplomatiknya pada Januari 2018. "Ada risiko bahwa kita akan melihat munculnya bentuk-bentuk kolonisasi ideologi modern oleh pihak yang lebih kuat dan lebih kaya hingga merugikan pihak yang lebih miskin dan paling rentan," ujarnya.

Aktivis di India memprotes keputusan pemerintah untuk membagikan uang tunai sebagai pengganti makanan bersubsidi kepada warga miskin sementara itu polisi menggunakan meriam air untuk membubarkan kerumunan massa.

Meningkatnya ketidaksetaraan tetap menjadi kekhawatiran karena menciptakan kerentanan ekonomi, sosial, dan politik dalam masyarakat, dan menunjukkan sedikit tanda-tanda mereda, demikian menurut Piketty.

Dalam Laporan Ketidaksetaraan Dunia (World Inequality Report) 2018, Piketty dan rekan kerjanya di World Inequality Lab menemukan bahwa sejak tahun 1980, ketidaksetaraan pendapatan telah meningkat pesat di Amerika Utara dan Asia, tumbuh secara moderat di Eropa, dan stabil pada tingkat tinggi di Timur Tengah, Sub-Sahara Afrika, dan Brasil. Separuh penduduk termiskin di dunia telah mengalami peningkatan pendapatan oleh karena pertumbuhan yang tinggi di Asia. Akan tetapi 0,1 persen teratas masih meraih pertumbuhan sama banyaknya seperti separuh bagian bawah masyarakat dewasa dunia sejak tahun 1980.

Studi Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) baru-baru ini menunjukkan

bahwa pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) memiliki korelasi "negatif dan signifikan secara statistik" dengan ketidaksetaraan pendapatan. Khususnya peningkatan rata-rata tiga poin dalam indeks Gini untuk negara-negara OECD selama 20 tahun terakhir berkorelasi dengan penurunan pertumbuhan ekonomi 0,35 persen per tahun untuk waktu yang sama, yang diterjemahkan menjadi penurunan PDB 8,5 persen untuk periode itu. Dari 34 negara anggota OECD, beberapa negara berada di Indo-Pasifik, termasuk Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Ahli statistik Italia Corrado Gini menemukan skala Gini pada tahun 1912, yang berkisar dari nol hingga satu, dengan skor satu menandakan ketidaksetaraan maksimal: Satu orang mendapatkan semua pendapatan dan sisanya di seluruh dunia tidak mendapatkan apa-apa.

Ekonom utama Bank Dunia, Branko Milanovic, memperingatkan bahwa "stabilitas sosial dan struktur sosial masyarakat terpecah jika ada perbedaan pendapatan yang sangat besar." Peringatannya didukung secara empiris oleh temuan ahli epidemiologi Inggris Richard G. Wilkinson dan Kate Pickett baru-baru ini bahwa ketika ketidaksetaraan meningkat, maka modal sosial memburuk. Modal sosial didefinisikan sebagai tingkat kohesi sosial dan kepercayaan dalam masyarakat, dengan penurunan modal sosial membuat masyarakat rentan terhadap kerusuhan dan konflik.

Penelitian telah mengungkapkan bahwa ketika suatu kondisi kesenjangan, ketidaksetaraan, dan pengucilan dianggap sebagai hasil ketidakadilan yang persisten, kondisi itu dapat memicu arus naluri dasar yang kuat. Para peneliti biologi perilaku dan evolusi di Central Washington University menemukan bahwa naluri keadilan berakar kuat dalam kode genetik manusia. Oleh karena itu, sungguh mengkhawatirkan jika ketidaksetaraan dirasakan oleh "si miskin" sebagai kurangnya akses yang adil terhadap peluang dan sumber daya.

Survei Proyek Sikap Global 2013 dari Pew Research Center mengungkapkan bahwa lebih dari 70 persen responden menganggap sistem ekonomi negara mereka berpihak pada orang kaya. Rasa ketidakadilan yang semakin berkembang ini, dikombinasikan dengan bukti dan data tentang meningkatnya ketidaksetaraan, harus menjadi peringatan bagi pembuat kebijakan dan profesional keamanan, mengingat hubungan nyatanya dengan perilaku dan ketidakstabilan yang tidak diinginkan.

Para peneliti dari universitas Harvard dan Columbia melakukan penelitian yang diterbitkan pada tahun 1996 yang mengukur ketidaksetaraan pendapatan dan ketidakstabilan sosial-politik di 70 negara dari tahun 1960 hingga 1985. Mereka juga menemukan bahwa ketika ketidaksetaraan pendapatan meningkat, ketidakstabilan sosial-politik meningkat. Kesimpulan ini mendukung temuan sebelumnya dari peneliti ilmu politik Ted Gurr tentang hubungan antara ketimpangan relatif, frustrasi, dan agresi. Gurr, profesor emeritus terkemuka di University of Maryland, menemukan bahwa ketimpangan

INDEKS KETIDAKSETARAAN PENDAPATAN GLOBAL

relatif — bukan kemiskinan absolut — mengakibatkan keluhan dan frustrasi. Dukungan empiris di balik teori "frustrasi-agresi" telah menunjukkan bahwa semua manusia secara biologis dikodekan untuk merespons penyebab masalah yang dirasakan secara agresif ketika merasa frustrasi.

Hampir dapat diprediksi bahwa gerakan seperti Al-Qaeda dan ISIS akan mencoba memanfaatkan kebutuhan terpenting ini di dalam masyarakat di seluruh dunia untuk mengeksploitasi persepsi marjinalisasi dan ketidaksetaraan. Banyak gerakan separatis, pemberontakan, konflik bersenjata, kelompok teroris, dan bentrokan kekerasan telah memanfaatkan naluri universal semacam itu untuk merekrut dan memobilisasi pengikut.

Efek Samping Tambahan

Meskipun masyarakat pada umumnya memahami korelasi antara ketidaksetaraan sosial-ekonomi, keresahan sosial, dan ketidakstabilan politik, sebagian besar tidak menyadari hubungan antara ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan kesehatan masyarakat. Peneliti Harvard University, S.V. Subramanian dan Ichiro Kawachi dalam meta-analisis studi epidemiologi tahun 2004 mereka, yang mencakup sekitar 60 juta orang di seluruh dunia, menemukan hubungan antara ketidaksetaraan dan kesehatan yang buruk. Pada tahun 2009, ahli epidemiologi Inggris, Wilkinson dan Pickett menemukan bukti yang

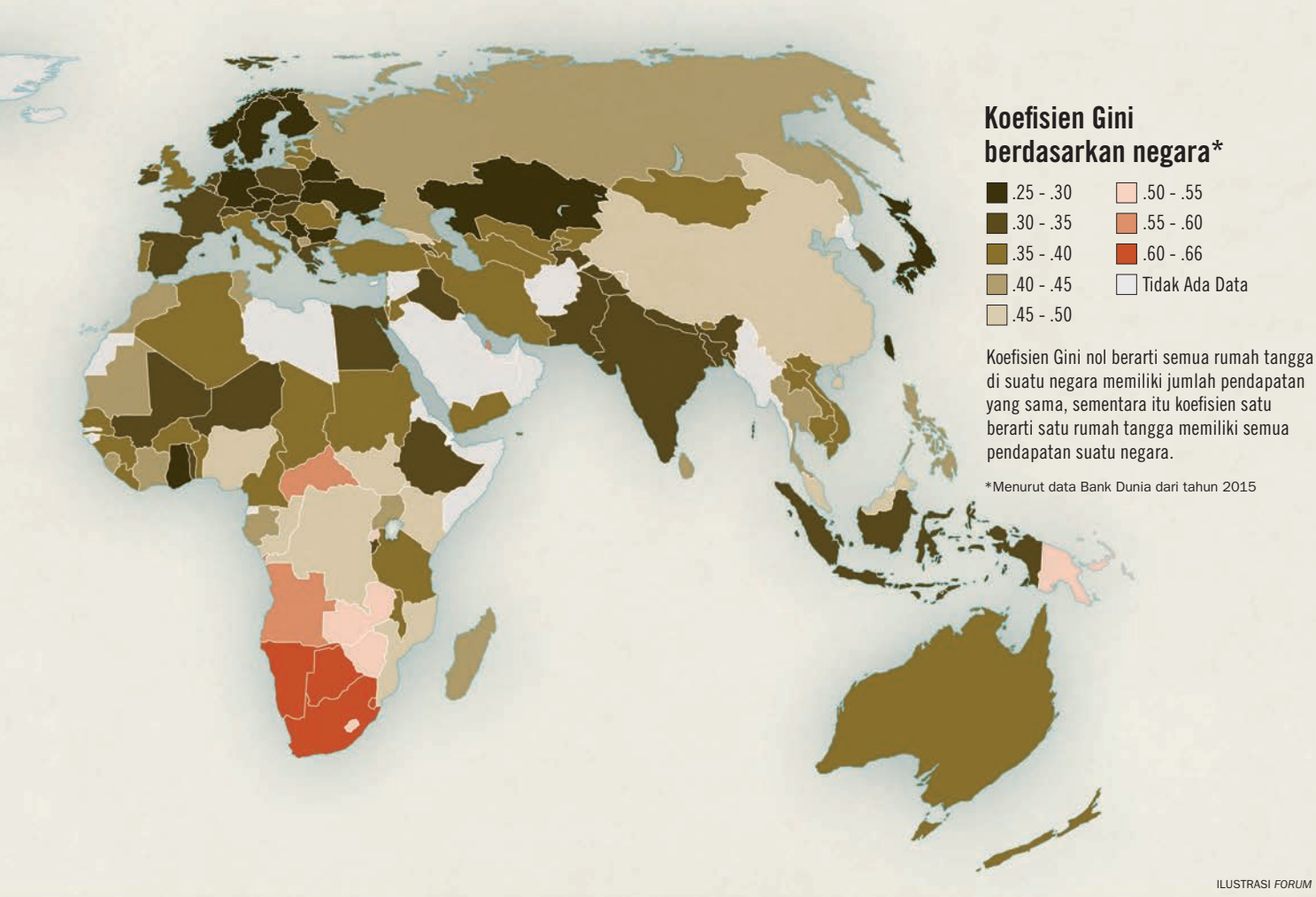

ILUSTRASI *FORUM*

menunjukkan bahwa ketidaksetaraan berkaitan dengan tingkat obesitas, kelahiran remaja, penyakit mental, overdosis narkoba, dan kematian.

Pemikiran logis menunjukkan dampak pengangguran yang terus-menerus dapat menyebabkan stres dan depresi. Saat ini, ilmu pengetahuan menunjukkan dengan tegas efek negatif dari stres dan depresi pada kesehatan mental dan fisik. Wilkinson dan Pickett juga menemukan bahwa ketidaksetaraan tinggi berkorelasi dengan tingkat permusuhan, pembunuhan, rasisme, dan pemenjaraan yang lebih tinggi, sementara itu selaras dengan tingkat kepercayaan, modal sosial, kinerja pendidikan, dan mobilitas sosial yang lebih rendah.

Runtuhnya Kesetaraan di Asia

Piketty menulis bukunya di Paris School of Economics berdasarkan data historis tentang distribusi pendapatan dan kekayaan yang dikumpulkan dari 20 negara selama tiga abad. Pada saat yang sama, Bank Dunia (World Bank - WB) dan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank - ADB) memberikan peringatan tentang

Warga yang tinggal di sebuah koloni pemukim liar memprotes pembongkaran rumah mereka di kota Quezon, Filipina.

meningkatnya ketidaksetaraan di kawasan Indo-Pasifik. Pertumbuhan ekonominya yang cepat dalam 20 tahun terakhir telah menarik banyak orang keluar dari kemiskinan, tetapi juga telah menghasilkan kesenjangan yang melebar antara kaya dan miskin, dengan tingkat akumulasi kekayaan bagi orang kaya meningkat jauh lebih cepat daripada akumulasi kekayaan bagi orang miskin.

Ketika kapitalisme menyebar di seluruh Asia, model ekonomi berbasis pasar telah menciptakan pemenang dan pecundang. Kondisi-kondisi ini, dikombinasikan dengan korupsi yang merajalela di dalam struktur pemerintahan, telah sering kali menimbulkan kapitalisme dan monopoli kroni, yang berkontribusi pada rasa ketidakadilan yang lebih besar di antara orang-orang yang mendapatkan porsi pertumbuhan dan kemajuan yang lebih sedikit. Rasa ketidakadilan ini ditangkap oleh Proyek Sikap Global 2013 dari Pew Research Center, ketika lebih dari 60 persen responden di Asia mengatakan bahwa sistem ekonomi negara mereka berpihak pada orang kaya.

Ketika ketidaksetaraan meningkat, legitimasi sistem politik menurun di kalangan "kaum miskin." Ketika ketidaksetaraan diperkuat di sepanjang garis pemisah ras, etnis, dan agama, kebencian dan ketidakpuasan dapat menyebabkan ketidakstabilan politik mulai dari protes damai hingga kegiatan kriminal, kerusuhan sosial, kekerasan politik, kudeta militer, konflik bersenjata, dan revolusi. Kita telah menyaksikan kasus-kasus semacam itu di seluruh Indo-Pasifik dan seluruh dunia. Sosiolog Amerika Neil Smelser berpendapat dalam bukunya, *Faces of Terrorism: Social and Psychological Dimensions*, bahwa kesadaran akan kesenjangan sosial-ekonomi berfungsi untuk "membuat fokus-fokus pengucilan lain yang tersisa menjadi lebih terlihat dan memberatkan." Efek dari kesadaran seperti itu dapat dilihat, misalnya, dalam konflik etnis berkepanjangan di Myanmar dan pemberontakan Muslim di Filipina dan Thailand selatan.

ADB dan WB bukanlah satu-satunya pihak yang peduli dengan kecenderungan meningkatnya ketidaksetaraan di kawasan ini. Pada tahun 2013, Forum Ekonomi Dunia menyurvei 1.000 ahli dari dunia industri, pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengevaluasi 50 risiko dan meminta mereka untuk memeringkatkan berbagai risiko ini berdasarkan kemungkinan dan dampaknya dalam dekade mendatang. "Kesenjangan pendapatan yang parah" diperingkatkan sebagai risiko No. 1. Oxfam International menerbitkan laporan yang menunjukkan bahwa 1 persen orang terkaya telah mengalami peningkatan kekayaan global mereka dari 44 persen pada tahun 2009 menjadi 48 persen pada tahun 2014. Per Maret 2018, daftar miliarder majalah *Forbes* mencatat rekor 2.208 nama, menyumbang total kekayaan

Anak-anak tunawisma tidur di trotoar di Mumbai, India. Para peneliti mengatakan kesenjangan ekonomi yang mengarah pada kondisi seperti itu dapat menyebabkan ketidakstabilan politik.

132,6 kuadriliun rupiah (9,1 triliun dolar A.S.), naik dari 112,2 kuadriliun rupiah (7,7 triliun dolar A.S.) pada tahun 2017. "Orang super kaya terus bertambah kaya, memperlebar jurang antara mereka dan orang lain," ungkap Luisa Kroll dan Kerry A. Dolan, asisten editor pelaksana kekayaan di Forbes Media.

Mencuatnya Ketidakadilan di A.S.

A.S. tidak kebal dari masalah ketidaksetaraan. Joseph Stiglitz, penerima Nobel ekonomi dari A.S., berpendapat bahwa meningkatnya ketidaksetaraan dalam ekonomi yang lebih lemah dapat menciptakan lingkaran penguatan diri yang negatif. "Masalah ketidaksetaraan bukanlah masalah ekonomi teknis. Ketidaksetaraan benar-benar menjadi masalah politik praktis," demikian menurut Stiglitz. Ketidaksetaraan ekonomi "dapat mengarah pada dikuasainya proses politik oleh sekelompok kecil elit berpenghasilan tinggi dan kaya raya."

Dengan kata lain, ketidaksetaraan ekonomi terhubung dengan ketidaksetaraan politik. Pada kenyataannya, beberapa ekonom seperti Nouriel Roubini dari New York University memperingatkan bahwa "setiap model ekonomi yang tidak benar-benar mengatasi ketidaksetaraan pada akhirnya akan menghadapi krisis legitimasi." Legitimasi mendasari kemampuan pemerintah demokratis untuk menanamkan kepercayaan pada lembaga dan pemimpin dan untuk menegakkan supremasi hukum.

Seorang perempuan meminta sumbangan kepada orang-orang yang lewat untuk memerangi kemiskinan anak di Tokyo.

Di era meluasnya kemajuan dalam komunikasi dan transportasi ini, citra dan kesadaran tentang ketidaksetaraan antara kaya dan miskin merembes ke dalam kesadaran masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di bagian bawah piramida kekayaan. Ketika aspirasi mereka berubah, mereka mungkin tidak puas lagi dengan peningkatan kecil dan bertahap dalam kehidupan mereka ketika mereka tahu bahwa orang lain mendapatkan peningkatan yang jauh lebih banyak.

Risiko keamanan

Para pembuat kebijakan dan profesional keamanan harus menyadari ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang terus meningkat. Risiko Global 2012 dari Forum Ekonomi Dunia melaporkan bahwa "dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, ada perasaan surutnya harapan bagi prospek masa depan. Data jajak pendapat Gallup mengungkapkan bahwa, secara global, masyarakat menganggap standar kehidupan mereka jatuh, dan mereka mengungkapkan berkurangnya keyakinan pada kemampuan pemerintah mereka untuk membalikkan tren ini.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine LaGarde, dalam sambutannya pada Konferensi Kapitalisme Inklusif, memperingatkan bahwa "kesenjangan juga membawa perpecahan. Sejarah juga mengajarkan kita bahwa demokrasi mulai bergolak di ujung-ujungnya ketika pertarungan politik memisahkan si kaya dengan si miskin." Sentimen semacam itu dapat dengan mudah diperkuat dan dieksploitasi oleh ekstremis seperti Al-Qaeda dan ISIS dengan daya tarik karismatik dan penggunaan kewirausahaan teknologi komunikasi modern.

Ini mengembalikan diskusi ke kemungkinan pernyataan Piketty pada tahun 2015 di surat kabar Prancis *Le Monde* yang menghubungkan kebangkitan ISIS dengan ketidaksetaraan sosial-ekonomi yang meningkatkan secara terus-menerus. Berdasarkan studi dan kajian literatur di berbagai disiplin yang menunjukkan bahwa ketimpangan relatif dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi memiliki korelasi yang signifikan dengan kerusuhan sosial, ketidakstabilan politik, dan konflik kekerasan, argumen Piketty tampaknya cukup beralasan. Ketidaksetaraan dan ketimpangan relatif memang dapat meningkatkan radikalisasi dengan memperkuat sumber-sumber keluhan lainnya, menciptakan masyarakat yang terpecah-pecah dan hilangnya legitimasi untuk sistem yang ada, yang pada gilirannya menawarkan peluang yang lebih besar bagi keresahan sosial dan ekspresi politik yang ganas. Oleh karena itu, Piketty tepat sasaran dalam merekomendasikan bahwa strategi untuk mengatasi masalah ISIS harus mencakup pendekatan untuk meningkatkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan mempersempit kesenjangan sosial-ekonomi di dalam dan di antara berbagai negara. □

PEMOSISIAN STRATEGIS

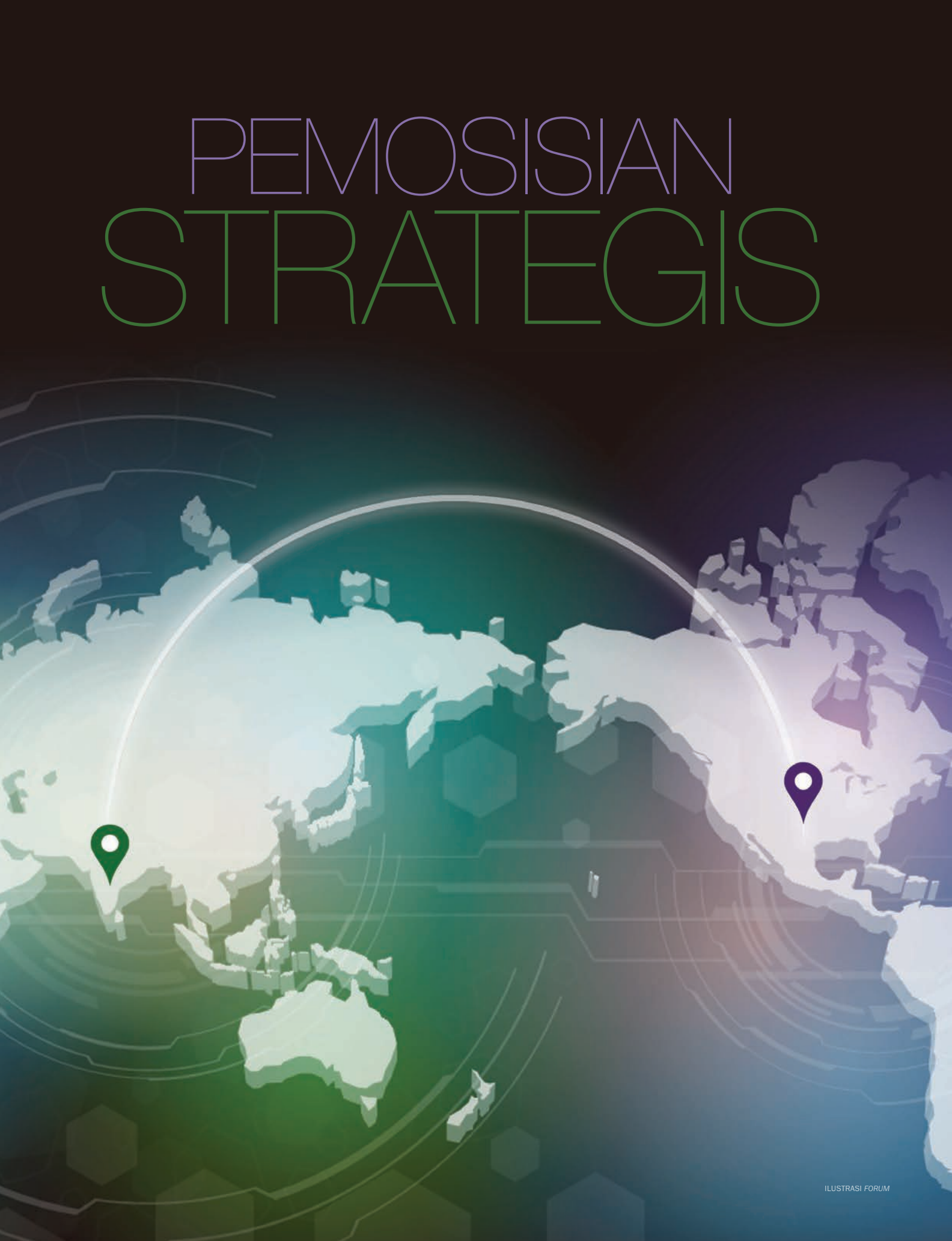

ILUSTRASI *FORUM*

INDIA DI PERLINTASAN ARUS INDO-PASIFIK

SAROSH BANA

India berbesar hati dengan minat pemerintah A.S. untuk tidak hanya mempertahankan kemitraan strategis tetapi juga mengangkat India ke tingkat yang lebih tinggi dalam konteks perubahan geopolitik.

Ketika Presiden A.S. Donald Trump menyalakan lampu minyak untuk merayakan Diwali, festival cahaya, pertamanya di Gedung Putih bersama beberapa orang India-Amerika, dia memuji komunitas India-Amerika dan mengatakan bahwa dia menghargai hubungan kuatnya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.

"Saat kami melakukannya [merayakan Diwali], kami terutama mengingat rakyat India, kampung halaman agama Hindu, yang telah membangun demokrasi terbesar di dunia," ungkap Trump. "Kami menegaskan kembali bahwa India-Amerika dan Hindu-Amerika adalah anggota keluarga besar Amerika kami yang benar-benar dihargai, dihormati, dan dicintai."

Modi adalah salah satu pemimpin dunia pertama yang ditelepon Trump dalam lima hari sejak pelantikannya sebagai presiden pada Januari 2017. Selama kampanye pilpresnya, Trump menyatakan kepada pendukung dan donatur keturunan Indianya bahwa dia adalah "penggemar berat India; benar-benar penggemar berat." Dia juga menambahkan, "Mari saya mulai dengan mengatakan sejujurnya bahwa jika saya terpilih sebagai presiden, komunitas India dan Hindu akan memiliki teman sejati di Gedung Putih, dan saya dapat menjaminnya."

MENUMBUHKAN KEMITRAAN

Segera setelah perayaan Diwali-nya, Trump mengirim Menteri Luar Negeri A.S. saat itu Rex Tillerson untuk melakukan kunjungan pertamanya ke India. Putri dan penasihat Trump, Ivanka Trump, menyusul sebulan kemudian. Kedua utusan menyampaikan sentimen Trump kepada para pemimpin India. Putrinya memimpin delegasi A.S. yang terdiri dari 350 orang ke KTT Kewirausahaan Global tahunan kedelapan yang diresmikan oleh Perdana Menteri India di kota Hyderabad di bagian selatan India. Dalam pidatonya kepada lebih dari 1.500 pemimpin bisnis dari 150 negara di KTT yang diselenggarakan bersama dengan Departemen Luar Negeri A.S., Ivanka Trump mengatakan bahwa acara itu memberi kesaksian tentang kemitraan yang kuat dan hubungan ekonomi dan keamanan abadi antara India dan A.S., meskipun ada perbedaan dalam hal-hal seperti pergerakan orang, ketidakseimbangan perdagangan, dan visa.

Dalam kunjungannya ke India pada tur Asianya, Tillerson menegaskan di New Delhi: "Presiden Trump dan Perdana Menteri Modi berkomitmen, lebih dari pemimpin lain sebelum mereka, untuk membangun kemitraan ambisius yang bermanfaat tidak hanya bagi kedua demokrasi besar kita, tetapi negara-negara berdaulat lainnya yang bekerja menuju perdamaian dan stabilitas yang lebih besar."

"Samudra Pasifik dan Hindia telah menghubungkan kedua negara kita selama berabad-abad, dan ketika kita melihat 100 tahun ke depan, sangat penting bahwa Indo-Pasifik, kawasan yang sangat penting bagi sejarah bersama kita, tetap bebas dan terbuka," ungkap Tillerson.

Memperhatikan bahwa A.S. dan India adalah mitra global dengan konvergensi strategis yang semakin berkembang, dia menegaskan bahwa hal ini akan memiliki implikasi yang luas selama 100 tahun mendatang.

Tillerson menekankan kembali pidato yang diberikan Modi di depan Kongres A.S. pada Juni 2016 ketika dia, sebagai tanggapan terhadap

Perdana Menteri India Narendra Modi, kiri, dan Presiden A.S. Donald Trump berjabat tangan selama pertemuan bilateral pada KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada November 2017 di Manila, Filipina. THE ASSOCIATED PRESS

Atas, searah jarum jam: Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi, kiri, dan Perdana Menteri India Narendra Modi berjabat tangan sebelum pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di New Delhi yang merayakan 25 tahun hubungan kelompok itu dengan India. THE ASSOCIATED PRESS **Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, kiri, dan mitranya dari India, Narendra Modi, mengangkat tangan setelah upacara peletakan batu pertama untuk proyek kereta api berkecepatan tinggi di Ahmedabad, India, pada September 2017.** REUTERS **Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, kiri, dan Perdana Menteri India Narendra Modi saling menyapa sebelum pertemuan di Hyderabad House di New Delhi pada Januari 2018.** REUTERS

antusiasme Presiden A.S. saat itu Barack Obama dalam menyertakan India untuk membendung kebangkitan Tiongkok di Indo-Pasifik, telah menegaskan bahwa hubungan kuat antara kedua negara demokrasi itu bisa memastikan perdamaian, kemakmuran, dan stabilitas "dari Asia hingga Afrika dan dari Samudra Hindia hingga Pasifik." Penekanan berulang Modi mengenai komitmen India terhadap kebebasan dan demokrasi berfungsi sebagai pengingat bahwa negaranya menawarkan Washington mitra yang berpikiran serupa di kawasan yang semakin merisaukan, dan bahwa India memberi Asia sebuah model untuk pembangunan dan kemajuan yang lebih kompatibel dengan nilai-nilai Amerika. Obama juga telah menyatakan hubungan dua arah itu untuk menjadi "kemitraan yang menentukan di abad mendatang," dan menyebut India sebagai "pusat pengaruh abad ke-21."

KTT ASEAN

Modi dan Trump, yang bertemu pada November 2017 di sela-sela KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) ke-31, yang diselenggarakan di Manila, Filipina, membahas komitmen bersama mereka terhadap kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Mereka berjanji untuk meningkatkan kerja sama mereka sebagai mitra pertahanan utama, memutuskan bahwa kedua negara demokrasi terbesar di dunia itu juga harus memiliki militer terbesar di dunia. India, pembeli senjata terbesar di dunia, adalah importir utama alutsista militer Amerika dan melakukan lebih banyak latihan militer dengan A.S. dibandingkan dengan negara lain.

Kedua pemimpin itu bertemu sehari setelah para pejabat dari negara mereka serta Australia dan Jepang membahas upaya formalisasi aliansi kuadrilateral — yang dikenal sebagai quad — dengan tujuan menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap "bebas, terbuka, dan inklusif." Quad dipandang sebagai penyeimbang bagi Tiongkok di daerah pesisir, yang mendorong juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Geng Shuang untuk menyatakan bahwa

proposal semacam itu harus "menghindari memolitisasi atau mengecualikan pihak-pihak terkait" dan tidak boleh "diarahkan pada pihak ketiga."

Sebelum pertemuannya dengan Presiden Trump, Modi mengatakan, "saya ingin meyakinkan Anda bahwa apa pun harapan dunia terhadap India, dan apa pun harapan A.S., India telah melakukan upaya habis-habisan untuk memenuhi harapan tersebut, dan akan terus melakukannya." Tillerson sebelumnya mengatakan bahwa Tiongkok, meskipun mengalami kebangkitan bersama dengan India, telah melakukannya dengan kurang bertanggung jawab, kadang-kadang merongrong tatanan berbasis aturan internasional sedangkan negara-negara seperti India beroperasi dalam kerangka kerja yang melindungi kedaulatan negara-negara lain. Dia menambahkan bahwa tindakan provokatif Tiongkok di Laut Cina Selatan menentang secara langsung hukum internasional.

Dalam geopolitik saat ini, India memprioritaskan Asia Tenggara dalam kebijakan luar negerinya ketika India menyelesaikan 25 tahun kemitraan dialog, 15 tahun interaksi tingkat KTT, dan lima tahun kemitraan strategis dengan ASEAN. India secara tradisional mengundang kepala negara atau pemerintah asing ke perayaan Hari Republiknya setiap Januari dan untuk pertama kalinya mengundang para pemimpin dari ke-10 negara ASEAN ke peringatan baru-baru ini.

New Delhi bernegosiasi dengan ASEAN untuk memperluas rencana pembangunan jalan raya India-Myanmar-Thailand sepanjang 1.360 kilometer ke Laos, Kamboja, dan Vietnam. "Setelah kita terhubung, kita memiliki potensi luar biasa dalam hal peningkatan PDB [produk domestik bruto]," ungkap Dakshita Das, sekretaris bersama Kementerian Transportasi Jalan dan Jalan Raya India. "Konektivitas dapat menghasilkan peningkatan PDB sekitar 1,02 kuadriliun rupiah (70 miliar dolar A.S.) setiap tahun dan peningkatan ketenagakerjaan agregat sebesar 291,5 miliar rupiah (20 juta dolar A.S.) pada tahun 2025."

ASEAN, dengan PDB gabungan 37,3 kuadriliun rupiah (2,56 triliun dolar A.S.) dan populasi 639 juta, terletak di sekitar India, dengan beberapa negara anggotanya berbagi perbatasan laut dengan India, sementara itu Myanmar juga berbagi perbatasan darat dengan India.

Blok bangsa-bangsa ini — didirikan pada 8 Agustus 1967, di Bangkok, lewat penandatanganan Deklarasi ASEAN (Deklarasi Bangkok) — mencakup Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. ASEAN memiliki perbatasan pesisir yang diliputi ketegangan dengan Tiongkok yang bersikap konfrontatif yang bertekad untuk mendominasi Laut Cina Selatan dan Timur dan sekitarnya, dan Korea Utara yang keras kepala yang memamerkan kekuatan persenjataan nuklir dan konvensionalnya. Klaim kedaulatan Beijing atas kawasan itu telah memicu perselisihan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei pada rangkaian kepulauan Paracel dan Spratly dan juga dengan Filipina pada Scarborough Shoal.

PENYELARASAN EKONOMI

New Delhi juga berusaha menyelaraskan proposal lini kreditnya senilai 14,6 triliun rupiah (1 miliar dolar A.S.) bagi ASEAN untuk mempromosikan proyek-proyek yang mendukung konektivitas laut, udara, jalan, dan digital dengan Rencana Induk Konektivitas ASEAN 2025 yang menyangkut infrastruktur berkelanjutan, inovasi digital, aliran logistik yang lancar, keunggulan regulasi, dan mobilitas orang. India juga menyiapkan dana pengembangan proyek sebesar 1,12 triliun rupiah (77 juta dolar A.S.) untuk membangun pusat manufaktur di Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietnam. Negara itu telah bekerja dengan Myanmar di bidang keamanan perbatasan, pengembangan infrastruktur dan kelembagaan, peningkatan kemampuan, dan proyek konektivitas.

Trump memilih platform Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik yang dilaksanakan setelahnya di Da Nang, Vietnam, untuk menguraikan strategi baru bagi Asia yang berfokus pada perluasan kerja sama antara A.S., India, Jepang, dan Australia. "Saya mendapat kehormatan untuk membagikan visi kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," ungkapnya kepada para delegasi. "Kami telah menjadi teman, mitra, dan sekutu di Indo-Pasifik dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan kami akan menjadi teman, mitra, dan sekutu dalam jangka waktu yang panjang."

Akan tetapi dia tidak menjelaskan kerangka kerja kebijakan untuk kawasan itu atau bagaimana upaya yang akan dimainkan oleh Amerika.

Pemerintahannya memang melihat ancaman yang muncul di Indo-Pasifik dari kebangkitan Tiongkok yang semakin keras kepala dan tegas, yang, dalam konteks lebih luas, menandakan pergeseran keseimbangan kekuasaan di kawasan itu. Pendirian New Delhi juga didorong oleh realisme karena India mewaspadai lonjakan ambisi Beijing, serta pusat konflik kepentingan di kawasan dengan impor geostrategis yang sangat besar ini.

Kemenangan besar Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dalam pemilu bulan Oktober 2017 akan terbukti penting karena dia telah secara terbuka mengecam agresi Beijing dan berniat merancang kembali Konstitusi damai negaranya untuk membuatnya lebih responsif secara militer terhadap situasi yang muncul di kawasan itu.

Sekitar waktu yang sama, Tiongkok mengadakan Kongres Partai Komunisnya yang tidak hanya memberikan posisi yang tidak perlu disangsikan pada Presiden Xi Jinping tetapi juga menyiratkan "era baru" kekuatan Tiongkok dan menjadikan Tiongkok sebagai negara adidaya global terkemuka pada tahun 2050.

India sudah menjadi bagian integral dari pergeseran kekuasaan besar abad ke-21 di Indo-Pasifik. Ketika India terus bekerja dengan negara dan organisasi lain untuk mengambil peran yang lebih besar di kawasan itu, India muncul sebagai penyeimbang utama bagi Tiongkok. □

BERBAGI INFORMASI

Kerja sama yang lebih baik di antara organisasi militer, sipil, dan kemanusiaan dapat meningkatkan manajemen data untuk upaya bantuan kemanusiaan

JOSEPH D. MARTIN

Di dunia yang diliputi oleh tantangan komunikasi, pembuatan, validasi, dan penyebaran informasi bukanlah salah satu tantangan yang dihadapi. Penggunaan sensor digital, satelit komersial, dan drone membanjiri platform komunikasi dengan lalu lintas data. Teknologi dan aktivitas manusia lainnya seperti crowdsourcing dapat membentuk informasi itu untuk menjawab pertanyaan dan tantangan yang relevan, tetapi sering kali jawabannya tertelan oleh banyaknya volume data.

Ini khususnya sangat relevan — dan sangat menantang — dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana (humanitarian assistance and disaster relief - HADR). Hubungan antara aktor sipil dan militer di lingkungan ini patut diberi perhatian khusus oleh karena masalah yang terkait dengan keamanan dan altruistis. Akan tetapi, agar terjadi tindakan yang berarti, para aktor militer dan sipil harus membuat perubahan signifikan dalam kebijakan kepercayaan dan keterbukaan mereka.

Dalam sebuah bencana, militer dunia sering kali menjadi organisasi penanggap yang memiliki sumber daya terbaik. Baik itu komunikasi, pengumpulan data, transportasi, atau komando dan kontrol, sering kali tidak ada analog sipil dengan kapasitas yang sama luasnya. Kerugian sumber daya yang signifikan ini adalah bahwa militer biasanya beroperasi dalam batas-batas hambatan protektifnya sendiri, entah itu hambatan fisik atau digital. Data dikumpulkan, dan informasi dibagikan sebagai tanggapan terhadap kebutuhan militer yang spesifik dan jarang mempertimbangkan penggunaan informasi tersebut di luar militer.

Demikian pula, organisasi sipil atau kemanusiaan mengumpulkan dan membagikan informasi mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka selama pemberian tanggapan. Contohnya mencakup lembaga pemerintah lainnya, bisnis swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai organisasi internasional dan regional. Kemajuan teknologi terbaru bahkan memungkinkan individu dan pemain tim kecil yang digerakkan oleh teknologi untuk menggunakan keahlian unik mereka untuk membantu orang lain, sering kali secara mendadak.

Kepentingan Bersama

Pengalaman yang disampaikan oleh praktisi selama acara militer, pertemuan gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan bahkan interaksi akademik menunjukkan adanya perbedaan dalam metode dan kapasitas pengumpulan, tetapi ada kesediaan atau kemampuan bersama untuk berbagi. Segera setelah terjadinya bencana berskala besar, informasi mengalir dari sumber yang tak terhitung jumlahnya: militer, lokal dan asing, mengumpulkan foto dan data intelijen; LSM lokal mengumpulkan laporan langsung dan foto di lapangan; dan umpan media sosial mengisi Twitter, Facebook, dan aplikasi lain dengan pelaporan mandiri seketika. Volume data terus bertambah, dan mekanisme pembagian khusus bencana bermunculan berdasarkan platform berbagi data dan aplikasi lokal yang lebih disukai.

Teknolog dari seluruh dunia secara independen menambang metadata itu dari umpan media sosial dan menghasilkan produk yang sesuai. Peta intensitas muncul, dan berbagai titik panas ditriangulasi dan diverifikasi. Produk-produk yang dikompilasi ini menambah aliran data yang terus tumbuh, yang, pada tingkat makro, bisa jadi berlimpah ruah.

Akan tetapi, pada level mikro, juga ada tantangan. Dalam sekejap, pesawat pengintai A.S. yang melakukan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana terbang di atas kota untuk mengambil foto kehancuran. Foto tersebut kemudian disterilkan dari setiap metadata terkait informasi rahasia dan dirilis ke negara yang terkena dampak dan ditempatkan pada sistem seperti Jaringan Akses Semua Mitra (All Partners Access Network -

Tentara Tiongkok dan A.S. bekerja bersama selama pelatihan bantuan bencana gabungan di Kunming, provinsi Yunnan. AFP/GETTY IMAGES

APAN) Departemen Pertahanan A.S. Tak lama kemudian, LSM di lapangan masuk ke daerah itu untuk melayani para penerima bantuan utama mereka.

Orang-orang makan di kamp bantuan banjir di West Bengal, India. REUTERS

Tantangan pada skenario ini sangat luas:

- Dengan komunikasi yang terdegradasi, banyak analisis teknologi dapat tertunda dalam mendapatkan data yang cukup dan/atau menyampaikannya kepada konsumen di lapangan.
- Deklasifikasi dan kerangka waktu untuk aset militer dapat melebihi relevansi dari foto yang diambil.
- Jika foto militer itu disterilkan dan tersedia, LSM mungkin tidak bersedia menggunakannya karena takut kehilangan prinsip netralitas kemanusiaan mereka, terutama di zona tempur. Atau mereka mungkin tidak mempercayai data itu jika sumbernya disamarkan dan tidak dapat diverifikasi lagi.

Dengan banjirnya informasi ini — dalam skala besar atau dengan satu foto — sangat penting untuk menyadari bahwa data dan foto hanya berguna jika konsumen dapat melakukan analisis yang diperlukan. Contohnya, dengan dukungan analitis yang tepat, sebuah foto dari daerah perkotaan yang terkena dampak dapat melayani kebutuhan tim pencarian dan penyelamatan untuk mengetahui fasilitas yang rusak dan kebutuhan UNICEF dan LSM lain yang berfokus pada anak-anak untuk mengetahui kondisi sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah tersebut dapat digunakan oleh manajer tempat penampungan untuk para pengungsi. Tim teknik dapat menentukan kondisi jalan, jaringan listrik, dan instalasi pengolahan air dan limbah. Tenaga medis dapat menentukan berapa banyak tempat tidur yang diperlukan. Selain itu, rincian titik pengumpulan populasi serta jumlah korban tewas dan terluka dapat dipastikan. Enam, 10, atau 100 orang dapat melihat foto yang sama dan menemukan jawaban atas pertanyaan mereka masing-masing jika mereka dapat menganalisis foto itu untuk mendapatkan informasi yang relevan.

Akan tetapi, ada masalah kepercayaan yang signifikan dengan pembagian data dan tantangan historis seperti tantangan yang dianut dalam mantra militer yaitu memiliki "kebutuhan untuk tahu." Banyak yang telah menyatakan keuntungan dari peralihan ke basis "kebutuhan untuk berbagi," tetapi itu adalah diskusi terpisah.

Dalam contoh foto perkotaan di atas, fakta yang diperoleh di lapangan dari LSM setempat dan penyedia layanan lokal dapat memperjelas banyak masalah yang teridentifikasi, tetapi tidak ada mekanisme yang diketahui untuk memasok sistem pusat. Jenis data tambahan dapat menambah kejelasan dengan melengkapi umpan media sosial, foto langsung, dan bahkan masukan urun daya (crowdsourcing). Sayangnya, bahkan ide penyimpanan pusat untuk data bencana penuh

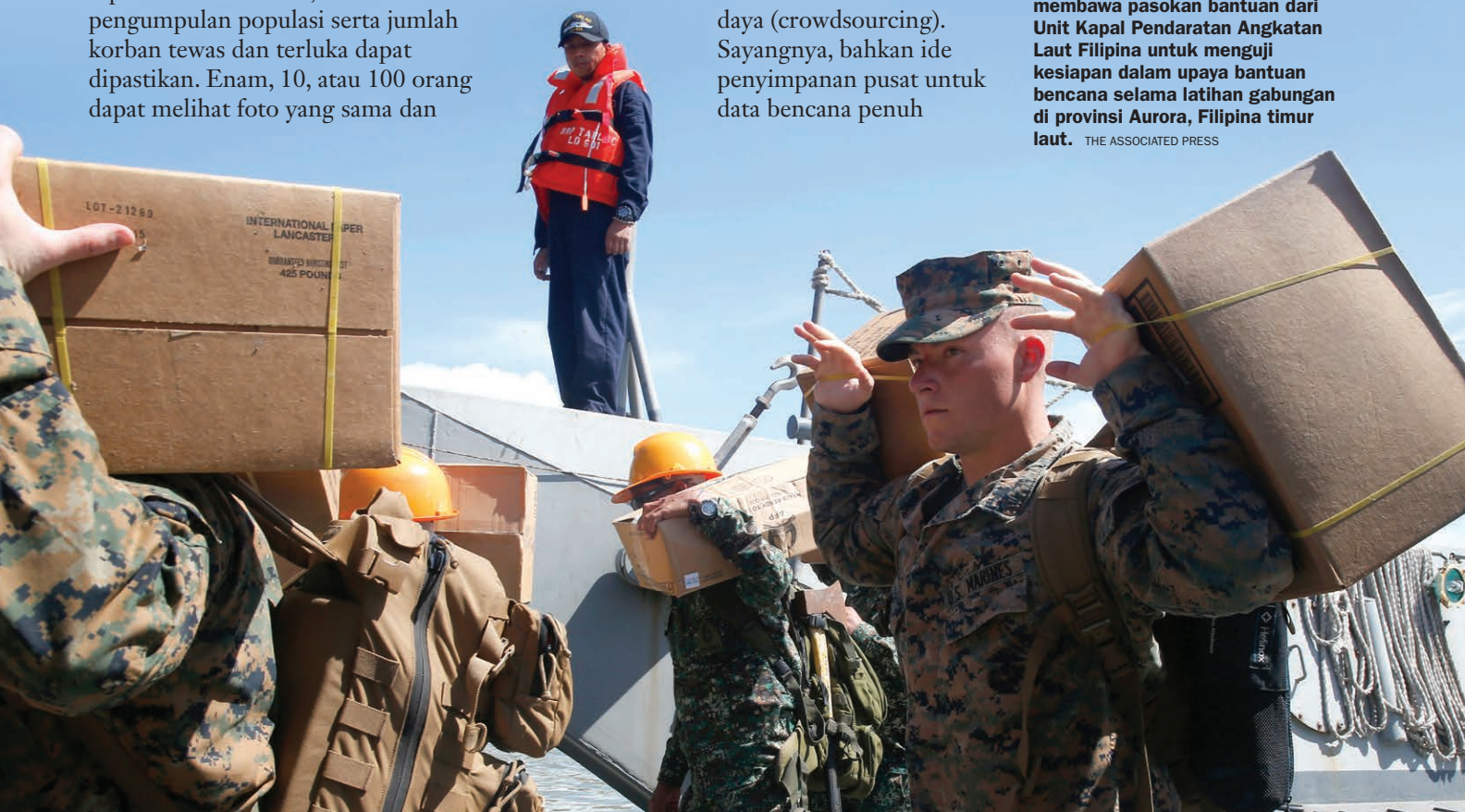

Pasukan Filipina dan A.S. membawa pasokan bantuan dari Unit Kapal Pendaratan Angkatan Laut Filipina untuk menguji kesiapan dalam upaya bantuan bencana selama latihan gabungan di provinsi Aurora, Filipina timur laut. THE ASSOCIATED PRESS

dengan masalah kepercayaan, teknologi, dan "tidak berasal dari sini." Hitungan cepat menunjukkan ada lebih dari 20 sistem yang tersedia di lingkungan terbuka (APAN adalah salah satunya), dengan lebih banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya di tingkat individu.

Membangun Kepercayaan

Yang dibutuhkan adalah katalisator untuk mendorong komunitas sipil-militer, yang didedikasikan untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan, untuk memperluas pandangannya tentang pembagian informasi di antara tim peserta yang berkisar dari seseorang yang melakukan kebajikan hingga penanggap pertama lokal dan nasional, LSM, dan militer lokal dan asing.

Kita berada di era teknologi ketika anggapan itu dimungkinkan dan berkelanjutan. Dimungkinkan untuk menciptakan lingkungan pembagian informasi — di luar platform belaka — yang memungkinkan pembagian tepercaya tidak hanya data tetapi juga kemampuan pencarian untuk mencari jawaban secara efisien tanpa menduplikasi permintaan foto atau data yang telah dijawab orang lain.

Tantangan yang melekat dimulai dengan kepercayaan dan standar. Terlepas dari landasan kemanusiaan dari banyak kelompok bantuan bencana yang berpola pikir sipil, masing-masing organisasi biasanya pada dasarnya tidak saling percaya satu sama lain dan tentu saja tidak percaya pada militer atau lembaga pemerintah. Sering kali, kemampuan LSM untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan didasarkan pada kemampuan ceruknya untuk melayani kebutuhan yang diberikan, dan "memberikan" jawaban atau data itu menempatkan keberadaannya dalam risiko. Demikian pula, penyedia data pemerintah biasanya berada di dunia tempat kepercayaan untuk berbagi data dengan bebas telah bekurang — terutama ketika musuh yang dirasakan atau nyata dapat menggunakan data itu untuk menimbulkan kerugian.

Bagaimana suatu entitas akan mampu membagikan dan mengintegrasikan data, informasi, dan pengetahuan dari berbagai sistem dan kemudian memberikan jawaban atas jumlah pertanyaan yang jauh lebih besar menghadirkan tantangan yang tampaknya tak kenal lelah. Seiring berkembangnya data besar (big data) dan kecerdasan buatan (AI), tantangan-tantangan ini dapat diatasi. Mungkin organisasi yang dipercaya, yang bukan militer atau kemanusiaan, dapat mengisi kesenjangan ini dengan menyediakan keahlian dalam pengumpulan dan analisis informasi, sambil mempertahankan kepercayaan dari semua pihak yang terlibat.

Masalahnya bukan kurangnya data. Masalahnya adalah kurangnya berbagi, kurangnya kemampuan untuk menganalisis informasi mentah, kurangnya kepercayaan antara pencipta data dan organisasi yang menerimanya, dan tidak adanya organisasi untuk mengisi kesenjangan di antara mereka. Masing-masing tantangan ini memiliki solusi, tetapi tetap menjadi tanggung jawab masyarakat untuk memutuskan kapan mereka ingin menanganinya. □

Tim penyelamat dari Jepang membantu pencarian korban di bangunan apartemen yang runtuh setelah gempa berkekuatan 6,4 skala Richter menghantam Hualien County, Taiwan timur, pada Februari 2018. THE ASSOCIATED PRESS

REUTERS

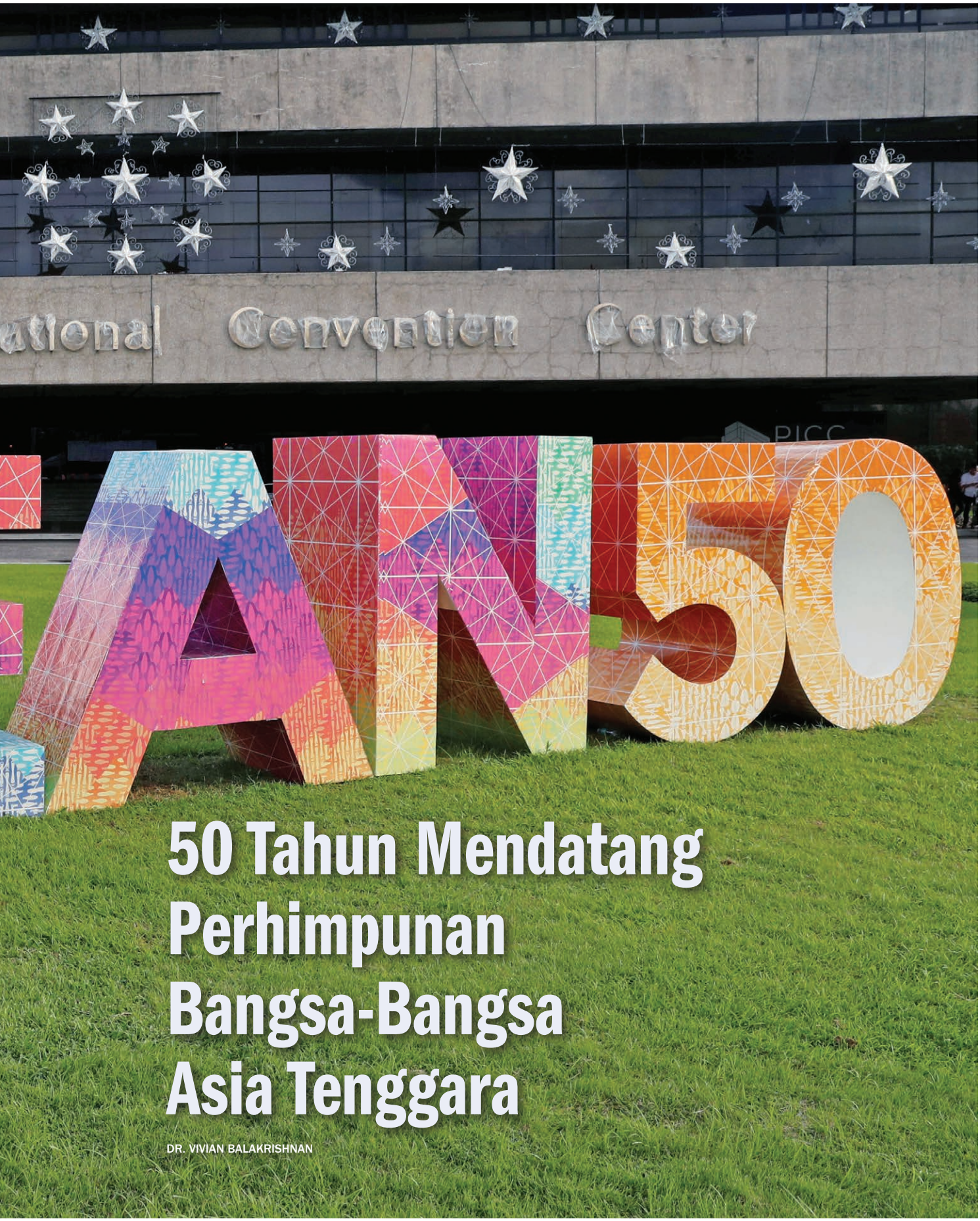

50 Tahun Mendatang Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara

DR. VIVIAN BALAKRISHNAN

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berada pada titik perubahan saat ini, dan bukan hanya karena berusia 50 tahun — tetapi karena dunia secara keseluruhan telah berubah, dan kita hidup di masa yang tidak pasti.

Keseimbangan geostrategis telah berubah secara dramatis. Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia, 2 miliar orang tiba-tiba berada dalam jaringan dan terhubung ke ekonomi global pada saat yang sama. Tidak pernah ada ratusan juta orang diangkat dari kemiskinan menjadi kelas menengah yang sedang naik daun. Kita telah melihat transformasi ini terjadi sejak tahun 1978 di Tiongkok dan tahun 1991 di India. Meningkatnya kekuatan ekonomi tentunya berarti meningkatnya pengaruh diplomatik dan militer. Jadi, tidak diragukan lagi bahwa seluruh keseimbangan geostrategis, dan banyak asumsi dan praduga yang kita abaikan, tidak lagi berlaku.

Institusi ekonomi dan politik dipertanyakan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan pekerjaan saat ini berisiko menjadi usang. Tantangan sebenarnya bukanlah membangun tembok atau bukan hanya merombak akumulasi kekayaan masa lalu. Tantangan sebenarnya adalah untuk memastikan bahwa rakyat kita

Menteri Luar Negeri Singapura Dr. Vivian Balakrishnan memberikan pidato pada ASEAN Lecture ke-15. REUTERS

memiliki keterampilan yang tepat untuk pekerjaan baru itu dan bahwa metode produksi baru didemokratisasikan dan dikomoditisasikan sehingga kelas menengah baru dapat bangkit, tanpa ada yang tertinggal.

Tata dunia global kita sedang dibentuk kembali oleh munculnya aktor-aktor non-negara dan tantangan lintas batas, termasuk terorisme, kejahatan siber, dan perubahan iklim. Fenomena ini tidak terbatas pada batas geografis yang rapi dan tidak beroperasi dalam konsep yang lazim dari sistem negara bangsa Westphalia. Satu-satunya cara untuk menghadapi ancaman global lintas batas ini adalah dengan mengumpulkan konsensus global dan aksi global, baik Anda berurusan dengan siber, iklim, atau terorisme. Kasus yang relevan di Asia Tenggara adalah kembalinya para pejuang dari Irak dan Suriah, tempat ISIS [Negara Islam Irak dan Suriah] telah kehilangan daerah kekuasaan. Kita melihat lebih banyak lagi pejuang yang kembali di Marawi, di Filipina selatan. Ada lahan subur potensial lainnya bagi teroris di kawasan kita. Lebih dekat di kampung halaman, kami bahkan melihat seorang warga Singapura dalam video perekrutan ISIS. Kekhawatiran kita tentang masalah di negara bagian Rakhine juga terkait dengan kecemasan kita bahwa tempat itu menjadi tempat perlindungan lainnya, sarang lainnya, untuk ekstremisme dan terorisme. Jadi, implikasinya di sini adalah bahwa masalah-masalah semacam ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya secara lokal, dan tidak ada satu pun negara yang dapat menyelesaikannya sendirian. Lebih banyak upaya kolektif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Proses multilateral global — Hukum Laut, perubahan iklim, menjaga warisan alam umat manusia — semua hal ini menjadi lebih menonjol. Kita membutuhkan pendekatan itu — yaitu rasa saling menghormati, interdependensi, dan kerja sama multilateral.

MEMILIKI KINERJA YANG LEBIH BAIK

Pada akhirnya, ASEAN harus menghadapi tantangan internalnya sendiri. Ke-10 negara anggota ASEAN sangat beragam dalam hal sistem politik, ekonomi, dan sosial kita. Bahkan, saya percaya kita mungkin kelompok yang paling beragam di dunia. Anda memiliki 10 negara yang sangat berbeda — dalam ukuran, populasi, agama. Kita punya sistem politik yang berkisar dari monarki absolut hingga demokrasi hingga pengaturan militer.

Banyak yang telah ditanyakan mengenai kebiasaan konsensus ASEAN ini — mencari konsensus — dan apakah ini adalah kesalahan atau fitur desain. Pada faktanya, hal itu merupakan fitur desain. Fitur itu dirancang oleh karena keragaman yang besar di dalam ASEAN, dan konsensus adalah mekanisme yang diperlukan untuk mengamankan diri dari gangguan. Konsensus memastikan bahwa setiap anggota — terlepas dari ukuran, politik, kondisi pembangunan ekonomi — memiliki suara yang setara. Cara lain untuk mengungkapkannya: Setiap anggota memiliki hak veto.

Konsensus memaksa kita untuk mengambil pandangan jangka panjang yang terukur terhadap kepentingan nasional kita sendiri sehubungan dengan kepentingan regional jangka panjang yang lebih besar. Bisa dikatakan, bahwa proses yang agak lamban dan lebih melelahkan untuk mencapai konsensus tetap memungkinkan kita untuk mencapai solusi yang lebih berkelanjutan. Karena Anda tahu bahwa ketika kita telah menandatanganinya, semua orang telah memikirkannya, membahas implikasinya, dan telah setuju untuk mendukungnya. Konsensus adalah fitur desain dan merupakan fondasi kesatuan ASEAN. Akan tetapi, pertanyaan mendasar, kapan pun peristiwa dan tantangan muncul, adalah sejauh

mana kita dapat membuat pertukaran yang optimal antara mengejar kepentingan nasional kita sendiri versus kepentingan regional jangka panjang yang lebih luas.

Terlepas dari tantangan yang kita hadapi — secara internal maupun eksternal — saya tetap optimis bahwa prospek kita cerah selama 50 tahun mendatang.

Juga patut diingat bahwa lima negara anggota pendiri ASEAN terdiri dari negara nonkomunis di Asia Tenggara. Dengan rasa kebersamaan dan menjalani dua hingga tiga dekade kritis pertama itu dengan perdamaian di antara kita dan waktu untuk berinvestasi dalam infrastruktur kita, berinvestasi pada masyarakat kita, dan untuk membuktikan bahwa model ekonomi keterbukaan, perdagangan, liberalisasi berjalan dengan baik. Bahkan, kita memiliki kinerja yang lebih baik. Saat ini, Anda menyebutnya globalisasi. Saat ini, hampir setiap kawasan di dunia beroperasi dengannya, meskipun seperti yang saya katakan sebelumnya, ada beberapa pertanyaan tentang batas-batas globalisasi. Dan kita harus memberikan penghargaan kepada ASEAN yang berhasil mencegah perang di antara anggota awalnya, dan kemudian ketika kami memasukkan Vietnam pada tahun 1995, Laos dan Myanmar pada tahun 1997, dan kemudian Kamboja pada tahun 1999. Gagasan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tidak ada konflik, peperangan, atau pertempuran yang nyata di antara negara-negara anggota ASEAN. Dan di era dan masa sekarang ini, ini merupakan pencapaian yang patut disyukuri.

Juga patut diingat bahwa salah satu kampanye diplomatik paling terkenal ASEAN adalah setelah intervensi Vietnam di Kamboja pada tahun 1979. ASEAN melawan kearifan konvensional di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada saat itu. Namun demikian, ASEAN bersatu dan mengajukan gagasannya — bahwa kita tidak mendukung atau menoleransi intervensi asing, dan kita ingin menegaskan hak penentuan nasib sendiri bagi negara-negara anggota kita. Sekali lagi, seperti yang saya katakan, melawan kearifan konvensional, melampaui zamannya, tetapi kita berhasil. Dan ketika Perang Dingin berakhir, yang pada gilirannya mengarah pada ekspansi ASEAN, intinya di sini adalah bahwa jika Anda memikirkannya, pembentukan ASEAN, pertumbuhan ASEAN, dan tantangan ASEAN selalu berkaitan dengan apa yang terjadi di panggung global.

KESATUAN DAN SENTRALITAS ASEAN

Jadi, kembali ke gagasan ini bahwa kebutuhan kita untuk mencapai konsensus dan kebutuhan kita akan kesatuan untuk mempertahankan sentralitas dan relevansi kita di seluruh dunia selalu memberikan pengaruh. Patut dicermati skenario sebaliknya. Jika ASEAN belum terbentuk, jika kita tidak bersikeras pada konsensus sebagai fitur desain, saya kira skenario yang berlawanan untuk Asia Tenggara dalam 50 tahun terakhir tanpa ASEAN adalah bahwa kita akan menjadi kumpulan negara

Para menteri luar negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara saling berjabat tangan "Khas ASEAN" pada upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-50 di Philippine International Convention Center di Manila, Filipina. Dari kiri, Anifah Aman dari Malaysia, U Kyaw Tin dari Myanmar, Don Pramudwinai dari Thailand, Pham Binh Minh dari Vietnam, Alan Peter Cayetano dari Filipina, Vivian Balakrishnan dari Singapura, Lim Jock Seng dari Brunei, Prak Sokhonn dari Kamboja, Retno Marsudi dari Indonesia, Saleumxay Kommasith dari Laos, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Le Luong Minh.
THE ASSOCIATED PRESS

Aspirasi Singapura sebagai Ketua ASEAN*

FOKUS PADA PERNIAGAAN ELEKTRONIK (E-COMMERCE):
Kita berharap dapat membangun Jaringan Kota Cerdas ASEAN. Jaringan ini akan menghubungkan orang dan ekonomi dengan lancar; jaringan ini akan memungkinkan ide dan solusi mengalir di seluruh kawasan kita.

MEMBANGUN KETAHANAN
Kita berharap untuk membangun dan meningkatkan ketahanan kolektif terhadap ancaman bersama seperti terorisme, ekstremisme kekerasan, dan kejahatan transnasional. Kita harus meningkatkan kolaborasi di bidang keamanan siber, dan untuk melangkah lebih cepat, karena Anda tidak dapat memiliki dunia yang lebih cerdas, Anda tidak dapat memiliki perniagaan elektronik, Anda tidak dapat memiliki transaksi digital tanpa hambatan jika Anda tidak memiliki keamanan siber. Kita akan membutuhkan rezim keamanan siber yang tangguh untuk memberikan jaminan dan peluang bagi rakyat kita dan bisnis kita. Kita juga akan bekerja untuk menyelesaikan Model Perjanjian Ekstraksi ASEAN, yang akan menjadi langkah penting dalam memperkuat supremasi hukum regional.

BERINVESTASI PADA MANUSIA
Enam puluh persen populasi ASEAN yang jumlahnya 628 juta orang berusia di bawah 35 tahun. Baru saja, saya merujuk masalah kekeringan demografis yang telah terjadi di Asia Timur Laut dan di beberapa bagian Eropa. Kenyataan bahwa penduduk ASEAN masih muda dan kita belum memanen bonus demografi kita merupakan sumber peluang besar. Namun, dan ada persyaratannya, generasi muda adalah sumber peluang dan inspirasi besar jika kita memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang relevan dan bahwa pemerintah telah berinvestasi dalam infrastruktur terbaru dan terkini, dan sistem sosial, politik, dan ekonomi kita memberi masyarakat kesempatan dan peluang yang adil. Jika kita dapat mencapainya, maka penduduk ASEAN yang masih muda, dengan populasi yang lebih besar dari Eropa, di kawasan damai, dan kawasan yang menghubungkan Asia Timur Laut, Asia Selatan termasuk India, Australia, dan Selandia Baru, dan di seluruh Pasifik, kita berada di tengah-tengah semua aktivitas dunia.

MENINGKATKAN KEMITRAAN EKONOMI
Kita ingin memberi setiap orang andil yang lebih besar dalam kemakmuran berkelanjutan di kawasan kita. Ketika kita bertemu negara adikuasa, kalimat yang biasanya saya ungkapkan kepada mereka adalah: Kesuksesan ASEAN merupakan kepentingan jangka panjang Anda sendiri, karena ASEAN pada akhirnya akan menjadi mitra dagang terbesar Anda; ASEAN akan menjadi peluang investasi besar Anda. Kata kuncinya, konsep kunci di balik ini, adalah interdependensi. Kita percaya bahwa cara untuk mengamankan perdamaian adalah untuk mempromosikan interdependensi dan kemudian memberi tahu semua pihak bahwa Anda mendapatkan lebih banyak dengan bekerja sama, dengan berinvestasi dalam satu sama lain, dengan berdagang dengan satu sama lain — hasil yang saling menguntungkan. Karena skenario sebaliknya adalah membagi dunia menjadi blok saingan, bersikeras pada kemerdekaan sempit, terlibat dalam persaingan yang tidak menguntungkan, dan pada akhirnya perang boneka. Jadi, interdependensi ekonomi dan politik merupakan resep kita untuk perdamaian dan kemakmuran.

Oleh karena itu, kita akan meningkatkan upaya kita untuk mencapai Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership - RCEP) berkualitas tinggi. Ini adalah pakta perdagangan bebas yang mencakup ke-10 negara ASEAN dan enam mitra ASEAN yang telah memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN. Keenam mitra itu adalah Tiongkok, India, Australia, Selandia Baru, Korea, dan Jepang. Jika kita menyatukan semua ini, Anda melibatkan lebih dari 30 persen produk domestik bruto global dan sekitar 40 persen populasi global. Tentu saja, tujuan jangka panjang kita adalah untuk mencapai kawasan perdagangan bebas di Asia-Pasifik. Apakah Anda berbicara tentang RCEP atau Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership - TPP), bagi kita, keduanya hanyalah beberapa jalan yang mengarah ke tujuan yang lebih besar.

MENINGKATKAN PELUANG BISNIS
Kita juga akan meningkatkan peluang bisnis regional, terutama untuk usaha kecil dan menengah, dengan mendukung jendela tunggal ASEAN dan rezim sertifikasi mandiri di seluruh ASEAN. Saya harus menambahkan bahwa perlu juga ditekankan bahwa pada KTT ASEAN baru-baru ini di Manila, ASEAN dan Tiongkok secara resmi mengumumkan dimulainya negosiasi untuk Pedoman Perilaku di Laut Cina Selatan. Ini sudah lama tertunda. Deklarasi Perilaku telah ditandatangani pada tahun 2002, sudah lama sekali. Ini adalah tanda yang sangat positif, sebuah ikon yang diinginkan oleh negara-negara ASEAN dan Tiongkok untuk mencapai perdamaian dan stabilitas, dan untuk memastikan bahwa Laut Cina Selatan tetap menjadi laut yang tenang. Ini sangat penting karena ini merupakan arteri penting untuk perdagangan bebas, dan perdagangan bebas sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan transformasi kawasan kita.

* Perdana Menteri Lee Hsien Loong memperkenalkan prioritas Singapura sebagai ketua ASEAN yang akan datang pada November 2017. Vivian Balakrishan mengulanginya selama ASEAN Lecture ke-15 pada 5 Desember 2017.

boneka dan negara bawahan bagi negara adidaya saat ini. Dan hal itu tidak akan menjadi resep untuk perdamaian, kemakmuran, dan transformasi ekonomi yang telah kita saksikan selama 50 tahun terakhir. Oleh karena itu, kesatuan dan sentralitas ASEAN merupakan kunci kelangsungan hidup kita. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, ASEAN saat ini merupakan sekoci bagi 10 negara anggota untuk berkumpul bersama, bekerja bersama, dan membuat suara kita terdengar di panggung global.

Sangat penting bahwa kita tidak melanggar solidaritas, dan kita tidak mengorbankan kebaikan regional jangka panjang demi kepentingan nasional jangka pendek yang lebih sempit. Jika tidak, tidak ada yang akan mempertimbangkan kita dengan serius.

Saya selalu kagum pada KTT ASEAN dan [KTT Asia Timur] bahwa para pemimpin dari Amerika, Tiongkok, Rusia, Australia, Selandia Baru, India semuanya berupaya untuk datang dan berinteraksi dengan kita. Jika ASEAN tidak berhasil, jika ASEAN tidak bersatu, jika ASEAN tidak penting, saya kira para pemimpin itu tidak akan berupaya untuk datang dan menjumpai kita setiap tahun. ASEAN yang tetap kredibel, relevan, dan sentral merupakan keharusan bagi kita. Mendapatkan keseimbangan yang tepat antara menekankan kesatuan regional sambil tetap menjaga kepentingan nasional jangka panjang kita juga berada di tangan kita, di tangan para pemimpin kita.

ASEAN selalu akan terpengaruh oleh apa yang terjadi secara eksternal. dan sejarah singkat kita selama 50 tahun telah mengilustrasikan hal itu. Tantangannya adalah apakah kita membiarkan tsunami eksternal ini membanjiri kita, memisahkan kita, atau apakah kita secara kolektif membangun kapal yang lebih besar dan kuat yang akan memungkinkan kita untuk keluar dari bahaya dan memperluas peluang bagi semua rakyat kita. Kita membutuhkan dan kita ingin ASEAN mampu beradaptasi, dan kita ingin ASEAN untuk menangkap peluang baru yang akan dibawa oleh revolusi digital yang sedang berlangsung dan merumuskan cara-cara inovatif untuk menghadapi tantangan baru ini, terutama tantangan lintas batas yang telah saya uraikan sebelumnya.

Itulah sebabnya Singapura, sebagai ketua ASEAN, ingin berfokus untuk memperkuat ketahanan ASEAN dan memperluas kapasitas inovatif kita. Ketahanan dan inovasi akan mendukung kerja sama di ketiga pilar komunitas ASEAN di bawah kepemimpinan kami.

Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj, kanan, menyambut rekannya Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, di New Delhi, India.
THE ASSOCIATED PRESS

Kita telah berkembang dengan pesat. Ada banyak yang harus disyukuri, banyak hal yang bisa dibanggakan. Tantangan yang kita atasi juga merupakan pengingat yang bermanfaat — pengingat bahwa ASEAN akan selalu terkena kekuatan eksternal, dan kita harus menerima dunia ini seperti apa adanya dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Ini adalah pengingat bahwa akan selalu ada ganjaran untuk mempertahankan kesatuan ASEAN agar kita tetap relevan dan memberi kebenaran pada konsep sentralitas ASEAN ini. Ini juga merupakan pengingat agar kita tetap menjadi kawasan dengan potensi yang luar biasa. Mencapai potensi itu akan mengharuskan kita memperhatikan beberapa hal mendasar dan mendapatkan keseimbangan yang tepat — antara melindungi kesatuan dan relevansi regional sementara pada saat yang sama memajukan kepentingan nasional jangka panjang kita sendiri.

Prospek kita tetap cerah. Singapura, sebagai ketua ASEAN, akan melakukan upaya terbaik ketika ASEAN membuat langkah pertama ke dalam 50 tahun ke depan menuju masa depan yang cerah yang dituntut dan diharapkan rakyat kita. □

Artikel ini dikutip dari pidato yang disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura Dr. Vivian Balakrishnan pada ASEAN Lecture ke-15, "ASEAN: Next 50," di Institute of Southeast Asian Studies-Yusof Ishak Institute di Singapura pada 5 Desember 2017. Artikel ini telah diedit supaya panjangnya sesuai dengan format *FORUM*.

Anggota kelompok adat Amis menari selama festival panen tradisional di Hualien, Taiwan timur.

Festival perjodohan suku di Taiwan merayakan sebuah tradisi

Anak Perempuan Bertemu Anak Laki-Laki

KISAH DARI AGENCE FRANCE-PRESSE
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

Dikenal sebagai "Malam Kekasih," acara itu merupakan babak akhir dari festival panen tahunan di pemukiman milik suku Amis, suku terbesar dari 16 kelompok pribumi yang diakui di Taiwan.

Di dekat pantai timur berbukit pulau itu, desa Mataian merupakan kumpulan rumah-rumah sederhana pada dataran rendah di sepanjang jalan yang berliku-liku, terletak di lembah di antara dua pegunungan.

Festival panen biasanya berlangsung antara Juni dan Agustus, dengan setiap desa menyelenggarakannya pada waktu yang berbeda.

Festival itu merupakan perayaan terbesar dan terpenting bagi suku Amis. Di Mataian, festival itu mencapai puncaknya ketika perempuan lajang memilih bujangan yang mereka idamkan.

Adat istiadat yang berusia berabad-abad itu merupakan cerminan dari sistem matriarkat suku itu, yang menetapkan bahwa perempuan membuat keputusan penting, termasuk mengelola keuangan, dan laki-laki menjadi anggota keluarga istri mereka.

Ketika para laki-laki yang bernyanyi dan menari mengatur langkah mereka, para perempuan bergerak di belakang laki-laki pilihan mereka dan menarik tas kain warna-warni yang tergantung di bahu target mereka.

Anggota laki-laki kelompok pribumi Amis berpartisipasi dalam ritual perjodohan kuno yang dikenal sebagai "Malam Kekasih."

Untuk menarik minat, para laki-laki menggeliat dan memamerkan otot-otot mereka, yang paling populer di antara mereka menghasilkan antrean perempuan yang tertarik. Jika seorang laki-laki membalas pendekatan tersebut, dia akan memberikan tasnya — yang dikenal sebagai alufo — kepada perempuan itu, menandai awal masa berpacaran.

Di masa lalu, ritual itu biasanya akan mengarah pada pernikahan dan bahkan sekarang masih memicu terjalinnya hubungan, tetapi juga merupakan kesempatan bagi anggota masyarakat Amis yang bekerja di kota-kota untuk kembali dan bersosialisasi.

"Malam Kekasih itu untuk menjalin pertemanan," ungkap Cheng Ying-hsuan, yang berusia awal 20-an.

Mengenakan pakaian tradisional merah yang dihiasi manik-manik hijau dan alufo yang dipayetnya sendiri, dia telah kembali ke desa itu dari kota Hualien, tempat dia sekarang tinggal, satu jam perjalanan jauhnya. Ditanya apakah dia berharap untuk menemukan kekasih, dia tertawa dan berkata dengan tersipu-sipu: "Mungkin juga."

Mataian merupakan salah satu pemukiman Amis terbesar dan merupakan kampung halaman bagi sekitar 500 orang, kebanyakan orang tua dan anak-anak.

"Kami menyukai suasana saat semua orang datang berkumpul bersama-sama dan kembali menjalin silaturahmi. Bagi kami ini yang paling penting," ungkap Liao Ching-tung, 28 tahun, yang tinggal di ibu kota, Taipei.

Setiap festival panen, ratusan orang yang telah pindah untuk bekerja atau belajar pulang ke kampung halaman untuk bergabung dalam perayaan itu. Masyarakat pribumi itu, yang tetap menjadi kelompok terpinggirkan di masyarakat Taiwan, telah melihat budaya tradisionalnya terkikis sejak para imigran mulai berdatangan dari daratan Tiongkok berabad-abad yang lalu.

Sejak Presiden Tsai Ing-wen berkuasa pada Mei 2016, pemerintahannya telah mendorong hak-hak pribumi yang lebih besar dan pelestarian bahasa dan budaya kesukuan.

Akan tetapi beberapa kelompok telah mengkritik Tsai karena tidak mengambil tindakan yang lebih jauh, dan mereka telah mengalami bentrok dengan otoritas terkait kebijakan hak atas tanah, menuntut agar wilayah leluhur mereka dikembalikan.

Di Mataian, tradisi masih hidup dan banyak dijalankan.

Lamen Panay, 41 tahun, yang menggunakan nama kesukuannya, mengatakan bahwa acara perjodohan itu masih berarti baginya meskipun dia tidak lajang lagi. Dia memiliki koleksi tas kekasih dari festival panen di masa lalu, tetapi sejak itu menjalani kehidupan yang stabil bersama kekasih yang sudah lama menjalin hubungan dengannya dan tinggal bersamanya di Taipei.

Pasangan itu sama-sama berasal dari desa tersebut, dan Lamen masih mengingat dengan jelas saat dia memilih kekasihnya selama ritual perjodohan itu. "Kami berdua biasanya sangat sibuk dengan pekerjaan," ungkapnya. "Perlu untuk menyalakan kembali percikan api cinta."

Norwegia Melejit Mendahului:

Lebih dari Setengah Penjualan Mobil Baru Sekarang Bertenaga Listrik atau Hibrida

Data pada Januari 2018 menunjukkan bahwa penjualan mobil listrik dan hibrida naik di atas separuh pendaftaran mobil baru di Norwegia pada tahun 2017, rekor yang dibantu oleh subsidi berlimpah yang memberikan keunggulan pada negara itu dalam peralihan dari mesin berbahan bakar fosil.

Federasi Jalan Norwegia (OFV) independen mengatakan bahwa mobil listrik murni dan hibrida, yang memiliki tenaga baterai dan motor diesel atau bensin, menyumbang 52 persen dari semua penjualan mobil baru pada tahun 2017 di Norwegia dibandingkan dengan 40 persen pada tahun 2016.

"Tidak ada negara lain yang mendekati catatan itu" dalam hal pangsa mobil listrik nasional, demikian yang dikatakan kepala OFV Oyvind Solberg Thorsen. "Untuk pertama kalinya kami memiliki pangsa pasar bahan bakar fosil di bawah 50 persen."

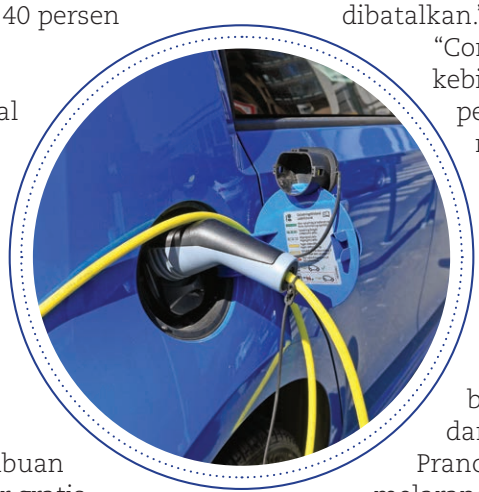

Norwegia membebaskan mobil listrik baru dari hampir semua pajak dan memberikan tunjangan yang dapat bernilai ribuan dolar per tahun dalam hal parkir gratis atau bersubsidi, pengisian ulang daya listrik, dan penggunaan jalan tol, feri, dan terowongan.

Norwegia juga menghasilkan hampir semua listriknya dari pembangkit listrik tenaga air, sehingga peralihan tersebut membantu mengurangi polusi udara dan potensi efek perubahan iklim.

Pada tahun 2017, Badan Energi Internasional mengatakan bahwa Norwegia berada jauh di depan negara-negara lain seperti Belanda, Swedia, Tiongkok, Prancis, dan Inggris dalam penjualan mobil listrik.

Penjualan mobil Norwegia pada tahun 2017 didominasi oleh Volkswagen Golf, BMWi3, Toyota Rav4, dan Tesla Model X. Tesla merupakan mobil listrik murni, dan yang lainnya memiliki versi listrik atau hibrida.

Di banyak negara, tingginya harga mobil yang digerakkan oleh baterai, jarak tempuh terbatas di antara pengisian ulang, dan waktu pengisian yang lama menghalangi ketertarikan pembeli. Produsen mobil mengatakan bahwa berbagai kelemahan itu berkurang seiring berjalannya waktu dengan model-model baru.

"Kami melihat Norwegia sebagai teladan bagi bagaimana mobilitas listrik dapat dipromosikan melalui insentif cerdas," ungkap seorang juru bicara di kantor pusat BMW Munich. "Situasinya mungkin akan berbeda jika insentif ini dibatalkan."

"Contoh bagus" lainnya dari kebijakan untuk memacu permintaan mobil listrik mencakup Inggris, California, dan Belanda, demikian ungkapnya.

Pada tahun 2017, parlemen Norwegia menetapkan sasaran yang tidak mengikat bahwa pada tahun 2025 semua mobil yang dijual tidak boleh mengeluarkan gas buang dari sumber tenaga terpasang. Prancis dan Inggris berencana untuk melarang penjualan mobil bensin dan diesel pada tahun 2040. Secara keseluruhan, penjualan mobil nol-emisi di Norwegia naik pada tahun 2017 menjadi 21 persen dari 16 persen pada tahun 2016.

Kebijakan mobil listrik Norwegia sulit untuk ditiru. Norwegia dapat memberikan subsidi berlimpah karena pendapatan tinggi negara itu dari produksi minyak dan gas telah membantu mengakumulasikan dana kekayaan negara terbesar di dunia, senilai 14,6 kuadriliun rupiah (1 triliun dolar A.S.).

Meskipun demikian, tunjangan itu membebani kondisi keuangan Norwegia. Anggaran negara senilai 1,3 triliun krona Norwegia memproyeksikan hilangnya pendapatan pajak sebesar 3 miliar krona setahun oleh karena mobil listrik. Reuters

KEHEBOHAN KUIS ONLINE TIONGKOK MENGGODA PENCARI HADIAH DAN RAKSASA TEKNOLOGI

Sepertinya mirip permainan yang dimenangkan semua orang: Beberapa perusahaan teknologi terbesar Tiongkok, yang mencari pelanggan baru, menggunakan hadiah uang tunai untuk menarik jutaan penantang ke acara kuis online berbasis seluler.

Hingga 6 juta orang sekaligus masuk ke permainan gratis langsung di ponsel cerdas mereka untuk menjawab serangkaian pertanyaan cepat dalam pertarungan eliminasi, dengan mereka yang masih bertahan mendapatkan bagian dari hadiah uang itu. Contohnya, *Baiwan Yingjia*, atau *Millions Winner*, permainan kuis online melalui aplikasi streaming langsung Huajiao, terlihat pada ponsel dalam foto pada Januari 2018 ini.

Raksasa mesin pencari Baidu Inc. dan pembuat video game NetEase Inc. meluncurkan acara online mereka sendiri, bergabung dengan platform umpan berita Toutiao, UCWeb yang dimiliki oleh Alibaba Group Holding Ltd., dan Wang Sicong, ahli waris miliarder Tiongkok Wang Jianlin.

Bagaimana mereka akan mendapatkan keuntungan dari permainan itu dan tetap lolos dari sensor pemerintah mungkin terbukti sebagai pertanyaan yang sulit dijawab. Permainan sepele itu telah menarik sejumlah kontroversi, diperketat dengan tindakan tegas yang lebih luas pada konten online selama tahun lalu di bawah Presiden Xi Jinping, dari streaming langsung dan blog hingga kampanye melawan kecanduan internet.

Pada Januari 2018, *Millions Winner*, yang didukung oleh perusahaan keamanan internet Qihoo 360, meminta maaf setelah dikecam oleh regulator akibat mencantumkan Taiwan dan Hong Kong, yang diklaim kedaulatannya oleh Tiongkok, sebagai negara independen dalam sebuah pertanyaan.

Bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang dari kehebohan itu juga belum jelas, meskipun beberapa perusahaan, seperti pengecer online JD.com Inc., telah mengikuti tren itu, mensponsori acara untuk membantu meningkatkan profil mereka. Banyak permainan yang menayangkan iklan kepada pemain.

"Jika Anda bertanya kepada saya mengapa saya melakukan ini, jujur saja,
saya benar-benar tidak tahu apakah saya dapat menghasilkan uang," ungkap Zhou Hongyi, pemimpin tertinggi Qihoo, pada sebuah acara ketika dia memberikan hadiah 1 juta yuan (156.115,84 dolar A.S.) kepada seorang kontestan.

Keranjingan kuis ini menggarisbawahi besarnya permintaan konsumen Tiongkok akan hiburan internet, sebuah tren yang membantu mendorong miliaran dolar investasi ke dalam portal berita digital, permainan online, iklan internet, dan konten televisi.

Pertanyaan, yang dibacakan oleh pembawa acara secara langsung, dapat mencakup: "Dari negara mana nanas diimpor ke Tiongkok pada abad ke-16?" "Pada dinasti apa semur daging domba ditemukan?" atau "Berapa banyak jari yang dimiliki Mickey Mouse?"

Kontestan mendapat waktu 10 detik, kerangka waktu yang dirancang untuk mencegah kecurangan, untuk memilih jawaban yang benar dari tiga pilihan. Uang yang dimenangkan bisa mencapai 3 juta yuan per permainan, tetapi sering kali dibagi di antara banyak pemenang.

Toutiao, aplikasi umpan berita yang sangat populer, bernilai 291,5 kuadriliun rupiah (20 miliar dolar A.S.) dalam penggalangan dana pada tahun 2017, demikian yang dikatakan oleh sumber yang dekat dengan perusahaan itu.

Raymond Wang, mitra pelaksana di firma hukum Beijing Anli Partners, mengatakan bahwa acara itu adalah "cara yang relatif murah untuk mendapatkan pengguna," tetapi memperingatkan adanya risiko politik dan teknis.

Wang Ran, seorang investor terkemuka dan kepala bank investasi swasta yang berbasis di Beijing, CEC Capital Group, mengajukan pertanyaan di akun WeChat miliknya tentang masa depan tren acara kuis online. "A) Semakin banyak yang akan memasuki pasar itu. B) Seseorang akan memenangkan 10 juta yuan sekaligus. C) Pihak berwenang akan menindaknya dengan ketat. 10 detik. Mulai!" Reuters

PAUL G. ALLEN PHILANTHROPIES

ANTARTIKA

DRONE PENYELAMAN DALAM

Peneliti dari University of Washington (UW) menurunkan sensor robot senilai 7,3 triliun rupiah (0,5 juta dolar A.S.) ke dalam perairan dingin Antartika dan mengharapkan yang terbaik.

Jika semua berjalan dengan baik, drone itu bisa mengumpulkan beberapa pengukuran paling ekstensif yang pernah ada di bawah landasan es barat yang luas dan rentan di benua itu. Jika ada yang salah, robot itu bisa lenyap ke dalam labirin rongga dan celah di bawah es, tidak pernah terdengar lagi.

"Lingkungannya benar-benar keras dan terpencil," ungkap ahli kelautan Craig Lee dari Laboratorium Fisika Terapan UW di Seattle. "Ini sangat berisiko tinggi."

Sasarannya adalah untuk menjawab salah satu pertanyaan terbesar dalam ilmu iklim: Seberapa banyak dan seberapa cepat kenaikan permukaan laut akibat mencairnya lapisan es Antartika?

Peluang sukses yang tidak pasti membuat proyek itu kecil kemungkinannya mendapatkan hibah penelitian federal. Alih-alih, miliarder Seattle Paul Allen membiayai ekspedisi itu. Dia telah memiliki reputasi untuk mendanai penelitian berisiko dengan potensi dampak besar.

Paul G. Allen Philanthropies mengucurkan dana 26,2 miliar rupiah (1,8 juta dolar A.S.) untuk uji coba lapangan Antartika guna melihat apakah robot itu dapat menjelajahi antarmuka berbahaya tempat landasan es dan samudra bertemu, mengumpulkan data, dan mengirimkannya ke Seattle.

Jika penelitian itu memperoleh hasil yang memuaskan, armada instrumen yang relatif murah dapat dikerahkan di masa depan untuk menyediakan pengukuran jangka panjang terhadap arus samudra, suhu air, dan laju pelelehan.

"Ini akan menjadi prestasi teknologi jika kita bisa melakukannya," ungkap Spencer Reeder, direktur iklim dan energi untuk Allen Philanthropies. "Kami bersedia menanggung risiko awal tersebut, dan jika kami dapat mendemonstrasikan bahwa hal itu mungkin dilakukan, maka yang lain dapat mengikutinya."

Proyeksi terkini kenaikan permukaan air laut global pada tahun 2100 sangat bervariasi — dari 0,3 meter hingga hampir 2 meter — terutama karena para ilmuwan tidak dapat memprediksi nasib lapisan es raksasa yang menutupi Antartika dan Greenland. Antartika Barat saja memiliki es yang cukup untuk meningkatkan permukaan laut di seluruh dunia hampir 3 meter.

"Kami kira hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat," ungkap ahli gletser UW Knut Christianson. "Tetapi kehilangan sebagian kecil dari es itu dapat menciptakan tantangan besar bagi masyarakat pesisir."

Gletser yang menutupi Antartika ditopang oleh landasan es yang mengapung hingga sekitar setengah kilometer tebalnya. Jika pemanasan global menyebabkan landasan es itu runtuh atau mencair, gletser bisa mengalir lebih cepat ke samudra dan mempercepat kenaikan permukaan air laut.

Tim dari UW berencana untuk berfokus pada Gletser Pine Island, lapisan es yang paling cepat meleleh di Antartika, tempat gunung es besar pecah musim gugur ini. Aliran gletser telah melaju hampir 75 persen dalam 40 tahun terakhir, mungkin karena menipisnya landasan es yang mengapung. The Associated Press

AFRIKA SELATAN

Pendidikan YANG MUDAH DIAKSES

Menteri Keuangan Malusi Gigaba mengatakan pada Januari 2018 bahwa Afrika Selatan melanjutkan rencana untuk menawarkan pendidikan universitas gratis kepada para pelajar dari rumah tangga miskin.

Presiden Jacob Zuma mengatakan pemerintah akan menanggung biaya kuliah tanpa memberikan rincian tentang bagaimana biaya kuliah itu akan didanai. Pengumuman itu mengguncang pasar keuangan, dan kritikus mengatakan bahwa itu merupakan janji populis yang berisiko memperlebar defisit anggaran yang sudah menganga.

Laporan pemerintah dan kementerian keuangan mengatakan bahwa rencana itu tidak terjangkau. Beberapa kritikus juga mengatakan bahwa penetapan waktu pengumuman itu, yang muncul beberapa hari sebelum Zuma mengundurkan diri sebagai pemimpin Kongres Nasional Afrika yang berkuasa, menunjukkan bahwa dia tidak lagi peduli dengan tanggung jawab fiskal.

Gigaba memberi tahu jurnalis pada pengarahan yang disiarkan di televisi di ibu kota, Pretoria, bahwa perkiraan biaya telah diselesaikan, dan rencana tersebut akan dilaksanakan selama delapan tahun.

"Presiden berada dalam posisi yang sulit. ... Ini tentang bagaimana mengelola proses itu dan menerapkannya secara berkelanjutan tanpa harus melanggar batas pengeluaran fiskal," ungkapnya.

"Jika presiden tidak bertindak tahun ini untuk menyediakan sejumlah pendanaan, hal itu akan menyebabkan unjuk rasa lebih lanjut," ungkap Gigaba.

Sejak tahun 2015, unjuk rasa yang dilakukan para pelajar yang menuntut pendidikan gratis mengguncang kampus di seluruh negara itu, mengganggu proses pengajaran dan ujian dan berpuncak pada pawai ke kantor Zuma di Pretoria yang mengakibatkan presiden membekukan kenaikan biaya kuliah. Reuters

REUTERS

Fosil Parsial Dinosaurus Seukuran Kalkun Ditemukan di Australia

Lukisan dua ekor Diluvicursor pickeringi

PETER TRUSLER/ PEERJ.COM

Di batu pasir, di samping tanda pasang tinggi di tepi Selat Bass di Australia tenggara, para ilmuwan menemukan fosil dinosaurus pemakan tumbuhan seukuran kalkun berkaki dua yang tampaknya hanyut di sungai kuno yang besar dan berarus kuat.

Ahli paleontologi pada Januari 2018 mengatakan bahwa kerangka parsial binatang yang sebelumnya tidak diketahui itu, diberi nama Diluvicursor pickeringi, yang hidup sekitar 113 juta tahun yang lalu. Fosil itu memberikan wawasan tentang rangkaian dinosaurus selama Periode Cretaceous yang menghuni Australia ketika masih terhubung ke Antartika.

"Kerangka dinosaurus dari Australia sangat langka," ungkap paleontolog University of Queensland Matthew Herne, mencatat bahwa Diluvicursor merupakan dinosaurus Australia ke-19 yang telah diberi nama.

Para ilmuwan menemukan sisa-sisa Diluvicursor di antara sekumpulan fosil batang pohon besar yang bercampur baur yang ternyata juga tersapu aliran sungai saat banjir. Situs itu berada di pantai selatan negara bagian Victoria, sekitar 170 kilometer dari Melbourne.

Diluvicursor memiliki panjang sekitar 2,3 meter. Herne mengatakan dinosaurus itu "beratnya sebanding dengan kalkun besar yang dibudidayakan, tapi tentu saja lebih panjang daripada kalkun oleh karena ekornya." Fosil itu mencakup ekor yang hampir lengkap, bagian bawah tungkai kanan, dan sebagian besar kaki kanan.

Hewan itu hidup berdampingan dengan dinosaurus pemakan daging sepanjang 6 meter, serta dinosaurus dengan pelindung tubuh yang sangat keras, kura-kura, mamalia seukuran celurut, dan reptil terbang yang disebut pterosaurus. Diluvicursor, anggota kelompok dinosaurus yang disebut ornithopoda, mirip dengan dinosaurus herbivora kecil berkaki dua lainnya yang disebut Leaellynasaura yang hidup pada waktu yang hampir bersamaan dan yang sisa-sisanya ditemukan sekitar 15 kilometer jauhnya, demikian ungkap Herne.

Keduanya mungkin telah menempati ceruk ekologi yang berbeda dan makan tanaman yang berbeda. Leaellynasaura lebih ringan tubuhnya, memiliki ekor yang lebih panjang, dan mungkin pelari yang lebih gesit.

"Sebuah analogi dapat dilihat dalam jenis keragaman yang terlihat pada kanguru dan walabi di Australia saat ini yang menempati ceruk yang sangat berbeda, dari dataran terbuka hingga habitat hutan lebat," ungkap Herne.

Diluvicursor menjelajahi dataran banjir lembah rekahan lebar berhutan di antara Australia dan Antartika, yang tetap terhubung hingga sekitar 45 juta tahun yang lalu.

"Dewan juri ingin tahu tentang iklimnya," ungkap Herne. "Beberapa orang percaya bahwa iklimnya dingin dengan es musim dingin, sementara yang lain mengatakan bahwa iklimnya lebih hangat atau lebih sedang."

Nama genusnya, Diluvicursor, berarti "pelari banjir." Nama spesiesnya, pickeringi, mengenang mendiang ahli paleontologi David Pickering.

Penelitian itu diterbitkan dalam jurnal ilmiah *PeerJ*. Reuters

Dewi MUNGIL

AFP/GETTY IMAGES

Pendeta Hindu telah mengurapi seorang gadis berusia 3 tahun sebagai "dewi hidup" yang baru, atau kumari, dari Kathmandu. Dia akan tetap berada di sebuah istana di pusat bersejarah ibu kota Nepal sampai dia mencapai pubertas.

Memakai gaun merah, Trishna Shakya, kumari baru, diambil dari rumahnya ke Durbar Square kuno untuk upacara inisiasi singkat.

Ayahnya kemudian menggendongnya melintasi alun-alun berbatu — yang masih menanggung bekas luka akibat gempa dahsyat yang melanda pada tahun 2015 — ke kuil dan istana tempat dia akan tinggal di bawah penanganan wali yang ditunjuk secara khusus.

Trishna diapit oleh keluarganya dan laki-laki bertelanjang kaki berjubah merah pada acara jalan kaki singkat itu — terakhir kali dia akan terlihat di depan umum tanpa riasan kumari yang rumit sampai masa pubertas.

"Perasaan saya campur aduk. Putri saya telah menjadi kumari, dan itu adalah hal yang baik. Tapi ada juga kesedihan karena dia akan terpisah dari kami," ungkap ayahnya, Bijaya Ratna Shakya.

Trishna meninggalkan saudara laki-laki kembarannya, Krishna, yang menangis saat saudarinya diambil dari rumah keluarganya.

Sebagai kumari, Trishna dianggap sebagai perwujudan dewi Hindu Taleju dan hanya akan diizinkan meninggalkan kuil 13 kali setahun pada hari raya khusus.

Pendeta Hindu melakukan pengorbanan hewan tengah malam sebagai bagian dari inisiasi kumari baru sebagai dewi hidup. Secara historis, 108 ekor kerbau, kambing, ayam, itik, dan telur disembelih sebagai bagian dari ritual itu — sebuah bilangan yang dianggap menjadi pertanda baik dalam agama Hindu — tetapi jumlahnya telah diturunkan akibat tekanan dari aktivis hak-hak binatang.

Tradisi kumari, yang berarti "putri" dalam bahasa Sanskerta, berasal dari masyarakat adat Newar di Lembah Kathmandu. Tradisi itu memadukan unsur-unsur Hindu dan Buddha dan kumari terpenting mewakili masing-masing dari ketiga bekas kerajaan di lembah itu: Kathmandu, Patan, dan Bhaktapur.

Praktik ini dulunya dikaitkan secara erat dengan keluarga kerajaan tetapi terus berlanjut meskipun berakhirnya kerajaan Hindu Nepal pada tahun 2008. Agence France-Presse

— JANGAN — BERKEDIP!

Tukang cukur jalanan Tiongkok Xiong Gaowu dengan cekatan menggunakan pisau cukur lurus untuk mengerik di sepanjang bagian dalam kelopak mata pelanggannya.

"Anda harus lemah lembut, sangat, sangat lemah lembut," ungkap Xiong, yang melakukan pencukuran kelopak mata tradisional di lokasi pinggir jalan di Chengdu, ibu kota provinsi Sichuan di barat daya Tiongkok.

Pelanggan mempercayai praktik "pembersihan mata dengan pisau cukur," seperti yang dikenal dalam bahasa Mandarin, mengatakan bahwa mereka mempercayai keterampilan Xiong dalam menggunakan pisau cukur.

"Tidak, itu tidak berbahaya," ungkap Zhang Tian, 68 tahun. "Mata saya terasa segar setelah bercukur, dan saya merasa nyaman."

Xiong, yang berusia awal 60-an, mengatakan dia mempelajari teknik ini pada tahun 1980-an dan melayani hingga delapan pelanggan seminggu, menagih ongkos 80 yuan (12 dolar A.S.) per sekali cukur. "Pada awalnya sulit, tetapi menjadi sangat mudah sesudahnya," ungkapnya.

Teknik ini tampaknya untuk membuka kelenjar minyak yang melembapkan mata di sepanjang tepi kelopak mata, demikian ungkap Qu Chao, seorang dokter mata yang bekerja di rumah sakit terdekat di Chengdu. "Pasien akan merasa mata mereka kering dan tidak nyaman ketika kelenjar itu tertutupi," ungkapnya. "Ketika dia mencukur, kemungkinan besar dia mencukur bukaan kelenjar-kelenjar ini."

Dia mengatakan ada risiko infeksi jika peralatan tidak disterilkan. "Jika dia benar-benar dapat mensterilkan alat yang dia gunakan, saya masih bisa melihat ada ruang bagi teknik ini untuk bertahan hidup," ungkap Qu.

Meskipun pelanggan bersikeras mata mereka terasa lebih baik setelah bercukur, para penonton meringis saat melihat Xiong menghunus pisau cukurnya. "Saya takut untuk melakukannya," ungkap He Yiting, 27 tahun, yang meringis saat dia menyaksikannya. Reuters

MAINKAN BANDNYA

Band militer Vietnam beraksi selama upacara penyambutan untuk Presiden A.S. Donald Trump di Istana Kepresidenan di Hanoi, Vietnam, pada 12 November 2017. Protokol resmi itu dibuka dengan lagu kebangsaan A.S. dan Vietnam, diikuti oleh penampilan militer Vietnam dan inspeksi oleh Presiden Vietnam Tran Dai Quang dan Trump. "Kunjungan kenegaraan Presiden A.S. ke Vietnam merupakan tonggak sejarah dalam hubungan Vietnam-A.S., menciptakan momentum yang kuat untuk pengembangan kemitraan bilateral dan komprehensif yang substantif, efektif, dan stabil," ungkap Quang, demikian menurut Voice of America.

Foto Dari: **NGUYEN HUY KHAM** | Reuters

RELEVAN. BERWAWASAN. ONLINE.

www.ipdefenseforum.com

ISI YANG BARU DITERBITKAN SETIAP HARI!

BERLANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA

Indo-Pacific Defense FORUM adalah majalah militer yang disediakan secara CUMA-CUMA bagi siapapun yang berhubungan dengan masalah keamanan di wilayah Indo-Asia-Pasifik.

UNTUK LANGGANAN MAJALAH SECARA CUMA-CUMA:

www.ipdefenseforum.com/id/berlangganan

surat: *IPD FORUM* Program Manager
HQ USPACOM, Box 64013
Camp H.M. Smith, HI
96861-4013 USA

MOHON SERTAKAN:

- Nama
- Pekerjaan
- Gelar atau jabatan
- Alamat surat
- Alamat email

Mari bergabung dengan kami di Facebook dan Twitter.